KEBIJAKAN IMPLEMENTATIF HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGHIMPUNAN DANA ILEGAL *(ILLEGAL FUNDING) :* STUDI KASUS BOWO JENGGOT DI PENGADILAN NEGERI MANNA BENGKULU DAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO

TESIS

Oleh:

SUSANTIO,SH

Nomor Mhs : 7912317
BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2016

KEBIJAKAN IMPLEMENTATIF HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGHIMPUNAN DANA ILEGAL *(ILLEGAL FUNDING)* : STUDI KASUS BOWO JENGGOT DI PENGADILAN NEGERI MANNA BENGKULU DAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO

TESIS

Oleh :

SUSANTIO

Nomor Mhs : 7912317
BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian Tesis

Pembimbing :

Dr.Rusli Muhammad, SH.,MH **Tanggal** 22 April 2016

Mengetahui
Ketua Program

Drs.Agus Triyanta, MA.,MH., Ph.D **Tanggal** 27 April 2016

KEBIJAKAN IMPLEMENTATIF HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGHIMPUNAN DANA ILEGAL *(ILLEGAL FUNDING)* : STUDI KASUS BOWO JENGGOT DI PENGADILAN NEGERI MANNA BENGKULU DAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO

TESIS

Oleh :

SUSANTIO

Nomor Mhs : 7912317
BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 1 April 2016 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr.Rusli Muhammad, SH.,MH **Tanggal** 22-4-2016

Anggota

Dr. H.M. Arief Setiawan, SH., MH **Tanggal** 22/4/2016

Anggota

Dr. Aroma Elmina Marta, SH., MH **Tanggal** 22-4-2016

Mengetahui
Ketua Program

Drs.Agus Triyanta, MA.,MH., Ph.D **Tanggal** 27-4-2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

KEBIJAKAN IMPLEMENTATIF HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGHIMPUNAN DANA ILEGAL (*ILLEGAL FUNDING)*

(STUDI KASUS BOWO JENGGOT DI PENGADILAN NEGERI MANNA BENGKULU DAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO)

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterang-keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 April 2016

SUSANTIO

Motto

Bertekadlah untuk tetap jujur dalam keadaan apapun

-Abraham Lincoln-

Pegetahuan maupun ilmu tindak akan menjamin dirimu khusnul khotimah ataupun masuk surga, tapi setidaknya dengan pengetahuan maupun ilmu kita bisa mengajari anak-anak untuk mendoakan agar kedua orang tuanya khusnul khotimah ataupun masuk surga.....

-renungan menjelang dini hari-

-PERSEMBAHAN-

Ku persembahkan khusus untuk istri tercintaku Bekti Handayani dan anak-anak ku Dian Faadhiya SusantioPutra dan Arka Ramadhani Putri Susanti

Semoga Tulisan ini bisa menjadi pemicu semangat kalian untuk senantiasa selalu bersemangat didalam menuntut ilmu dan beribadah

Ku persembahkan juga bagi kedua orang tua Almarhum R.Harwanto dan Almarhumah Ny. Rubiah Supriani dan juga Almarhum Soewargo Kartodihardjo, SH yang membuka wawasan ku didalam menuntut Ilmu Hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan sukur kehadirat Allah S.w.t yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis dan judul "**Kebijakan implementatif hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan penghimpunan dana illegal (Illegal Funding) : Studi kasus Bowo Jenggot di Pengadilan Neger Manna Bengkulu dan Pengadilan Negeri Wonosobo "**

Penulisan ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, MA.,MH., Ph.D Selaku Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. Rusli Muhammad, SH.,MH Selaku Dosen dan Pembimbing yang teah penuh dengan keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan pengarahan dan serta nasehat-nasehat yang sangat berguna dalam penulisan tesis ini hingga selesai.

4. Bapak Dr.H.M. Arief Setiawan, SH., MH selaku Dosen Penguji dalam seminar Proposal tesis dan tesis.
5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH.,MH selaku Dosen Penguji dalam seminar Proposal dan tesis.
6. Seluruh Dosen pada program Pasca Sarjana Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Seluruh staf dan karyawan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
8. Mas Yusri dan Mba Ika yang selalu memberikan semangat dan bantuan untuk segera menyelesaikan study ini.
9. Istriku Bekti Handayani beserta anak-anak ku Dian Faadhiya Susantio Putra dan Arka Ramadhani putri Susanti yang telah memberikan dukungan semangat hingga selesainya tesis ini.
10. Rekan-rekan Advokat yang tergabung didalam Dewan Pimpinan Wilayah Assosiasi Pengcara Syariah Indonesia (APSI) Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu memberikan suport hingga selesainya penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini dengan baik.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dijadikan amal jariah dan memperoleh balasan rahmat serta karunia Allah S.w.t .

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan

Wassalammualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 April 2016

Susantio

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …… i
HALAMAN PERSETUJUAN ……... ii
HALAMAN PENGESAHAN ……. iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN ..…… iv
KATA PENGANTAR …… v
PERNYATAAN …….. viii
DAFTAR ISI …….. ix
BAB I. PENDAHULUAN ……..…… 1
A. Latar Belakang …… 1
B. Rumusan Masalah ……..…… 12
C. Keaslian Penelitian 12
D. Tujuan Penelitian ……. 13
E. Manfaat Penelitian ……. 14
F. Tinjauan Pustaka ……. 14
G. Metode Penelitian ……. 18
H. Sistematika Penulisan …… 21
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ……... 24
A. Pengertian Tindak Pidana ……..... 24
B. Unsur-unsur Tindak Pidana ……. 25
C. Jenis-jenis Tindak Pidana ……. 30
D. Subjek Tindak Pidana …….. 34
BAB III. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DIDALAM MENANGGULANGI *ILLEGAL FUNDING* 38
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana …… 38
B. Penggunaan Hukum Pidana sebagai Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Illegal Funding* .....…… 45
C. Penegakan Hukum sebagai bentuk penanggulangan Kejahatan *Illegal Funding* .....…..... 53
BAB IV. KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM *ILLEGAL FUNDING*..... 58
A. Implementasi sanksi pidana dalam kejahatan *illegal funding*..…… 58
B. Implementasi sanksi pidana dalam KUHP dan di luar KUHP.....81
C. Dampak implementasi sanksi pidana dalam kasus Bowo Jenggot di Pengadilan Negeri Manna Bengkulu dan Pengadilan

Negeri Wonosobo 96
BAB V. PENUTUP ……..…….. 114
A. Kesimpulan ……. 114
B. Saran-saran …...……. 115
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Judul penelitian ini adalah kebijakan implementatif hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan penghimpunan dana illegal (Ilegal Funding) study kasus kasus Bowo Jenggot di Pengadilan Negeri Manna Bengkulu dan Pengadilan Negeri Wonosobo. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif dan menggunakan pendekatan Yuridis Normatis dan Yuridis Sosiologis, yaitu menganalis suatu permasalahan dalam penelitian dari sudut perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku dan gejala didalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu dampak dari krisis moneter adalah munculnya usaha-usaha penghimpunan dana masyarakat yang meniru sistem operasional perbankan yang berbentuk koprasi atau perseroan terbatas akan tetapi tidak mempunyai ijin dari bank Indonesia ataupun ataupun otoritas penghimpunan dana yang diatur didalam regulasi diluar Undang-undang Perbankan. Praktek ini disebut sebagai bank gelap, dan keberadaannya sangat merugikan kepentingan masyarakat. Sehingga diperlukan kebijakan hukum agar praktek bank gelap ini tidak menjadi faktor terpuruknya ekonomi masyarakat. Peranan kebijakan hukum pidana didalam memberantas bank gelap agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana penghimpunan dana illegal.

Kejahatan penghimpunan dana mulai marak terjadi setelah Indonesia lepas dari krisis moneter yang berkepanjangan yang mengakibatkan runtuhnya sistem ekonomi dan perbankan di Indonesia. Praktek pemberian bunga yang tinggi dilakukan oleh perbankan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kesulitan likuiditas dunia perbankan yang saat itu sudah mengalami kesullitan dan berimbas pada dana pihak ke-3 (dana masyarakat). Pemerintahpun mengeluarkan kebijakannya melalui Bank Indonesia dengan mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang juga bukan merupakan solusi. Sebagai akibat kebijakan pemberian bunga tinggi untuk dana masyarakat banyaknya pemilik modal/dana memilih untuk menyimpanya dalam bentuk tabungan dan deposito karena lebih mengutungkan dari pada dijadikan modal usaha. Stabilitas perbankan sangat mempengaruhi satabilitas ekonomi secara keseluruhan , sebagaimana yang terjadi diawal tahun 1997. Kepercayaan pada sistem perbankan Nasional merupakan salah satu kunci utama untuk memelihara stabilitas perbankan sehingga krisis monerter tidak terulang kembali. Kepercayaan dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang lebih baik lagi.

Kebijakan implementatif sanksi pidana didalam penanggulangan illegal funding melalui sistem peradilan pidana berdampak pada munculnya disparitas, hal ini terjadi pada proses penyidikan dan penyusunan dakwaan yang diikuti oleh proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar pembuatan putusan. Munculnya disparitas sebagai dampak dari penerapan sanksi pidana bukanlah hal yang negatif sepanjang disparitas itu rasional dan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan rasa tidak adil bagi terpidana maupun korban tindak pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercermin didalam UUD 1945 sebagai dasar negara. Cita-cita mewujudkan negara hukum ini merupakan cita-cita para pendiri negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya didalam melaksanakan hak dan kewajibannya dan menghindarkan kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya. Hukum akan selalu menjadi pedoman dan acuan negara untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan guna mewujudkan kehidupan bernegara yang sesuai dengan UUD 1945. Pada awal kemerdekaan Indonesia hukum nasiona sebagai suatu sistem belum terbentuk, secara komprehensif dan belum mempunyai nilai-nilai kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang ada pada saat itu adalah sitem hukum peninggalan kolonial Belanda yang kemudian diberlakukan secara nasional sejak dikeluarkannya UU No.1 tahun 1946 khususnya untuk sistem hukum Pidana yang berupa KUHP (Wvs). Pembaharuan hukum terus dilakukan oleh Negara Indonesia sebagai negara hukum dan Konsekuensi dari hukum yang terus mengalami pengubahan, perubahan, pembaharuan, dan reformasi hukum *(legal reform).* Hukum harus tetap bisa digunakan untuk jangka panjang dan digunakan untuk mengatur sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Satjipto Raharjo menyebutkan jika hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, sehingga dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan

Hukum yang Pro-rakyat.[1] Menurut Nonet and Zelznik, mengemukakan tiga perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat yang sudah terorganisir secara politik dalam bentuk negara. Ketiga tipe tatanan hukum itu adalah tatanan hukum represif, tatanan hukum otonomius, dan tatanan hukum responsif. Dalam tipe tatanan hukum hukum represif, hukum dipandang sebagai abdi kekuasaan represif dan perintah dari yang berdaulat (pengemban kekuasaan politk) yang memiliki kewenangan diskresioner tanpa batas. Dalam tipe ini maka hukum dan negara serta politik tidak terpisah, sehingga aspek instrumental dari hukum sangat mengemuka (dominan lebih menonjol ke permukaan) ketimbang aspek ekspresifnya.[2] Di era orde lama maupun orde baru tatanan hukum lebih pada tatanan hukum yang refresif yang yang saat itu dikenal dengan Politik sebagai panglima, ekonomi sebagai panglima, sehingga hukum saat itu hanya berfungsi sebagai alat penguasa untuk mengawal dan mangamankan kebijakan ekonomi dan kebijakan politiknya saja. Dalam tipe tatanan hukum represif memperlihatkan karakteristik sebagai berikut:[3]

1. Kekuasaan politik memiliki akses pada institusi hukum, sehingga tata hukum praktis menjadi identik dengan negara, dan hukum disubordinasi pada "rasion de etre".
2. Konservasi otoritas menjadi preukopasi berlebihan para pejabat hukum memunculkan "perspektif pejabat" yakni perspektif yang memandang keraguan harus menguntungkan sistem dan sangat mementingkan kemudahan administratif.
3. Badan kontrol khusus menjadi pusat kekuasaan independen yang terisolasi dari konteks sosial yang memoderatkan dan kapabel melawan otoritas politik.
4. Rezim hukum ganda menginstitusionalisasi keadilan kelas yang mengkosolidasi dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.

[1] Dikutif dari http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html)
[2] Diktif dari http://www.negarahukum.com/hukum/pembaharuan-hukum.html
[3] ibid

5. Perundang-undangan pidana mencerminkan dominan *mores* yang sangat menonjolkan legal moralisme.

Dalam tatanan hukum otonomius hukum lebih cenderung dipandang sebagai institusi yang mandiri yang dapat menghidri represi dan pengaruh dari penguasa dan m elindungi integritasnya, dalam hal ini berintikan pada rule of law. Sehingga segala putusan penjabat hukum, integritas hukum dan dalam kerangka hukum memiliki batas-batas yang jelas dan selalu menonjolkan prosedural untuk mencapai keadilan. Dalam tipe tatanan hukum responsif, hukum dipandang sebagai fasilitator respon atau saran tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Pandangan ini mengimpilikasikan pada dua hal. Pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Kedua, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Dalam tipe ini, aspek ekspresif dari hukum lebih mengemuka ketimbang dua tipe lainnya dan keadilan substantif juga dipentingkan disamping keadilan prosedural. Melalui tipe hukum yang responsif inilah, Sadjipto Rahardjo menganggapnya sebagai tipe hukum ideal, sebab merupakan tipe hukum yang memperjuangkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, sehingga dinamakan sebagai hukum progresif[4]. Selain pendapat ahli hukum tersebut diatas juga terdapat pendapat-pendapat lain didalam teori pembaharuan hukum yaitu Roscoe Pound yang terkenal dengan ajarannya hukum sebagai as a tool of social enginering. Ajaran ini digambarakan sebagai ajaran realisme yang memandang hukum sebagai alat pembaharu sosial yang bertujuan untuk menciptakan hukum yang lebih efektif, ajaran ini juga sering digolongkan sebagai sociological jurisprudent yang menitik beratkan pada hukum senantiassa menjadi saranna pembaharuan setlah melihat praktik dilapangan. Pendapat ini juga yang diadopsi oleh Mochtar Kusuma Atmaja sehingga munculah teori hukum pembangunan *(Law and development)*, ajaran hukum ini pernah populer, bahkan dikenal sebagai mazhab Hukum Unpad (universitas Padjajaran). Perbedaan yang mencolok dari apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadaja dengan Roscue Pound, hukum bukan sekedar alat semata, tetapi diluar itu juga harus dipandang sebagai sarana. Mochtar

[4] ibid

berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court)*pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai *"alat"* akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan *"legisme"*sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila *"hukum"* di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional[5].

Munculnya teori hukum ini di belakangi 2 (dua) aspek yaitu: *Pertama***,** ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. *Kedua***,** dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern[6]. Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak

[5] 5Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan,Penerbit Cv. Utomo, Jakarta, 2006, hal 441

[6] Otje Salman dan Eddy Damian (ed), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M., Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2002, hlm. V

cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.[7] Lebih jauh Romli Artasamita merujuk kepada teori hukum pembangunan yang dikemukakan Mochtar dan menyimpukan lima inti ajaran teori itu sebagai berikut :

1. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oelh perubahan dan hukum berfungsi agar dpat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur, menurut Mochtar dapat dibantu o;eh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduannya. Beliau menolak perubbahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata;

2. Baik perubahan maupun ketertiban(atau keteraturan) merupakan awal dari ada masyarakat yang sedang membangun makan hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan;

3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat;

4. Hukum yang baik ialah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu;

5. Implementasi fungsi hukum tersebut hanya dapat diwujudkan oleh suatu kekuasaan akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan didalam hukum itu sendiri.[8]

[7]

[8] Romli Artasasmita, " Globalisasi dan kejahatan Bisnis, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,cet-1 2010, hal 11-12.

Menurut mochtar konsep hukum sebagai sarana pembaharuan hukum mencerminkan kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan dan keadilan tidak boleh ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan melainkan sesuai dengan nilai-nilai kehendak yang baik yang berlaku didalam mayarakat. Lebih jauh Romli Artasasmita berpendapat jika model hukum pembangunan yang muncul pada tahun 1970an belum mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti sistem politik, birokrasi dan prinsip-prinsip goodgovernance yang tidak sebesar saat ini gaungnya ketika itu.[9] Perubahan praktik pembangunan dan penegakan hukum sejak orde lama, orde baru maupun orde reformasi hingga saat ini belum selesai dan mencapai tujuannya seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Perubahan sistem politik yang terjadi pada tahun 1965 yang dikenal dengan orde lama ke orde baru ataupun pada tahun1997-1998 yang merupakan transisi dari Orde baru ke orde Reformasi juga berpengaruh pada pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. Politik hukum yang tadinya dilakukan secara otoriter berubah menjadi sistem hukum yang lebih demokratis yang terbebas dari intervensi dan kepentingan kelompok tertentu. Keadaan sosial, ekonomi, politik dan hukum yang saat itu berada dipersimpangan jalan ini diperkeruh oleh suasana perkembangan internasional didalam hampir seluruh bidang kehidupan yang meneguhkan bahwa globalisasi abad ke-21 bukan lagi semata-mata sebagai proses atau sebagai suatu sistem yang harus dijalankan melainkan telah dikukuhkan sebagai suatu idiologi masyarakat internasional[10]

Globalisasi di Indonesia berpengaruh terhadap segala sendi kehidupan masyarakatan dan negara berdampak negatit dan hal ini tidak disadari oleh para pemegang kekuasaan. Adapun dampak negatifnya yaitu semakin jauh tujuan untuk mewujudkan negera

[9] Ibid

[10] Jacques Gellinas ,*"Jugernaut Politics: the Predatory of Gloabalization": Oxford University Press*, 2003 (dikutif dari Romli Artasamita, ibid hal.13.

kesejahteraan dan mewujudkan negara yang berlandaskan hukum. Pasca transisi dari orde baru ke ored reformasi tidak menjadikan pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia semakin membaik hal ini terjadi karena tuntutan reformasi disegala bidang termasuk dalam hal ini politik hukum yang dilaksanakan. Pembangunan hukum saat itu bisa dikatakan sangat ekstrim dan cepat sehingga banyak sumber hukum yang dirubah dan dicabut termasuk dalam hal ini UUD 1945 yang telah dilakukan amandeman hingga ke -4 (empat). Tuntutan reformasi yang cepat dengan tanpa mendalami esensi reformasi kehidupan ketatanegaraan dan sistem politik saat itu. Reformasi yang dijalankan saat itu juga tidak mempertimbangkan kesiapan masyarakat dan penguasa ataupun ahli-ahli hukum untuk menyiapkan payung hukum yang memadai sehingga tidak merugikan kehidupan kehidupan bernegara.

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting didalam perekonomonian nasional untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Stabilitas sistem perbankan akan sangat berperngaruh pada sistem pererkonomian, sehingga sistem perbankan harus diatur dengan perundangan-undangan yang sangat ketat. Ketatnya sistem pengaturan perbankan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban penguasa untuk menjaga stabilitas perkonomian. Pada tahun 1968 Pemerintah merubah sebuah bank yang sudah dinasionalissai pada tahun 1951 yaitu bank De Javasche Bank yang kemudian melalui Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 dijadikan Bank Sentral yang saat ini dikenal menjadi Bank Indonesia. Bank sentral inilah yang bertugas untuk melakukan pengaturan, pengawasan terhadap perbankan di Indonesia disamping bertugas menjaga stabilitas mata uang Indonesia. Sehingga untuk memperkuat sistem perbankan dan memperluas akses masyarakat terhadap perbankan, pada akhir tahu 1988 pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan Oktober yang salah satu kebijakanmnya yaitu mempermudah pendirian bank-bank dan

pengaturannya. Keluarnya Paket Oktober 1988 merupakan titik balik dalah sistem perbankan di Indonesia, dikarenakan bank Indonesia pada kurun waktu 1971-1972 telah banyak menertibankan sistem perbankan dan pemberia ijin untuk mendirikan sebuah bank barupun sudah dihentikan sejak tahun 1971. Pendirian bank-bank kurun waktu tahun 1965 hingga 1971 Penguasa saat itu tidak mendirikan bank-bank akan tetapi melakukan nasionalisasi terhadap bank-bank milik swasta pribumi untuk dijadikan bank milik pemerintah. Kebijakan Paket Oktober 1988 ini merupakan kebijakan yang sangat liberal dalam sistem perbankan nasional sehingga hanya dengan modal 10 Milyar pengusaha-pengusaha yang saat itu dekat dan merupakan kroni dari Penguasa bisa mendirikan sebuah bank. Kebijakan mudahnya pendirian bank inin juga berlaku bagi pendirian bank-bank milik asing maupun bank-bank yang merupakan patungan antara pengusaha asing dan pribumi. Bank asing juga diberi ijin untuk mendirikan cabangnya di 6 kota di Indonesia dan melakukan ekpansi dengan memberikan kredit terhadap msayarakat. Pada awal tahun 1990 setelah dikeluarkannya paket Oktober 1988 banyak bermunculan bank-bank baru, baik Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, baik milik swasta, asing maupun pemerintah, sehingga pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan saat itu perundang-undangannya sangat minim. Undang-undang ini mencabut undang-undang nomor 13 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan. Dikeluarkanya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 ini bertujuan untuk mengatur sistem perbankan yang lebih sehat dan mengawal pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakata yang adil dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Sistem perbankan nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi ulamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana

masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Pada awal tahun 1997 perekonomian Indonesia diambang kehancuran hal ini ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi yansg berkepanjangan dan meruntuhkan sendi-sendi ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini memicu juga nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar dan terhadap nilai mata uang asing lainnya yang semakin lemeh. Rendahnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar Amerika inilah yang pada akhirnya memicu makin tingginya hutang luar negeri Indonesia terhadap IMF dan negera-negara donor. Rendahnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar juga memicu tingginya bunga bank dalam hal ini bunga simpanan, bunga kredit juga menimbulkan banyaknya perusahaan-perusahaan gulung tikar sehingga memicu tingginya angka para pencari kerja. Dan akhir dari segala krisis ekonomi inilah yang pada akhirnya meruntuhkan dominasi kekuasaan Rejime Soeharto yang berkuasa hampir 30 tahun. Krisis ekonomi juga banyak menguntungkan para pemilik modal, yang saat itu lebih senang menanam modalnya di bank dikarenakan bunganya lebih tinggi dibanding jika modal itu dijadikan modal untuk usaha (sebagai ilustrasi saat itu bunga bank berkisar 30-60% pertahunnya). Sehingga saat itu fungsi bank hanya berfungsi sebagai penghimpunan dana, sedangkan fungsi sebagai penyalur dana masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan saat itu banyak sektor-sektor usaha yang gulung tikar dikarenakan bunga pinjaman yang tinggi. Sebagai akibat dari krisis tersebut juga banyak bank-bank yang mengalami kehancuran dikarenakan mempunyai kewajiban membayar bunga tinggi sehingga semua bank di Indonesia mengalami kesulitan likuiditas. Efek domino yang diciptakan pada

tahun 1997-1998 mengakibatkan runtuhnya sistem perbankan nasional hal ini berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Menurut Djumhana, lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat[11]. Untuk memelihara kepercayaan tersebut jaminan hukum atas perlindungan dana masyarakat menjadi suatu keniscayaan. Hal ini bertujuan agar masyarakat terlindung dari berbagai tindakan dari institusi atau oknum yang tidak bertanggungjawab yang dapat merusak kepercayaan masyarakat tersebut.

Berbagai upaya telah dikembangkan dalam rangka memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan serta melindungi perbankan dari berbagai potensi kejahatan yang mungkin terjadi. Negara dalam hal ini juga sudah mempunyai peraturan yang mengatur sistem perbankan nasional yaitu UU No.10 tahun 1998 sebagai perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang itu juga memberikan pengaturan perbankan beserta oprasional perbankan dan juga pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia, didalam undang-undang ini juga selain mengatur mekanisme perbankan juga mengatur tindak pidana dibidang perbankan yang sanksinya juga lebih berat dibandingkan undang-undang sebelumnya.

Meskipun undang-undang perbankan sudah mengatur sistem yang didalamnya sudah memuat juga saksi-sanksi yang berat bagi para pelanggarnya. Sebagai akibat dari kebijakan Oktober yang memudahkan berdirinya bank-bank baru, mengakibatkan banyak persaingan yang tidak sehat didalam perbankan nasional baik bank milikk pemrintah maupun swasta. Sehingga hal ini berimbas pada sistem oprasional perbankan yang melalaikan prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan, hal ini juga diperparah dengan adanya campur tangan dari pihak ketiga baik pemilik bank maupun Penguasa. Sehingga

[11] Muhammad Djumhana, 2005. *Hukum Perbankan di Indonesia,* Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.163.

kurun antara tahun 1992 hingga tahun 2000 banyak sekali kejahatan-kejahatan perbankan yang timbul sebagai ekses dari melalaikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Berbagai kejahatan dibidang perbankan pada kenyataannya kerap sekali terjadi di masyarakat, terutama kajahatan-kejahatan dengan modus penghimpunan dana ilegal dengan berkedok investasi, koperasi ataupun model bank gelap lainnya. Maraknya kejahatan penghimpunan dana illegal sebagai efek dari penerapan bunga simpanan tinggi pada saat krisis perbankan, sehingga para pelaku kejahatan inipun berupaya memberikan pelayanan layaknya sebuah bank dan memberikan iming-iming bunga yang lebih tinggi dari Bank. Adalah seorang yang bernama Muhamad Sulaiman Wibowo salah satu pengusaha yang memanfaatkan situasi saat itu dan dikenal dengan Bowo Jenggot yang membuka usaha bisnis penjualan pulsa yang berada di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Pada awalnya usaha tersebut hanya merupakan perusahaan perseorangan, kemudian seiring dengan kemajuannya perusahaanya berubah menjadi PT.Win Win Link Bowo Jenggot yang jenis usahanya penghimpunan dana (tabungan haji, Deposito, tabungan syariah dll). Praktek yang dilakukan oleh Bowo Jenggot ini berkembang dengan pesat dan membuka cabang-cabang hampir diseluruh kota-kota yang ada di Indonesia yang disinyalir kerugian masyarakat sebagai akibat dari prkatek penghimpunan dana mencapai kurang lebih Rp. 1.000.0000.000.000 (satu trilyun rupiah). Bowo Jenggot sendiri pada awalnya merupakan seorang nasabah bank gelap yang berbentuk koprasi yang beroprasi layaknya sebuah perusahaan yang bergerak didalam penghimpuan dana yang berbentuk investasi dan juga telah didakwa melanggar undang-undang perbankan.

Berdasarkan uraian di atas penelitian dalam bentuk tesis ini berusaha mengeksplorasi bagaimana sesungguhnya penerapan kebijakan hukum pidana yang ada di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan penghimpunan dana illegal serta terjadinya disparitas didalam impelementasinya dalam 2 (dua) perkara *illegal funding* yang

dilakukan oleh Sulaiman Wibowo alias Bowo Jenggot di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna Bengkulu dan Pengadilan Negeri Wonosobo.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan implementatif hukum pidana dalam menangulangi kejahatan *illegal funding*
2. Bagaimana dampak dari kebijakan implementatif hukum pidana terhadap kejahatan illegal funding dalam kasus Bowo Jenggot di Pengadilan Negeri Manna Bengkulu dan Pengadilan Negeri Wonosobo

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penulusuran yang telah dilakukan di berbagai literature dan kepustakaan yang ada, tidak ditemukan satupun penelitian yang membahas tentang tindak pidana penghimpunan dana ilegal baik secara umum maupun menyangkut kebijakan hukum pidananya.

Beberapa penelitian menyangkut kejahatan perbankan secara umum pernah dilakukan diantaranya: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Piter Abdullah[12] dengan judul "Kejahatan Perbankan dan Efektivitas Pengawasan Perbankan: Menggabungkan teori Permainan dan Pendekatan *Analytical Network Process"*. Penelitian ini berupaya menganalisis kejahatan perbankan dengan menggunakan teori permainan dan pendekatan Proses Jaringan Analisis (*Analytical Network Process* /ANP) yakni bahwa setiap pemaindalam proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pemain lain.

[12] Piter Abdullah, 2010. *Kejahatan Perbankan dan Efektivitas Pengawasan Perbankan: Menggabungkan teori Permainan dan Pendekatan Analytical Network Process*, Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan, Oktober 2010 Bank Indonesia, Jakarta, hlm.223-240.

Seorang pemain akanmembuat keputusan tidak hanya berdasarkan balasan atau kriterianya tetapi juga pada alternative keputusan yang diambil oleh pemain lain. Hasil ini mendukung argumen Tsebelis bahwa interaksi agen di peradilan pidana lebih baik dianalisa dengan menggunakan teori permainan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hibnu Nugroho[13] yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Bank Gelap".Penelitian ini berupaya menjawab permasalahan tentang bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban 'bank gelap' serta bagaimanakah upaya penegak hukum untuk mengantisipasi kejahatan bank gelap.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Butje Tampi dengan judul Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan"[14].Penelitian ini membahas tentang bagaimana ruang lingkup dan dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan serta bagaimana kebijakan terhadap perlindungan korban dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan.

Berbagai penelitian di atas tidak satupun yang pernah membahas secara spesifik tentang kejahatan penghimpunan dana *illegal.* Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan penghimpunan dana *illegal* khususnya dalam perkara Bowo Jenggot belum pernah dilakukan sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi *illegal funding*.

[13] Hibnu Nugroho, 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Bank Gelap,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9 No.1 Januari 2009, Univeristas Jendral Soedirman, Purwokerto, hlm. 1-12

[14] Butje Tampi, 2011. *Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan,* Riset Fakultas Hukum Universitas Samratulagi, Manado, hlm.32

2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal funding* dalam kasus Bowo Jenggot di Bengkulu dan Wonosobo dan apa dampaknya implementasi tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan penghimpunan dana illegal, dalam hal ini pengembangan kebijakan tersebut pada akhirnya akan menjadi sumbangan berharga dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah yang dapat mendukung penanggulangan kejahatan penghimpunan dana ilegal dalam ruang lingkup yang lebih luas.

F. Tinjauan Pustaka

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal calture*).

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal*

culture).[15] Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang dikerluarkan, aturan-aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).[16] Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama.

Banyak sub budaya dari suku-suku yang ada, agama, kaya, miskin, penjahat dan polisi mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam, yaitu polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, karena sikap dan

---

[15] Lawrence Friedman, "*American Law*", (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 6.
[16] *Ibid*, hal. 7.

kebiasaan mereka akan membentuk banyak keragaman dalam sistem hukum. Setidak-tidaknya kesan ini akan mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.[17] Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.[18] Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat. Maka untuk memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistim. Dengan kata lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol. Pemikiran ini berada di balik pengawasan dan keseimbangan (*check and balance*) dan di balik Peradilan Tata Usaha Negara, Inspektur Jenderal, Auditur dan lembaga-lembaga seperti, KPK, Komisi Judisial. Kesemuanya ini harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa.

---

[17] Donald Black, "*Behavior of Law*", (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976), hal. 2.

[18] Lawrence Friedman, *Op.cit*, hal. 3.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti

hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yakni penelitian mendasarkan pada norma-norma yang memandang hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Surjono sukanto dan sri Mamudji mengatakan jika penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data hukum

sekunder) [19]. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis Normatif dan yuridis sosiologis. Melalui pendekatan yuridis normatif dimaksudkan menitik beratkan pada penelaahannya dari lihat dari aspek hukum tentang perbankan terutama yang mengatur tentang perijinan penghimpunan dana masyarakat yang kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan penggunaan yuridis sosiologis untuk melihat pengaruh undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, serta meneliti efektivitas Undang-Undang dalam hal ini terkait kejahatan penghimpunan dana illegal (*illegal funding)* kemudian mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen.

2. Obyek Penelitian

   Obyek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Manna Bengkulu dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo

3. Data Penelitian :

   Data Penelitian data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan study dokumen yang ditunjang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

   a. Data primer

      1. UUD 1945 beserta penjelasan dan amandemennya
      2. Kitab undang-undang hukum pidana
      3. UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 Tahun

[19] Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitia hukum normatif, suatu tinjauan singkat, Raja Grafindo, 1995, hal 15

1992

4. UU No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

5. UU No. 6 tahun 2009 Tentang Perubahan Perpu No. 6 tahun 2008 perubahan kedua UU No,23 Tahun 1999

6. UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankab Syariah

7. UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

2. Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang koprasi

3. Berbagai Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang perbankan

4. Berbagai Peraturan yang mengatur tetang perbakan yang di keluarkan Otoritas Jasa Keuangan

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data Primer, adapun data Sekunder, meliputi :

1. Putusan-putusan pengadilan.
2. Buku dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana .
3. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penghimpunan dana.
4. Berbagai makalah dan artikel yang berkaitan dengan masalah penghipuna dana illegal dalam penelitian ini.
5. Berbagai dokumen dibidang perbankan yang berkaitan dengan penghimpunan dana illegal

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, meliputi ;

1. Kamu Hukum
2. Kamus bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui study pustaka baik melalui penelusuran terhadap perundang-undangan , dokumen putusan-putusan pengadilan, maupun referensi-referensi hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan study dokumen yaitu dengan cara membaca dan mempelajari secara sitematis berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan dan berbagai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Analisa Data

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan
c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan ini yang terbagi kedalam beberapabab dan masing-masing terbagi lagi kedalam beberapa sub bab. Adapun penulisan tesis ini terdiri dari lima (5) bab) masing-masing bab tersebut adalah :

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis, pada bab oini juga diuraikan meteode penelitia Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II.**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan umum Tentang Tindak Pidana, berisi tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana dan Subjek Tindak Pidana.

Bab III. **KEBIJKAN HUKUM PIDANA DIDALAM MENANGGULANGI *ILLEGAL FUNDING***

Dalam bab ini diuraikankan tentang Pengertian dan Ruang Lingkup kebijakan hukum pidana, dan diuraikan juga tentang Penggunaan Hukum Pidana sebagai Kebijakan Penanggulangan Kejahatan untuk selanjutnya diuraikan juga tentang Penegakan Hukum sebagai bentuk Penanggulangan Kejahatan ***Illegal Funding.***

BAB. IV. KEBIJAKAN FORMULASI DAN IMPLEMENTASI SAKSI PIDANA DALAM ILLEGAL FUNDING

Bab IV Merupakan hasil Penelitian dan menguraikan tentang Implementasi Saksi Pidana dalam Kejahg Dampak Impementasi saksi Pidana dalam Kasus Bowo Jenggot di Pengadilan Negeri Manna Bengkulu da Nomor 44/Pid.B/2011/PN. MN jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 93/Pid/2011/PT.BKL atas nama Sulaiman Wibowo

alias Bowo Jenggot dan Pengadilan Negeri Wonosobo Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 45/Pid.sus/2014/PN.Wsb

Bab V. PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permaslahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian *Tindak pidana (strafbaar feit).* Menurut Sianturi[20], Istilah bahasa Belanda "*strafbaare feit*", diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai: perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, atau perbuatan pidana dan tindak pidana.

Menurut Moeljatno[21], tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.122
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. " Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya"[22].

---

[20] Sianturi, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, hlm. 204

[21] Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinekacipta, Jakarta, hlm. 54

[22] *Ibid*, hlm.56

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan *(die strafbaarheid van het feit)* dan dapat dipidananya orang *(strafbaarheid van den person).* Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana *(criminal act)* dan pertanggungjawaban pidana *(criminal responsibility).* Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno[23] *"Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".*

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons sebagaimana dikutip Satochid menyatakan bahwa tindak pidana *(strafbaar feit)* itu harus memuat beberapa unsur, yakni[24]:

1. Suatu perbuatan manusia (*menslelijke handelingen)* baik positif atau negatif, baik berbuat (*een doen)* ataupun tidak berbuat atau membiarkan (*een nalaten).*
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana *(statbaar gesteld)*

[23] *Ibid*, hlm.60

[24] Kartanegara, Satochid, tt. *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Yogyakarta, hlm.74

3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab *(toerekeningsvatoaar person).*

Secara garis besar Simon membagi unsur-unsur (*bestandelen)* dalam tindak pidana menjadi dua golongan yakni unsur objektif dan unsur subjektif[25].

Menurut Simon, unsur objektif adalah unsur- unsur yang terdapat diluar diri manusia, yakni yang berupa: tindakan atau perbuatan orang (*handeling),* suatu akibat tertentu (*een bepaald gevold),* dan keadaan tertentu (*omstandigheid),* yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Sementara unsur subjektif meliputi perbuatan dilakukan oleh Orang yang mampu bertanggung jawab *toerekeningsvatoaar person,* dan adanya kesalahan atau *schud (dollus atau culpa).* Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana meliputi perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil)[26].

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
   a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU

[25] *Ibid*, hlm.84-86

[26] Moeljatno, *Opcit*, hlm 60-85

No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini

Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

a. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP.

Pasal 164 KUHP : *barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.

Pasal 531 KUHP : *barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain,*

diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

b. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjad 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana

c. Unsur melawan hukum. Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya pasal 285 KUHP : "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan". Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsure itu dianggap ada.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang "pengertian" unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yan memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Bagi Jaksa pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah :

a) Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas;

b) Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian / penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi;

c) Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

d) Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana;

e) Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah;

f) Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi[27].

C. Jenis-jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan (*misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen)*

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut dalam KUHP Buku II dan Buku III. Menurut Satochid[28], ada dua istilah untuk menunjuk dua pembagian delik tersebut, yakni *Rechtdelicten* untuk merujuk pada kejahatan dan *Wetsdelicten* merujuk pada pelanggaran.

Satochid memberikan pengertian *rechtdelicten*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut "kejahatan" (mala perse).

Sementara *wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada

[27] Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I, tt, *Asas-asas Hukum Pidana,* Modul Pendidikan dan Pelatihan Jaksa, Jakarta, 34-45

[28] Kartanegara, Satochid, *Opcit,* hlm.109

undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut "pelanggaran". Perbedaan secara kwalitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada "pelanggaran", yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain[29].

2. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

Sementara delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP),

[29] *Ibid*, 109-110

pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362[30].

3. *Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per ommisionen commissa*

   a. Delik commisionis (*commissie delicten)* yakni delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

   b. Delik ommisionis (*ommissie delicten)* yakni delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).

   c. Delik *commisionis per ommisionen commissa* yakni delik yang berupa pelanggaan larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapa dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP)[31].

4. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)

   Delik dolus yakni delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sementara delik *culpa* yakni delik yang memuat

[30] Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I, *Opcit,* hlm.48-49

[31] Lihat Kartanegara, Satochid, *Opcit,* hlm.139

kealpaan sebagai salah satu unsur misal : pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP[32].

5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samenge-stelde delicten*).

   Delik tunggal yakni delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berangkai yakni delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)[33]

6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten)*.

   Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal : merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP)[34].

7. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)

   Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij) misal : penghinaan (pasal 310 dst. jo 319 KUHP) perzinahan (pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, ps. 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai :

   a. Delik aduan yang absolut, ialah mis. : pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

[32] Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I, *Opcit*, hlm.51

[33] *Ibid*

[34] *Ibid*

b. Delik aduan yang relative ialah mis. : pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena[35].

Sebagai catatan bahwa perlu dibedakan antara aduan den gugatan dan laporan. Gugatan dipakai dalam acara perdata, misal : A menggugat B di muka pengadilan, karena B tidak membayar hutangnya kepada A. Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada Polisi.

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisilierde delicten*)

   Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "geprivelegeerd delict". Delik sederhana; misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP)[36].

9. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi, sebagaimana disebutkan dalam dalam pasal 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi[37].

D. Subjek Tindak Pidana

Sebagaimana diuraika terdahulu, bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (naturlijke personen). Ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

[35] *Ibid*, hlm.52

[36] *Ibid*, hlm.53

[37] *Ibid*, hlm.54

1. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata : “barang siapa yang …….”. Kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”.
2. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana, yaitu :
    a. pidana pokok :
        1) pidana mati
        2) pidana penjara
        3) pidana kurungan
        4) pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan
    b. Pidana tambahan :
        1) pencabutan hak-hak tertentu
        2) perampasan barang-barang tertentu
        3) dimumkannya keputusan hakim

Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia.

1. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada / tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
2. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia.

Dalam perkembangannya apakah kecuali manusia tidak ada sesuatu yang dapat melakukan tindak pidana misalnya badan hokum, dalam KUHP terdapat pasal yang

seakan-akan menyinggung soal ini, ialah pasal 59. Pasal ini tidak menunjuk ke arah dapat dipidana suatu badan hukum, suatu perkumpulan atau badan (korporasi) lain. Menurut pasal ini yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan sesuatu fungsi dalam sesuatu korporasi. Seorang anggota pengurus dapat membebaskan diri, apabila dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu dilakukan tanpa ikut campurnya.

Dalam KUHP juga ada pasal lain yang kelihatannya juga menyangkut korporasi sebagai subyek hukum, akan tetapi disinipun yang diancam pidana adalah orang, buka korporasinya. Vide pasal 169 : "ikut serta dalam perkumpulan yang terlarang", dan juga pasal 398 dan 399, mengenai pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.

Bahwa yang menjadi subyek tindak pidana itu adalah manusia, sesuai dengan penjelasan (M.v.T) terhadap pasal 59 KUHP, yang berbunyi : "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia". Akan tetapi ajaran ini sudah ditinggalkan. Dalam hukum positip Indonesia, misalnya dalam "ordonansi barang-barang yang diawasi" (S.1948-144) dan "Ordonansi pengendalian harga" (S.1948-295) terdapat ketentuan yang mengatur apabila suatu badan (hukum) melakuka tindak pidana yang disebut dalam ordonansi-ordonansi itu. Ordonansi obat bius S. 27-278 jo. 33-368 pasal 25 ayat 7. Atau dalam UU Darurat tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU Darurat No. 7 tahun 1955 pasal 15 dimana dalam ayat 1 dan 2 dengan tegas menyebutkan bahwa badan hukum dapat menjadi subyek hukum pidana[38].

Menurut Vos sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo[39], bahwa yang dapat menjadi subyek delik pada umumnya adalah manusia (een natuurlijk person). Hal ini didasarkan pada alasan bahwa *pertama*, terdapatnya rumusan yang dimulai dengan 'hij

[38] *Ibid*, hlm.56-57

[39] Bambang Poernomo, *Loc cit*, hlm.93

die' di dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya, yang berarti tidak lain adalah manusia. *Kedua,* jenis-jenis pidana pokoknya hanya dapat dijalankan tidak lain daripada manusia dan *ketiga,* di dalam hukum pidana berlaku asas kesalahan bagi seorang manusia pribadi.

Menurut Bambang Poernomo, selain manusia, memang dimungkinkan terutama di luar KUHP pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada badan hukum (*rechtspersoon)* akan tetapi dalam bentuk sanksi tindakan. Menurutnya, ketentuan dalam Pasal 59 dan 169 KUHP seolah telah memperdayakan pendapat yang menentukan bahwa badan hukum (perkumpulan) sebagai subyek yang dapat dikenai pidana, akan tetapi kesan yang demikian, menurutnya, ternyata tertuju kepada manusianya yang ikut perkumpulan yang dimaksudkan untuk dipidana[40].

[40] *Ibid*

BAB III

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DIDALAM MENANGGULANGI *ILLEGAL FUNDING*

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian intergral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare)* oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat[41].

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Merujuk kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtpolitiek*. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.[42]

Pengertian politik hukum pidana dirumuskan oleh Moh. Mahfud MD sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi; *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa politik

[41] Barda Nawawi, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.2

[42] *Ibid*, hlm 24

hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum dibangun dan ditegakkan.[43]

Lebih lanjut Mahfud mengatakan bahwa kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum di sini tak hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan sebagai sub sistem yang dalam kenyataannya bukan tak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya,[44] dengan bahasa yang lain, hukum yang dihasilkan oleh pemerintah pada kenyataannya merupakan hasil dari tarik menarik dari kekuatan politik yang mengiringinya.

Sementara, Sudarto mengartikan politik hukum sebagai; pertama, usaha-usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; dan kedua, kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[45]

Bertolak dari pengertian demikian, selanjutnya Sudarto sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana ini berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Sehingga dalam konteks yang

[43] Moh. Mahfud MD, 2001. *Politik Hukum di Indonesia,* Cet. Kedua, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm 9

[44] *Ibid*

[45] Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat,* Sinar Baru, Bandung, hlm.20

demikian, Sudarto mengartikan politik hukum pidana sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[46] Sebagian kalangan lain mengatakan bahwa secara garis besar kebijakan hukum pidana menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pada kesempatan lain, secara teoritis, Sudarto membagi pengertian kebijakan hukum pidana dalam 3 (tiga) pengertian. *Pertama*, dalam pengertian sempit, kebijakan hukum pidana adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana. *Kedua*, dalam pengertian luas, kebijakan hukum pidana adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan polisi. *Ketiga*, dalam pengertian paling luas, kebijakan hukum pidana adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.[47]

Sementara itu, kebijakan hukum pidana dalam pengertian praktis adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing.[48] Melihat dari kacamata politik hukum, politik hukum pidana mengandung arti bagaimana

[46] Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm 24-25

[47] Sudarto,1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 113

[48] IS Heru Permana, 2007. *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 5

mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi *penal policy* dari Marc Ancel, yaitu sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Istilah peraturan hukum positif ini tentu saja secara jelas diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa istilah *penal policy* memiliki kesamaan pengertian dengan kebijakan atau politik hukum pidana.[49]

Pengertian kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto dan Marc Ancel di atas tak berbeda jauh dengan pandangan G. Peter Hoefnagels yang menyatakan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime* (kebikajan hukum pidana adalah usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan)[50]. Pengertian tersebut mencakup beberapa aspek yang menjadi objek kajian kebijakan hukum pidana, yaitu reaksi sosial terhadap kejahatan, pencegahan kejahatan, kebijakan menentukan perilaku manusia sebagai kejahatan (kriminalisasi). Kebijakan hukum pidana juga mengkaji kebijakan penetapan sanksi pidana bagi perbuatan yang dilarang dan penanggulangan kejahatan.

Pengertian-pengertian di atas dapat juga disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal instrument*) meliputi bidang yang luas, yaitu kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi (kebijakan legislasi/legislatif), kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan kebijakan hukum pidana pada tahap eksekusi (kebijakan ekseskutif).

[49] Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm 25

[50] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 13

Tahap formulasi dimaksudkan sebagai tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembentuk undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang direncanakan atau diprogramkan itu. Sedangkan tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum hukum mulai kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Sementara, tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Berdasarkan ketiga tahapan tersebut, kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat undang-undang pidana hendak dibuat, sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut, dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dan sanksi apa yang dianggap cocok untuk menanggulangi perbuatan yang dilarang tersebut bila ternyata di kemudian hari dilanggar.[51] Ini berarti menyangkut kriminalisasi dan penalisasi.

Kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi, dengan demikian, merupakan hal yang sangat menentukan keberadaannya, karena ia menjadi arah, pedoman atau penuntun bagi kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi tentang usaha rasional dalam penanggulangan kejahatan, hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan banyak aspek. Sebab hasilnya akan sangat mempengaruhi pada tahap

[51] M. Arief Amrullah, 2008. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Cet. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 21

kebijakan berikutnya, dengan kata lain, kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi mulai kepolisian sampai pengadilan dalam bentuk putusan hakim, akan sangat bergantung kepada sejauh mana formulasi kebijakan hukum pidana pada tahap sebelumnya. Begitu juga dengan kebijakan hukum pidana pada tahap eksekusi akan sangat bergantung pada kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi.

Peranan kebijakan formulasi yang sangat strategis dan signifikan menuntut bagi para pembuat undang-undang untuk sebisa mungkin menghindari berbagai kesalahan dan kelemahan dalam proses pembentukannya. Terjadinya kesalahan dan kelemahan akan dapat dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat pula melalui sarana yang tidak menjadikan hukum pidana sebagai instrumen, yang dikenal dengan upaya non-penal. Kalau ketiga tahap kebijakan hukum pidana sebagaimana disebutkan di atas disebut dengan upaya penal (penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana), maka upaya penanggulangan kejahatan dapat melalui sarana-sarana lain seperti pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, yang biasa disebut dengan sarana non penal. Pada konteks ini Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat mengejawantah ke dalam berbagai bentuk. *Pertama* adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal (hukum pidana) yang sering disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Bentuk pertama ini meliputi kriminalisasi dan penalisasi. *Kedua* berupa usaha-usaha pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*), dan *ketiga* adalah pendayagunaan usaha-usaha

pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosiologi hukum melalui mass media secara luas.[52]

Pendapat Barda di atas mengisyarakatkan kepada kita bahwa di dalam upaya menanggulangi kejahatan, sarana penal (hukum pidana) tidak menjadi satu-satunya sarana yang ditempuh, tapi seyogyanya juga melalui sarana yang bersifat non penal (non hukum pidana). Jadi, ada dua pendekatan di dalam menanggulangi kejahatan, yaitu dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal. Kedua pendekatan tersebut harus diletakkan dalam posisi yang sejajar, yang satu sangat bergantung pada yang lain. Pengutamaan salah satu sarana saja hanya akan menimbulkan persoalan dalam praktik penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan membutuhkan pendekatan integral, yakni melalui sarana penal dan sarana non penal.

Pandangan tentang perlunya pendekatan integral dalam menanggulangi kejahatan paralel dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang mengatakan, bahwa konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal. Usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekalil di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi social tertentu yang secara tak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.[53]

[52] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, hlm 8

[53] Barda Nawawi Arief, 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ketiga, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 33

Terkait dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, dapat diartikan bahwa kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sedangkan pengertian penanggulangan kejahatan itu menurut Mardjono Reksodiputro adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan penanggulangan kejahatan baik menggunakan sarana penal maupun sarana non penal, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penagakan hukum (*law enforcement policy*).[54] Pada konteks yang lebih luas, kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).[55] Tujuan akhir kebijakan hukum pidana berupa perlindungan masyarakat ini sering disebut dengan berbagai istilah, misalnya kebahagiaan warga masyarakat (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat, atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).[56]

B. Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan: perbuatan apa

[54] Mardjono Reksodiputro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 84

[55] Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm 27

[56] Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm 144

yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana; dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar [57].

Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan sosial atau perlindungan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan, dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan integral ini tak hanya dalam bidang hukum pidana, tapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.[58]

Pada Pelita VI disebutkan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya system hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang membangun materi hukum, aparat hukum dan sarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, sering disebut dengan masalah kriminalisasi, yaitu sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana) kemudian melalui proses kriminalisasi akhirnya dijadikan sebagai perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana), disertasi ancaman sanksi pidana[59].

[57] Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm 29

[58] *Ibid.*

[59] Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, hlm 30

Selanjutnya dikemukakan bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah cenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini menurut Bassiouni seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* dan digunakan sebagai alternative dari pendekatan dengan penilaian emosional (*the emosionally laden value judgment approach*) oleh kebanyakan badan-badan legislatif. Dikemukakan pula bahwa perkembangan dari *a policy oriented approach* ini lambat datangnya karena proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian. Permasalahan yang terjadi antara lain terletak pada sumber-sumber keuangan untuk melakukan orientasi ilmiah itu. Kelambanan yang demikian ditambah dengan proses kriminalisasi yang berlangsung terus tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap sistem, mengakibatkan timbulnya; pertama, krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*), dan kedua, krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminalization*). Yang pertama menyangkut banyaknya kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi, dan kedua mengenai usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi pidana yang efektif.[60]

Pendekatan kebijakan yang dikemukakan di atas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu kebijakan hukum pidana yang rasional tak l ain dari pada perencanaan metode-metode yang rasional. Menurut G.P Hoefnagels suatu kebijakan hukum pidana harus rasional, kalau tidak demikian, tak sesuai dengan definisinya sebagai *a rational total of the responses to crime*. Di samping itu, hal itu

[60] Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm 32-33

penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.[61]

Pendekatan rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto, dalam melaksanakan politik (kejahatan) orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti suatu kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana penal harus merupakan usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Artinya, memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulang kejahatan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi, diperlukan pula pendekatan yang fungsional, dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

Pemilihan konsepsi perlindungan masyarakat ini pun membawa konsekuensi pada pendekatan rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes, yaitu bila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat, tugas selanjutnya adalah mempertimbangkan biaya bagi penderitaan individu. Menjalankan tugas demikian, orang harus mengandalkan hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam-macam sanksi. Merujuk apa yang dikemukakan oleh J. Andenaes di atas, jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis ini tak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dalam pembuatan/pelaksanaan hukum pidana

[61] *Ibid.,* hlm 33

dengan hasil yang ingin dicapai), tapi juga dalam arti mempertimbangkan efektifitas dan sanksi pidana itu sendiri[62].

Ted Hoderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis bila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[63]

1. pidana itu sungguh-sungguh mencegah,
2. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan yang akan terjadi apabila tidak dikenakan,
3. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Segi lain yang perlu dikemukakan dan diperhatikan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana, pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilidungi. Kepentingan-kepentingan sosial yang perlu dilindungi tersebut antara lain[64]:

1. pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat;
2. perlindungan wara masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain
3. memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum pidana
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

[62] IS. Heru Permana, *Op.cit.*, hlm 29-30

[63] *Ibid*

[64] *Ibid*

Pidana hanya dibenarkan bila ada sesuatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Sebaliknya, suatu pidana tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bila tidak ada sesuatu kebutuhan bagi masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksi ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasarkan pandangan demikian, disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis, melakukan juga suatu disiplin yang berdasarkan dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value based and value oriented*). Berdasar uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgment approach*).[65]

Pada konteks penanggulangan kejahatan *illegal funding*, penggunaan hukum pidana menjadi sesuatu yang tak terelakan. Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan secara tegas mengatur sanksi pidana terkait dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat secara illegal (*illegal funding).* Illegal funding merupakan kejahatan yang dapat digolongkan kedalam white collar crime dengan obyek dana masyarakat yang beredar didalam perbankan. Seperti kita keteahui Bank mempuyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat dan negara dan merupakan salah satu pilar yang sangat penting didalam pelaksanaan demokrasi ekonomi. Bank merupakan lembaga intermediasi didalam menghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat. Sehingga perbankan sering sekali menjadi sasaran para pelaku kejahatan white collar crime. Para pelaku kejahatan perbankan jika kita amati selalu berasal dari para pelaku perbankan itu sendiri ataupun kalangan-kalangan yang mempunyai terdidik yang mempunyai keahlian dalam bisnis keuangan. Menurut Hazel Croall ada beberapa karakteristik dari bentuk

[65] *Ibid.,* hlm 31

white collar crime antara lain bersifat tidak kasat mata, memanfaatkan peraturan hukum yang samar atau tidak jelas, pendeteksiannya cukup sulit.[66] Lebih jauh Sutherland mengatakan bentuk kriminal white collar crime cenderung kejahatan dalam pelanggaran undang-undang anti monopoli, kejahatan perbankan, penipuan kompurter, penggelapan pajak dan cukai, korupsi, kolusi, penyelewengan administrasi dan sebagainya.[67] Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada kejahatan perbankan yang berbentuk penghimpunan dana ilegal (illegal Funding). Kejahatan penghimpunan dana masyarakat dapat terjadi dikarenakan para pelaku memanfaatkan kelemahan undang-undang khususnya peraturan-peraturan didalam penghimpunan dana masyarakat, sehingga banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan kerah putih untuk melakukan modus operandinya. Seperti kita ketahui bank bukan satu-satunya lembaga yang dapat menghimpun dana. Undang-undang memberikan kewenangan koperasi, asuransi untuk menghimpunan dana dengan syarat-syarat tertentu. Menurut N.H.T Siahaan modus kejahatan perbankan dibedakan dalam tiga golongan, yaitu :

1. Modus operandi yang menyangkut legalitas bank;
2. Modus operandi yang menyangkut lalu lintas giral;
3. Modus operandi yang menyangkut kredit bermasalah;

Modus oprandi yang menyangkut legalitas bank lebih menitik beratkan kejahatan bank dalam bank dan penghimpunan dana masyarakat illegal. Modus operandi di bidang lalu lintas giral dilakukan dengan menggunakan warkat-warkat bank dengan cara membuat perintah pembayaran tunai ataupun non tunai. Sedangkan modus operandi menyangkut kredit banyak dilakukan dengan memanipulasi kelengkapan persyaratan kredit dan informasi-informasi debitur.

[66] N.H.T. Siahaan, Pencucian Uang dan kejahatan Perbankan, Pustakan sinar harapan, Jakarta, 2005, hal.144
[67] ibid

Pemberian sanksi pidana dalam Undang-undang perbankan menjadi bagian dari upaya pembaruan hukum pidana dan penegakan hukum yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya menanggulangi kejahatan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal. Pembaharuan hukum pidana tersebut menurut Barda Nawawi pada hakikatnya mengandung makna sebagai suatu upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultur masyarakat Indonesia[68].

Hal yang perlu disepakati adalah pandangan kita terhadap kejahatan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal *(illegal funding)* dan secara kontekstual diterapkannya kejahatan *illegal funding* tersebut.

Kejahatan *illegal funding* tidak saja merupakan kejahatan yang mengandung motif ekonomi yang merugikan korbannya secara individu tetapi juga merugikan masyarakat luas bahkan bisa jadi merugikan ekonomi negara. Adanya kejahatan penghimpunan dana masyarakat secara melawan hukum jelas merugikan masyarakat. Oleh karenanya penggunaan hukum pidana dalam penanggulangannya menjadi suatu hal yang sangat perlu, karena bagaimanapun hukum pidana tidak saja berfungsi melindungi hak kepemilikan individual terhadap perbuatan melawan hukum tetapi juga melindungi kegiatan perekonomian dan juga sistem ekonomi suatu negara.

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut harus dimaknai secara keseluruhan dalam konteks politik kriminal yang merupakan bagian intergral dari perencanaan pembangunan nasional. Politik kriminal bertujuan memberikan perlindungan masyarakat (*social defence),* dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare),* maka dapatlah difahami bahwa fungsi hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal bertugas untuk menanggulangi kejahatan dan

[68] Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm 30

benteng terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri dalam rangka melindungi dan mengayomi masyarakat.

C. Penegakan Hukum sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan *Illegal Funding*

Permasalahan penegakan hukum akan terkait dengan ditaatinya suatu aturan hukum oleh masyarakat, sehingga harus didukung oleh sistem sanksi yang terdapat pada suatu aturan hukum tersebut. Ini berarti bahwa dalam penegakan hukum akan selalu terkait dengan sistem sanksi. Sanksi di sini dirumuskan dalam undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislator*) baik yang berbentuk sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif. Suatu undang-undang dapat memuat lebih dari satu sistem sanksi. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 di samping memuat sanksi pidana juga mengatur sanksi administratif.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yakni untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[69]. Menurut Wayn La Favre, sebagaimana dikutip Soekanto, bahwa sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi[70].

Soerjono Soekanto juga menjelaskan tentang beberapa faktor yang turut berpengaruh terhadap masalah penegakan hukum yakni: *pertama,* faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang; *kedua,* faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk

[69] Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali, Jakarta, hlm.2

[70] *Ibid*, hlm.4

maupun menerapkan hukum; *ketiga,* faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; *keempat,* faktor masyarakat, yaitu lingkungan hukum di mana hukum tersebut diterapkan dan; *kelima,* faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup[71].

Kelima faktor tersebut merupakan faktor- faktor yang saling terkait satu sama lain dan merupakan esensi dari penegakan hukum serta dapat dijadikan salah satu indicator efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Sebagai sebuah proses, penegakan hukum akan terkait pula dengan fungsi dan tujuan hukum itu dibuat. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa hukum menjalani suatu proses panjang dan melibatkan berbagai aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda yang garis besar aktifitasnya diawali dengan proses atau tahap pembuatan hukum/ undang-undang[72].

Menurut Montesquieu sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo[73], gagasan pembuatan hukum yang baik harus memenuhi beberapa hal berikut: *pertama,* gaya bahasa hendaknya padat dan sederhana, kalimat-kalimat muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan. *Kedua,* istilah-istilah yang dipilih hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relative sehingga mempersempit kemungkinan adanya perbedaan pendapat.

Ketiga, hendaknya membatasi diri hal-hal yang actual menghindari penggunaan perumpamaan yang bersifat hipotetis. *Keempat,* hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan, jangan membenamkan orang itu ke dalam persoalan logika tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan. *Kelima,* janganlan

[71] *Ibid*, hlm.4-5

[72] Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.175-176

[73] *Ibid*, hlm.180

masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan perkecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan.

Keenam, jangan berupa penalaran (argumentatif); berbahaya sekali memberikan ulasan yang rinci tentang masalah yang diatur, sebab hal itu hanya akan membuka pintu perdebatan. *Ketujuh,* di atas semua itu isi hendaknya dipikirkan dengan masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pengertian serta rasa keadilan dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami, sebab hukum yang lemah tidak bermanfaat dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Pada intinya pembuatan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, terperinci mengatur dan memberikan sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya serta terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang hal tersebut akan bisa dilihat pada proses penegakan hukumnya di lapangan, yakni pelaksanaan aturan hukum yang telah dibuat tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara konkrit. Aspek penegakan hukum inilah yang menurut pandangan Sudarto secara fungsional merupakan suatu sistem aksi[74].

Pada konteks penegakan hukum pidana, banyak elemen negara yang terlibat dalam proses penegakan hukum seperti kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, advokat atau dalam konteks tindak pidana khusus terdapat penyidik PNS, KPK serta lainnya maupun dalam hal pelaksanaan pemidanaannya seperti lembaga pemasyarakatan yang kesemuanya memiliki peranan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Menurut Sudarto, ada tiga persoalan terkait dengan penegakan hukum yakni: masalah tindakan pencegahan (*prevention*), masalah tindakan represif (*repressive),* dan masalah tindakan kuratif (*curative).*

[74] Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, hlm.112

Tindakan preventif (*prevention)*, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Politik kriminal dalam arti sempit itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Sementara dalam arti lebih luas, politik kriminil merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminil merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan. Kegiatan dari pihak kepolisian yang bersifat misalnya mengadakan patroli secara kontinyu.

Tindakan represif (*repressive)*, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Tindakan represif meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminil sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

Tindakan kuratif (*currative)*, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparatur eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari BAPAS. Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terhukum pidana pencabutan kemerdekaan.

Berbagai permasalahan penegakan hukum diatas dikaitkan dengan penegakan hukum dalam hal terjadi kejahatan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal atau melawan hukum, maka kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat mencakup pembuatan undang-undang khusus, atau menyempurnakan ketentuan perundang-undangan yang telah ada, tersedianya sumberdaya penegak hukum yang professional, pengetatan perijinan dan pengawasan atas berbagai kegiatan penghimpunan dana yang menyimpang oleh stakeholder terkait seperti Bank Indonesia, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN FORMULASI DAN IMPLEMENTASI SAKSI PIDANA DALAM *ILLEGAL FUNDING*

A. Implementasi saksi pidana dalam kejahatan *Illegal Funding*

Istilah *Illegal funding* sering diterjemahkan dengan penghimpunan dana, yang menurut Malayu Hasibuan adalah dana yang dikumpulkan suatu bank yang berasal dari sumber internal, yaitu modal (dana) sendiri dan sumber eksternal yaitu modal (dana) asing atau dana pihak ketiga (DPK)[75]. Sementara Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian penghimpunan dana sebagai suatu kegiatan usaha mencari dan mengumpulkan dana dari masyarakat luas dengan menggunakan strategi tertentu, sehingga masyarakat mau menanamkan dananya[76].

Pada lembaga keuangan perbankan penanaman dana ini berupa simpanan yang menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan dimaknai sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *funding* adalah setiap kegiatan usaha untuk mencari dan mengumpulkan dana dari masyarakat berupa simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

---

[75] Malayu Hasibuan. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm 145

[76] Abdulkadir Muhammad dan Ridla Murniati, 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.48

Indonesia dalam konteks ini, telah memiliki peraturan hukum tentang penghimpunan dana baik yang bersifat konvensional maupun yang menggunakan prinsip syariah. Setiap penghimpunan dana harus memenuhi perijinan yang ada sesuai model dan jenis penghimpunan dananya. Jika penghimpunan dana tersebut berupa investasi reksadana maka sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal harus memiliki ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang fungsinya diambil alih Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika penghimpunan dana tersebut berupa pengumpulan premi yakni perasuransian maka sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian harus memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), demikian pula dengan penghimpunan dana berupa sentra dana perdagangan berjangka sebagaimana Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perasuransian harus memiliki ijin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Penghimpunan dana yang berbentuk bank sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan harus memiliki ijin dari Bank Indonesia, termasuk dalam konteks penghimpunan dana-dana sosial seperti zakat harus memiliki ijin dari kementerian yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang penghimpunan dana tersebut diatas, perijinan menjadi dasar utama aspek legalitas dari suatu kegiatan penghimpunan dana (*funding)* baik yang berpola konvensional maupun syariah. Tanpa adanya ijin maka sudah barang tentu suatu kegiatan penghimpunan dana (*funding)* dapat dikatakan illegal atau disebut *illegal funding*. Apabila suatu kegiatan *illegal funding* tersebut ternyata menyebabkan dampak kerugian bagi masyarakat maka dapat dikatakan kegiatan

penghimpunan dana ilegal tersebut sebagai sebuah tindak kejahatan (*criminal act*) atau tindak pidana (*delict).*

Encyclopedia Amerika (volume 8) mengemukakan bahwa kejahatan atau *crime* adalah perbuatan yang secara hukum dilarang oleh negara, sedangkan dilihat dari segi hukum (*legal definition*) kejahatan adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana[77]. Menurut Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan kejahatan (*rechtsdelicten)* adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya itu, perbuatan yang demikian sudah patut dilarang dan diancam oleh hukuman, sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam oleh undang-undang[78]. Sementara Bambang Purnomo mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan dalam keinsyafan batin manusia yang dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil, dan di samping itu juga sebagai perbuatan yang tidak adil menurut undang-undang, namun andaipun belum dilarang oleh undang-undang tetapi oleh masyarakat dirasakan sebagai suatu perbuatanya

Indonesia dalam konteks ini, telah memiliki peraturan hukum tentang penghimpunan dana baik yang bersifat konvensional maupun yang menggunakan prinsip syariah. Setiap penghimpunan dana harus memenuhi perijinan yang ada sesuai model dan jenis penghimpunan dananya. Jika penghimpunan dana tersebut berupa investasi reksadana maka sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal harus memiliki ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang fungsinya diambil alih Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika penghimpunan dana tersebut berupa pengumpulan premi yakni perasuransian maka sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian harus memiliki ijin dari Otoritas

[77] Arief Amrullah, 2006. *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, hlm.7

[78] Satochid Kartanegara, tt. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah,* Balai Lektur Mahasiswa, Yogyakarta, hlm. 109

Jasa Keuangan (OJK), demikian pula dengan penghimpunan dana berupa sentra dana perdagangan berjangka sebagaimana Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perasuransian harus memiliki ijin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Penghimpunan dana yang berbentuk bank sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan harus memiliki ijin dari Bank Indonesia, termasuk dalam konteks penghimpunan dana-dana sosial seperti zakat harus memiliki ijin dari kementerian yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang penghimpunan dana tersebut diatas, perijinan menjadi dasar utama aspek legalitas dari suatu kegiatan penghimpunan dana (*funding)* baik yang berpola konvensional maupun syariah. Tanpa adanya ijin maka sudah barang tentu suatu kegiatan penghimpunan dana (*funding)* dapat dikatakan illegal atau disebut *illegal funding*. Apabila suatu kegiatan *illegal funding* tersebut ternyata menyebabkan dampak kerugian bagi masyarakat maka dapat dikatakan kegiatan penghimpunan dana ilegal tersebut sebagai sebuah tindak kejahatan (*criminal act*) atau tindak pidana (*delict).*

Pendapat Barda Nawawi tersebut merujuk pada argumentasi yang dikemukan oleh G.P Hoefnagels yang menyatakan bahwa pidana tidak hanya dibatasi oleh efektifitas dan kemanfaatan tetapi terutama dibatasi oleh legalitas. Efektifitas pemidanaan bukan jaminan untuk terwujudnya suatu keadilan yang diinginkan[79].

Sementara H.L.Packer berpandangan bahwa kebijakan formulasi merupakan isu penting bagi kebijakan pemidanaan (*sentencing policy).* Menurutnya ada tiga masalah

[79] *Ibid.*

kontroversial saat ini yakni masalah *strict liability*, *sentencing policy* dan *insanity defence*[80].

Berbagai pandangan dari para ahli di atas menunjukkan bahwa kebijakan formulasi memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam proses operasionalisasi sanksi pidana, selain menjadi landasan bagi tahap-tahap selanjutnya serta menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Namun demikian hal yang terpenting dari kebijakan formulasi ini adalah sejauhmana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penanggulangan kejahatan.

Pengkajian terhadap kebijakan formulasi sebagai upaya menanggulangi kejahatan *illegal funding* sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan secara bersamaan akan dibicarakan tentang; *pertama,* kebijakan menetapkan perbuatan yang dapat dipidana (*kebijakan kriminalisasi)*. *Kedua*, kebijakan pengaturan sanksi, dan *ketiga,* kebijakan pertanggungjawaban pidananya.

1. Kebijakan Kriminalisasi Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

   Kriminalisasi dimaknai sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Dekriminalisasi adalah sebaliknya[81]. Menurut Muladi, dalam perkembangan selanjutnya kriminalisasi dapat diartikan pula sebagai mengaktualisasikan peraturan hukum pidana agar lebih efektif. Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memperluas berlakunya hukum pidana.[82]

[80] H.L.Packer, 1969. *The Limits of Criminal Sanction,* Stanford University Press, California, hlm.13-15.

[81] Muladi, 2002. *Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia,* the Habibie Center, Jakarta, hlm.255.

[82] *Ibid.*

Kriminalisasi suatu perbuatan lazimnya dilakukan melalui suatu proses yang diawali dengan penetapan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau yang dipersamakan dengan orang, yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi, proses ini, diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu di ancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana[83].

Menurut Sudarto, upaya kriminalisasi minimal harus mampu menjawab dua pertanyaan yakni: *pertama,* apakah yang menjadi ukuran pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana?, dan *kedua,* apakah kriterianya bagi pembentuk undang-undan untuk menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang satu lebih tinggi daripada ancaman pidana terhadap tindak pidana yang lain?[84].

Sementara itu menurut Muladi, suatu kriminaliasi harus berpedoman pada:

a. kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan "overkriminalisasi" yang masuk kategori *"the misuse of criminal sanction"*
b. kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc;*
c. kriminalisasi harus mengandung unsur korban *(victimizing)* baik aktual maupun potensial;
d. kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium;*
e. kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *"enforceable";*
f. kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik*;*
g. kriminalisasi harus mengandung unsur *"subsosialiteit"*(mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali);

[83] Sudarto, 1997. *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, hlm.32.

[84] *Ibid.*

h. kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu[85].

Diskursus tentang kebijakan kriminalisasi terhadap kejahatan penghimpunan dana ilegal dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dapat dikatakan sebagai bagian dari kejahatan di bidang perbankan, karena memang formulasi kriminalisasinya termuat dalam Undang-undang Perbankan, namun demikian kejahatan ini tidak terbatas pada kerangka perbankan saja, akan tetapi memiliki cakupan perbuatan yang lebih luas.

Muhammad Djumhana[86] membagi jenis kejahatan di bidang perbankan konvensional sebagai berikut: *pertama,* penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan. Kecurangan dapat dilakukan dalam bentuk pemalsuan, penipuan atau pemberian keterangan yang tidak benar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian materiil di pihak lain. Adapun pola tindakan yang sering dilakukan dalam tindakan kecurangan, penipuan perkreditan, di antaranya yakni mengajukan kredit dengan agunan yang tidak benar, nilai agunan di bawah nilai kredit, penyalahgunaan tujuan kredit.

Kedua, penggelapan dana-dana masyarakat, biasanya dengan membawa kabur dana masyarakat oleh pemilik usaha. *Ketiga,* penyelewengan/penyalahgunaan dana-dana masyarakat. *Keempat*, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan

[85] Muladi, *Op.cit,* hlm.256

[86] Muhammad Djumhana, 1996. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Citra Aditya, Bandung, hlm.37-42

keuangan/perbankan. Jenis pelanggaran terhadap peraturan keuangan/perbankan yakni pelanggaran yang berhubungan dengan perijinan.

Sementara Marulak Pardede[87], membagi 3 (tiga) jenis perbuatan yakni: *pertama*, tindak pidana di bidang perijinan/legalitas bank yang menyangkut kegiatan bank tanpa ijin, yang dalam prakteknya dapat berbentuk:

a. menjalankan usaha bank dalam bank;
b. menjalankan usaha bank tanpa ijin;
c. menjalankan usaha serupa bank

Kedua, tindak pidana di bidang perkreditan bank, yang dapat digolongkan:

a. pemalsuan dokumen yang dipakai sebagai jaminan kredit;
b. barang yang sama dijaminkan berkali-kali dengan atau tanpa sepengetahuan kreditur terdahulu;
c. mendapatkan kredit berkali-kali untuk proyek yang sama;
d. mendapatkan kredit dengan jaminan fiktif;
e. mendapatkan kredit untuk proyek fiktif;
f. masalah *down payment*;
g. melakukan penyimpangan dari BMPK

Ketiga, tindak pidana di bidang lalu lintas giral, bentuk tindak pidana yang mengarah pada penipuan. Pada umumnya yang menjadi korban bukan saja bank, tetapi nasabah baik perorangan atau badan hukum swasta/pemerintah).

Mencermati penggolangan di atas, jika dikaitkan dengan kejahatan *illegal funding*, maka penghimpunan dana ilegal berpola syariah dapat dimasukkan dalam kategori kejahatan di bidang perbankan dengan jenis kejahatan yang terkait dengan perijinan/legalitas, baik dalam bentuk menjalankan usaha perbankan tanpa ijin dari

[87] Marulak Pardede, 1995. *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.50-53

otoritas yang berwenang dalam hal ini adalah Bank Indonesia, yakni menjalankan usaha seperti layaknya bank tetapi tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia, maupun dalam bentuk menjalankan usaha serupa bank, yakni menjalankan usaha dengan cara menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, tetapi bukan bank.

Namun demikian, jika dicermati lebih dalam terkait dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan maka kejahatan *illegal funding* tidak terbatas pada jenis kejahatan dalam bentuk usaha-usaha bank atau serupa bank, melainkan lebih luas, mencakup setiap kegiatan usaha baik berbentuk bank atau lainnya di mana kegiatan tersebut berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat luas baik dalam bentuk simpanan ataupun investasi. Sehingga jika didetailkan melalui perumusan unsur yang ada dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Subyek deliknya adalah barangsiapa (*naturalijkpersoon)* dan badan hukum (*rechtpersoon),* baik mereka yang menyuruh, atau mereka yang memimpin maupun mereka yang melakukan bersama perbuatan pidana tersebut.
b. Perbuatan pidananya adalah melakukan usaha berupa:
    1) Bank Umum
    2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
    3) Kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang tidak memiliki ijin usaha dari Bank Indonesia.

c. Sanksi pidananya adalah pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan pidana denda minimal 10 milyar rupiah maksimal 200 milyar rupiah

Selain mendasarkan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kejahatan penghimpunan dana ilegal berpola syariah tersebut dapat dijerat melalui beberapa Undang-undang antara lain:

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana tertera dalam Pasal 372 tentang penggelapan dan atau Pasal 378 tentang penipuan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

   Pasal 372:

   "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

   Pasal 378:

   "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

b. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122 sebagaimana tertera dalam Pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut:

   Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena

tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dasar Pertimbangan Suatu Perbuatan Dijadikan Kejahatan *Illegal Funding*

Dilihat dari dasar pertimbangan suatu perbuatan dijadikan kejahatan *illegal funding* tidak ada suatu konsiderasi khusus, namun demikian hal ini dapat dirujukan pada konsiderasi di mana aturan kriminalisasi *illegal funding* tersebut ditemukan yakni dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tersebut ditemukan suatu konsiderasi sebagai berikut:

a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk Perbankan;
c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dipandang perlu mengubah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Perbankan dengan undang-undang.

Mencermati pertimbangan di atas, memang secara eksplisit tidak ditemukan rumusan tentang alasan pentingnya pemidanaan terhadap perbuatan tertentu yang melanggar undang-undang ini, terutama tentang penghimpunan dana masyarakat (*funding)*. Namun demikian, secara prinsip dapat dikemukan bahwa dasar pertimbangan sebagaimana tercantum dalam undang-undang di atas menunjukkan sebagai langkah prevensi umum terhadap potensi terjadinya hal-hal yang dapat mengancam stabilitas sistem perekonomian nasional serta prevensi terhadap bentuk-bentuk kegiatan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan .

Menurut teori prevensi umum (*generale preventive)*, tujuan pokok pidana adalah melakukan pencegahan yang ditujukan kepada semua orang agar tidak terjadi pelanggaran atau perbuatan yang dapat menyebabkan terganggunya ketertiban masyarakat.[88] Pada tataran praktis legislasi, alasan prevensi umum inilah yang sering digunakan sebagai pertimbangan utama oleh perumus undang-undang apabila di dalamnya memuat ketentuan pidana[89]. Menurut Barda Nawawi Arief, adanya alasan pencegahan umum dalam konsiderasi suatu undang-undang lebih disandarkan pada dasar penilaian kita yang paling baik (*the basis of our best judgment)*, sehingga pertimbangan dalam undang-undang tersebut tidak memerlukan dukungan data empiris. Menurutnya hal ini juga telah disepakati dalam Simposium Hukum Pidana Nasional tahun 1980 di Semarang bahwa salah satu kriteria kriminalisasi adalah bahwa

[88] Bambang Poernomo, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana,*Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.29

[89] Barda Nawawi Arief, 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Pidana Penjara,* CV.Ananta, hlm.81

perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan dan mendatangkan korban[90]. Faktor terjadinya perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat baik yang merugikan atau yang mendatangkan korban lebih disebabkan oleh perubahan nilai yang ada di masyarakat. Perubahan nilai inilah yang kemudian menyebabkan sejumlah perbuatan yang pada awalnya bukan merupakan perbuatan tercela dan tidak diberikan sanksi pidana berubah menjadi perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela sehingga perlu diberikan sanksi pidana[91].

Menurut Salman Luthan, kriminalisasi bersifat kompleks. Kompleksitasnya berhubungan dengan perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat, baik karena pengaruh latar belakang agama dan budaya, maupun karena pengaruh latar belakang pendidikan dan kelas sosial dalam masyarakat. Perbedaan nilai dan norma mempengaruhi penilaian terhadap perbuatan apa yang patut dikriminalisasi dan berpegaruh juga terhadap penilaian atas gradasi keseriusan perbuatan yang akan dikriminalisasikan[92].

Kriminalisasi tidak hanya memerlukan alasan dan dasar pertimbangan yang rasional mengapa suatu perbuatan itu dilarang dan diancam pidana, tetapi perlu juga diberikan ukuran atau batasan perbuatan yang mana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela atau yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, tetapi juga memerlukan pegangan dasar atau prinsip-prinsip dasar yang menjadi asas bagi proses kriminalisasi perbuatan tersebut.

---

[90] *Ibid*, hlm.82

[91] Rusli Effendi, 1986. *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Bandung, hlm.65

[92] Salman Luthan, 2009. *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum No.1 Vol.16 Januari 2009. FH-UII, Yogyakarta, hlm.3

Paling tidak ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni: (1) asas legalitas; (2) asas subsidiaritas, dan (3) asas persamaan/kesamaan.

a. Asas legalitas yaitu, asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan *nullum delictu, nulla poena sine praevia lege poenali* yang dikemukakan oleh von Feurbach. Ungkapan itu mengandung pengertian bahwa "tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan". Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.

   J.E. Sahetapy mengungkapkan bahwa asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu: (i) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (ii) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (iii) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (iv) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat lex certa); (v) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (vi) tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang; dan (vii) penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang[93].

   Menurut Salman Luthan[94], dalam doktrin hukum pidana ada enam macam fungsi asas legalitas. *Pertama*, pada hakikatnya, asas legalitas dirancang untuk memberi maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya. *Kedua*, menurut aliran klasik, asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam aliran modern asas legalitas merupakan instrumen

[93] J.E. Sahetapy (Ed.), 1996. *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 6-7

[94] Salman Luthan, *Opcit*, hlm.6-8

untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat. *Ketiga*, fungsi asas legalitas adalah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara (penguasa). Hal ini adalah tafsiran tradisional yang telah mengenyampingkan arti asas legalitas sepenuhnya seperti dimaksudkan oleh ahli-ahli hukum pidana pada abad ke XVIII (delapan belas).

Keempat, asas legalitas dikaitkan dengan peradilan pidana, mengharapkan lebih banyak lagi daripada hanya akan melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah. Asas legalitas itu diharapkan memainkan peranan yang lebih positif, yaitu harus menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi. *Kelima*, tujuan utama asas legalitas adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu. Fungsi pengawasan ini juga merupakan fungsi asas kesamaan, asas subsidiaritas, asas proporsionalitas, dan asas publisitas. *Keenam*, asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang disertai dengan ancaman pidana tertentu. Adanya penetapan perbuatan terlarang itu berarti ada kepastian (pedoman) dalam bertingkah laku bagi masyarakat.

Berdasarkan enam fungsi asas legalitas tersebut, fungsi asas legalitas yang paling relevan dalam konteks kriminalisasi adalah fungsi kedua yang berkenaan dengan fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana, dan fungsi ketiga yang berkaitan dengan fungsi mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara. Fungsi asas legalitas untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak

pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas. Keberadaan hukum pidana harus dibatasi karena hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling keras dengan sanksi yang sangat berat, termasuk sanksi pidana mati. Hukum pidana digunakan hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang sangat vital bagi kehidupan bersama. Perbuatan-perbuatan yang perlu dikriminalisasi adalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat. Fungsi mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara juga harus menjadi fokus perhatian hukum pidana. Hukum pidana harus dapat menjamin hak-hak dasar setiap warganegara, dan pembatasan terhadap hak-hak dasar warga negara melalui instrumen hukum pidana sematamata dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar bagi semua warga negara. Fungsi asas legalitas untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas[95].

b. Asas Subsidiaritas, yakni hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas.

Roeslan Saleh[96] menjelaskan bahwa penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Pokok permasalahan yang perlu diteliti adalah apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum pidana itu tidak dapat dicapai juga dengan menggunakan cara-cara lain yang lebih

[95] *Ibid.*

[96] Roeslan Saleh, 1981. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif,* Aksara Baru, Jakarta, hlm.61

kecil ongkos sosial dan individualnya? Hal ini menghendaki agar kita mengetahui tentang akibat-akibat dari penggunaan hukum pidana itu, dan dapat menjamin bahwa campur tangan hukum pidana itu memang sangat berguna.

Fakta yang terjadi dalam praktek perundang-undangan adalah adanya keyakinan kuat di kalangan pembentuk undang-undang bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang yang disertai dengan ancaman pidana berat mempunyai pengaruh otomatis terhadap perilaku anggota masyarakat.

Latar belakang semakin perlunya menggunakan asas subsidiaritas dalam penentuan perbuatan terlarang, menurut Roeslan Saleh didorong oleh dua faktor. *Pertama*, penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. *Kedua*, praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya "*overcriminalisasi*" dan "overpenalisasi" sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Di samping itu, overkriminalisasi dan overpenalisasi semakin memperberat beban kerja aparatur hukum dalam proses peradilan pidana. Akibat selanjutnya, hukum pidana tidak dapat berfungsi dengan baik dan karenanya pula kehilangan wibawa[97].

c. Asas persamaan/kesamaan. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.

Menurut Servan dan Letrossne sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh[98], asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asas

[97] *Ibid*, hlm.48

[98] *Ibid*, hlm.36-37

kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat[99].

Asas-asas kriminalisasi tersebut ini menurut Salman Luthan merupakan asas-asas yang bersifat kritis normatif. Dikatakan kritis, oleh karena dia dikemukakan sebagai ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan normatif oleh karena dia mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana[100].

Konteks kriminalisasi terhadap kejahatan penghimpunan dana ilegal yang termaktub dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sudah seharusnya tidak terlepas dari asas-asas yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kriminalisasinya, sehingga dalam praktiknya akan mampu mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa.

3. Kebijakan Penggunaan Sanksi terhadap Kejahatan *Illegal funding*.

Merujuk pada Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)..

Konten dari pasal ini menunjukkan bahwa terdapat dua jenis sanksi pidana yang digunakan dalam upaya menanggulangi kejahatan *illegal funding* yakni pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus.

[99] *Ibid*, hlm.38-39

[100] Salman Luthan, *Opcit*, hlm.10

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada KUHP. Pada Pasal 10 KUHP dinyatakan bahwa ada dua jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan. Sementara pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan. KUHP juga tidak mengenal ketentuan pidana minimum khusus dan maksimum khusus, KUHP hanya mengenal kententuan minimum umum dan maksimum umum.

Adanya ketentuan minimum khusus ini merupakan bagian dari proses kriminalisasi sebagai upaya untuk mengefektifkan pengaruh prevensi umum yakni pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan yang memiliki potensi membahayakan, merugikan atau meresahkan masyarakat luas. Kejahatan *illegal funding* merupakan kejahatan yang tidak saja merugikan dan membahayakan tetapi juga meresahkan masyarakat dan mengancam perekonomian suatu negara jika dilakukan secara masif.

4. Sistem Pertanggungjawaban Pidana pada Kejahatan *Illegal funding***.**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia terutama jika mengacu pada KUHP pada dasarnya hanya mengakui bahwa manusialah yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Menurut Vos sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo[101], bahwa yang dapat menjadi subyek delik pada umumnya adalah manusia (een natuurlijk person). Hal ini didasarkan pada alasan bahwa *pertama*, terdapatnya rumusan yang dimulai dengan ‘hij die’ di dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya, yang berarti tidak lain adalah manusia. *Kedua*, jenis-jenis pidana pokoknya hanya dapat dijalankan tidak lain daripada manusia dan *ketiga*, di dalam hukum pidana berlaku asas kesalahan bagi seorang manusia pribadi.

[101] Bambang Poernomo, *Loc cit*, hlm.93

Menurut Bambang Poernomo, selain manusia, memang dimungkinkan terutama di luar KUHP pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada badan hukum (*rechtspersoon)* akan tetapi dalam bentuk sanksi tindakan. Menurutnya, ketentuan dalam Pasal 59 dan 169 KUHP seolah telah memperdayakan pendapat yang menentukan bahwa badan hukum (perkumpulan) sebagai subyek yang dapat dikenai pidana, akan tetapi kesan yang demikian, menurutnya, ternyata tertuju kepada manusianya yang ikut perkumpulan yang dimaksudkan untuk dipidana[102].

Hal demikian juga terlihat dalam perumusan Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyuratkan pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan penghimpunan dana masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah tidak saja ditujukan kepada orang perorang (*natuurlijk person),* tetapi juga badan hukum (*rechtpersoon, legal entity).* Namun demikian dalam konteks pertanggungjawaban pidana oleh badan hukum dalam kejahatan ini mengandung perdebatan pendapat tentang apakah sesungguhnya badan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 ayat (2) di atas benar-benar dapat dijadikan subyek delik atau hanya ditujukan kepada mereka yang memiliki otoritas terhadap badan hukum tersebut.

Menurut beberapa ahli hukum terutama di bidang hukum dagang dan perdata, badan hukum (*rechtpersoon*) merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban[103].

[102] *Ibid*

[103] Chidir Ali, 1975. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.20

E.M. Meijers mengatakan bahwa badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Logemann menyebutkan bahwa badan hukum adalah personifikasi yaitu suatu perwujudan atau penjelasan hak-kewajiban. Sementara E.Utrecht berpendapat bahwa badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa/berwenang menjadi pendukung hak atau badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa. Menurut Bothingk, badan hukum hanyalah suatu gambar yuridis tentang identitas bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan. Menurut R. Rochmat Soemitro, badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak dan kewajiban seperti orang pribadi. Sementara Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai suatu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.[104]

Jika dilihat secara seksama dengan memperhatikan pengertian badan hukum di atas, maka bisa jadi badan hukum yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan di atas lebih dalam konteks hukum perdata. Menurut Rudhy Prasetya bahwa pembentukan hukum dengan undang-undang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *pertama,* badan hukum yang diinyatakan secara tegas oleh undang-undang bahwa, suatu badan adalah badan hukum dan *kedua*, dengan melihat karakteristik yang diberikan oleh undang-undang atas suatu badan hukum[105].Berdasarkan hal

[104] Man .S. Sastrawidjaja, 2005. *Bunga Rampai Hukum Dagang,* Alumni, Bandung,hlm.128-129

[105] Rudhy Prasetya, 1993. *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.19-20

tersebut badan hukum yang dinyatakan secara tegas oleh undang-undang di antaranya saat ini adalah Koperasi[106], Yayasan[107] maupun Perseroan Terbatas (PT)[108].

Oleh karenanya jika dicermati lebih seksama, maka sesungguhnya korporasi dalam Pasal 46 ayat (2) di atas tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau dapat dikatakan korporasi tidak dalam konteks menjadi subyek delik sehingga penuntutannya tidak dapat ditujukan pada badan hukum tersebut. Rumusan Pasal 46 ayat (2) menyuratkan bahwa bukan badan hukum atau korporasinya yang dilakukan penuntutan pidana melainkan terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan sebagaimana terumus dalam Pasal 46 ayat (1) dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 46 ayat (1).

Jika ini dihubungkan dengan konsep yang ada dalam KUHP, maka klausula dalam Pasal 59 ayat (2) ini masuk dalam kategori penyertaan atau *deelneming (co defendant)* sebagaimana terumus dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yakni pidana yang dijatuhkan kepada orang yeng menyuruh melakukan (*doen plegen*) sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, orang yang turut melakukan (*medeplegen)* dalam arti bersama-sama melakukan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan orang yang membantu melakukan (*medeplichtige)* sebagaimana Pasal 56 KUHP.

Pengakuan terhadap badan hukum atau korporasi dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ini berbeda dengan penetapan yang ada pada undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

[106] Lihat Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

[107] Lihat Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

[108] Lihat Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Dua undang-undang tersebut mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sehingga cakupan subyek deliknya lebih luas dibandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam undang-undang perbankan.

Meskipun sebenarnya, subyek delik dalam perumusan Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan kesemuanya merujuk pada subyek delik orang, akan tetapi berdasarkan doktrin *vicarious liability* yang merupakan adopsi dari doktrin *respondeat superior* dalam hukum perdata, maka dapat juga dikatakan bahwa badan hukum dapat dijadikan subyek delik, akan tetapi bersifat terbatas[109], dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: *pertama,* adanya ijin (*consent)* atau persetujuan (*approve)* dari atasan terhadap perbuatan itu. Persetujuan tersebut dalam kerangka otoritas yang melekat padanya, selain itu perbuatan yang dilakukan bawahan itu, sebagai pelaksanaan pekerjaan yang ditugskan atasan kepadanya.

Kedua, atasan ikut berpatisipasi (*participate)* atas perbuatan yang dilakukan bawahan. Atasan dianggap ikut berpartisipasi dalam tindakan pidana yang dilakukan bawahannya, apabila terpenuhi unsur 'turut serta' (*deelneming)* melakukan perbuatan atau *take part in crime* yang digariskan Pasal 55 dan 56 KUHP. Bisa dalam posisi orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger),* 'bersama-sama melakukan' (*medepleger)* atau 'membantu' melakukan (*medepletigheid).*

Ketiga, bawahan melakukan perbuatan atas 'perintah' (*command)* atasan. Bentuk ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut ketentuan ini,

[109] M. Yahya Harahap, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm.138

orang yang ‘menyuruh’ melakukan tindak pidana (*doen pleger)* ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan orang yang disuruh. Dalam hal ini, meskipun atasan bukan melakukan sendiri perbuatan pidana, dan yang melakukan adalah bawahan, maka atasan dipandang sebagai pelaku dan dihukum sebagai pelaku.

Keempat, berdasar ‘pendelegasian’. Tindak pidana yang dilakukan bawahan, bertitik tolak dari ‘pendelegasian’ (*delegation)* dari atasan, sehingga dalam hal ini atasan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahan, apabila perbuatan itu dalam kerangka pendelegasian[110].

B. Implementasi sanksi pidana dalam KUHP dan diluar KUHP

Aplikasi hukum pidana merupakan tahapan dari sekian mekanisme penanggulangan kejahatan, mekanisme lainnya yang tak kalah penting adalah pada tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, yang kemudian terangkai menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai tujuan pemidanaan itu sendiri yakni melindungi masyarakat dari kejahatan[111].

Untuk mewujudkan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah hal mudah dalam praktiknya. Menurut Muladi, praktik yang ada dilapangan dengan melihat putusan hakim, kebanyakan masih mengacu pada pandangan yang bersifat yuridis sistematis dalam putusannya yakni bahwa hakim masih selalu mereduksi fakta dengan hanya memperhatikan faktor- faktor yuridis saja dan kurang memberi atensi terhadap faktor-faktor yang menyangkut terdakwa[112].

---

[110] *Ibid,* hlm.139-142

[111] Bambang Poernomo, *Loc cit,* hlm.23-25

[112] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, hlm.115-116

Sistem peradilan pidana yang dijalankan di Indonesia merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system)*, yang dilandasi dengan prinsip 'diferensiasi fungsional' di antara aparat penegak hokum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing[113]. Menurut Yahya Harahap, pelaksanaan *criminal justice system* yang ada tersebut merupakan 'fungsi gabungan' (*collection of function)* dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan penjara serta badan terkait, yang memiliki tujuan pokok untuk menegakkan, melaksanakan dan memutuskan hukum pidana. Oleh karenanya kegiatan sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan dengan 4 (empat) fungsi utama yakni fungsi pembuatan undang-undang (*law making function),* fungsi penegakan hukum (*law enforcement function),* fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan (*function of adjudication)* dan fungsi memeperbaiki terpidana (*the function of correction)*[114].

Dalam usaha memperkuat prinsip diatas maka salah satu hal yang harus dipahami dan dimengerti baik oleh para penegak hukum, praktisi hukum maupun masyarakat adalah sistem peradilan, dalam hal ini sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa sistem peradilan pidana mempunyai empat komponen (empat sub-sistem), ditambah satu sub-sistem berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga menjadi 5 (lima) sub-sistem. Menurut Rusli Muhamad sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan yang secara keseluruhan dan merupakan(totalitas) berusaha mentranformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau

[113] M. Yahya Harahap, 2010. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan,* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

[114] *Ibid*, hlm.90-91

mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat[115]. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa sistem peradilan pidana mempunyai empat komponen (empat sub-sistem), ditambah satu sub-sistem berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga menjadi 5 (lima) sub-sistem Adapun sub sistem tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sub sistem kepolisian (Polri)

   Subsistem kepolisian dalam hal ini POLRI yang merupakan lembaga yang dipimpin oleh Kapolri dan berada di bawah Presiden. Polisi sebagai instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mempunyai tugas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 undang-undang yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu passal 15 ayat 1 Kepolisian Republik Indonesia mempunyai wewenang, yaitu :

   1. menerima laporan dan/atau pengaduan,
   2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
   3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, seperti ; pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat

[115] Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Dilengkapi dengan 4 Undang-undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana, UII Press, Yogyakarta,2011, hal 14

dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, pengisapan/praktek lintah darat, dan pemungutan liar.

4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian,
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan,
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
8. mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang,
9. mencari keterangan dan barang bukti
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional,
11. mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Barang temuan yang dimaksud adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota kepolisian atau masyarakat yang diserahkan kepada kepolisian, dan
14. wewenang lainnya yang ditentukan oleh undang-undang ini (Pasal 15 ayat (2)).

Disamping kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, polisi juga mempunyai wewenang dan dinyatakan sebagai tercantum didalam :

1. Pasal 4 :Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Pasal 6 : Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan
3. Polisi diharuskan membuat Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 75),

Kewenangan dalam KUHAP ini diberikan adalah dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sebagai penegak hukum. Menurut Pasal 1 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sementara penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang[116]. Suatu penyidikan harus didalahulua dengan pemberitahuan kepada Penuntut Umum bahwa penyidikan suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan, yang secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang diatur didalam pasal 109 KUHAP.[117] Di dalam melaksanakan tugasnya Penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka, hal ini diatur didalam ketetuan pasal 16 ayat 1 KUHAP untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan penangkapan namun demikian untuk menjamin hak-hak tersangka perintah penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah

[116] R.Soenarto Soerodibroto, 2009. *KUHP dan KUHAP,* Edisi Kelima, Rajawali Press, Jakarta, hlm.359

[117] Rusli Muhammad Op.cit hal 18

sebagaimana disebutkan didalam SK.KAPOLRI No.Pol. Skep/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data

yang terkandung dalam 2 diantara[118] :

1. Laporan Polisi
2. Berita acara pemeriksaan Polisi
3. Laporan hasil penyelidikan
4. Keterangan ahli/saksi ahli
5. Barang bukti

Apabila didalam tahap penyidikan tersebut telah selesai dan dinyatakan lengka berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) maka perkara tersebut wajib dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan. Namun apabila didalam penyidikan tidak ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup ataupun tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan akan dihentikan dan penyidik akan mengeluarkan Surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3), penyidik harus memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

2. Sub Kejaksaan

Di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 2 dinyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan tersebut dilaksanakan secara merdeka, artinya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Pasal

[118] Darwan prinst,Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Jakarta, Djambatan dikutif dari Rusli Muhammad op.cit hal.16

1 ayat 6 huruf a menyebutkan UU No.8 tahun 1981 Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuaten hukum tetap, sadangkan huruf b menyebutkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penunuttan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebelum mengadakan penuntutan Jaksa Penuntut umum menerima SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) seperti yang diatur didalam pasal 109 ayat 1 KUHAP, yang di kirimkan pada lembaga kejaksaan oleh Penyidik. Dalam waktu 7 hari setelah menerima SPDP maka Kejaksaan akan menunjuk seorang atau lebih Jaksa Peneliti yang bertugas untuk meneliti perkara yang diajukan oleh Penyidik yang diikuti dengan surat perintah yang lazim dikenal P-16 yang berisi perintah untuk meneliti perkara yang diajukan oleh Penyidik. Dalam tahapan ini juga Penyidik bisa melakukan kordinasi ataupun konsultasi dengan Jaksa Penelitian tentang perkaranya, dan dalam waktu 7 hari juga Jaksa Peneliti harus menentukan sikap apakah berkas yang diajukan oleh Penyidik sudah lengkap atau belum, apabila jaksa peneliti berpendapat belum lengkan maka jaksa peneliti akan mengeluarkan surat kepada Penyidik yang di sebut P-18. yang diikuti dengan dikeluarkannya i petunjuk tentang kekurangannya dan mengembalikan berkas kepada Penyidik yang dikenal juga sebagai P-19. Dalam hal ini penyidik mempunyai waktu 14 hari untuk memenuhi kekurangan sesuai dengan petunjuk Jaksa peneliti, Tetapi dalam Penyidik belum dapat memenuhi petunjuk jaksa ataupu hanya sebagian saja yang dipenuhi, maka Jaksa akan mengeluarkan P-19 kedua kepada Penyidik untuk melengkapi lagi petunjuk Jaksa Peneliti. Apabila P-19 sudah dipenuhi maka Jaksa Peneliti akan menyatakan berkas sudah lengkap yang lazim dikenal sebagai P-21 dan diberitahukan kepada Penyidik, untuk kemudian penyidik akan melakukan Tahap II

yaitu pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan Tersangkanya Kepada Jaksa Peneliti, yang Kemudian Kejaksaan akan menunjuk seorang atau lebih jaksa untuk menjadi Jaksa Penuntut Umum dan membuat surat dakwaaan. Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan Tersangka berserta berkas perkara dan barang buktinya kepada Pengadilan Negeri dalam waktu secepatnya dengan permintaan untuk segera disidangkan yang disertai dengan surat dakwaan (hal ini diatur didalam Pasal 137 sampai dengan pasal 144 UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP).

3. Sub Sistem Pengadilan

Lembaga Pengadilan adalah merupakan lembaga yang menjalankan pungsi peradilan yang bebas dan mandiri. Dalam sebuah negara hukum kekuasaan kehakimam tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaaan manapun. Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang merdeka tersebut maka Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah mengatur tentang larangan bagi seorang hakim untuk merangkap jabatan. Penyelenggaraan kekuasaaan kehakiman tersebut diatas dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya. Badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung salah satunya adalah peradilan umum, yang ditingkat kabupaten/kota disebut dengan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain. Di dalam menjalanan fungsi

sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, Ketua Pengadilan Negeri Setalah menerima pelimpahan Tersangka, berkas perkara dan alat buktinya maka akan menunjuk Ketua Majelis Hakim dengan 2(dua) orang anggota yang dibantu oleh Panitra Pengganti. Sebelum perkara disidangkan maka Ketua Pengadilan Negeri akan memeriksa kelengkapan berkas perkara, apakah surat dakwaan sudah memenuhi syarat formil mauupu materiil dan untuk memastikan jjika perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penutut Umum masuk kedalam wewenang Pengadilan yang dipimpinnya. Adapun Perkara-perkara pidana yang diajukan untuk diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri terdiri dari : Perkara dengan acara biasa, perkara dengan acara singkat dan perkara dengan acara cepat, didalam penulisan tesis ini dititik beratkan pada pemeriksaaan acara biasa. Majelis hakim yang memeriksa perkara akan memerintahkan kepada Jaksa Penutut Umum untuk memanggil Terdakwa Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai, serta memanggil saksi-saksi yang juga harus sudah diterima 3 (tiga) hari sebelum sidang oleh yang bersangkutan. Pada hari sidang yang ditentukan Ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum ataupun tertutup untuk umum (perkara susila ataupun Terdakwa masih dibawah umur) dengan menanyakan hal-hal yang formal kepada Terdakwa dan mengingatkan akan hak dan kewajibannya selaku Terdakwa, kemudian akan memerintahkan pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian akan menanyakan apakah Terdakwa mengerti dengan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses ini seorang Terdakwa mempunyai hak untuk menanggapi surat dakwaan (eksepsi) ataupun tidak mengajukan eksepsi. Apabila

Terdakwa mengajuka eksepsi maka acara sidang akan dengan pembacaaan eksepsi oleh Terdakwa atau Penasehat hukumnya dan dilanjutkan dengan replik dan duplik terhadap eksepsi namun apabila Terdakwa tidak mengajukan eksepsi makan acara pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembuktian yang pemeriksaan saksi, bukti dan pemeriksaan Terdakwa. Setelah acara pembuktian selesai maka Jaksa Penuntut Umum akan melanjutkan dengan Penuntutan Umumm(biasanya Jaksa Penuntut Umum meminta waktu kepada Ketua Majelis hakim untuk Mengajukan Rentut/rencana tuntutan pada atasannya, adanya rentut ini dikarenakan adanya sistem komando didalam lembaga Kejaksaan). Jaksa Penuntut Umum akan membacakan Tuntutannya kepada Terdakwa manakala Rentut yang diusulkan sudah disetujui oleh atasannya. Terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan Pledoii ataupun pembelaan terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik lisan maupun Tertulis, dan hal ini akan ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum. Setalah proses acara pemeriksaan selasai maka Ketua Majelis beserta anggotanya akan bermusyarawah untuk mengambil putusan berdasarkan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa. Ketua Majelis Hakim apabila sudah bermusyarah untuk menjatuhkan putusan, akan membacakan putusannya didalam sidang yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang putusannya selalu diawali dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila sudah Ketua Majelis sudah membacakan putusannya maka akan menanyakan kepada Terdakwa dengan pertanyaan Apakah menerima putusan/Vonis yang sudah dibacakan ataukah akan mengajukan banding atau Pikir-pikir, Pertanyaan tersebut juga ditujukan kepada Jaksa Penutut Umum. Apabila Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menerima Putusan/Vonis maka

putusan tersebut langsung berkekkuatan hukum, namun apabila Terdakwa ataupun Jaksa Penuntut Umum langsung banding ataupun menyatakan pikir-pikir maka putusan belum berkekuatan hukum tetap dan kedua belah pihak mempunyai waktu 7 hari untuk menyatakan sikap terhadap vonis yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim (ketentuan ini diatur didalam pasal 145-202 UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP).

4. Sub Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam Sistem Peradilan Pidana, di dalam kenyataannya tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi itu adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan. Sesuai dengan falsafah pemidanaan di Indonesia yang dikemukakan oleh Sahardjo, beliau memandang bahwa narapidana sebagai orang yang tersesat dan masih mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Perbaikan itu sendiri menghasilkan konsep pemikiran yaitu pemasyarakatan sebagai metode pembinaan. Sehingga kemudian Lembaga ini dirubah sebutannya dari Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu

dapat negatif manakala bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali.

5. Advokat sebagai Quasi Sub Sistem

Diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (sub-sistem) dari Sistem Peradilan Pidana, hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, yang menyebutkan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan". Kehadiran advokat sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan dan jaminan HAM untuk menciptakan independensi kekuasaan kehakiman. Keberadaan Advokat secara perseorangan maupun secara organisatoris, harus mampu menjadi faktor pendorong (*impetus majority*) dalam perwujudan sistem peradilan yang terintegrasi. Oleh karena secara posisional, kedudukan advokat harusnya sejajar dengan kedudukan Hakim, Jaksa, Polisi dan Lembaga Pemasyarakatan dengan segala hak dan kewajibannya dalam mengawal perwujudan independensi kekuasaan kehakiman. Rusli Muhammad dengan tegas mengatakan bahwa disamping sebagai penasehat hukum (*legal advisieur*) dan pembela (*pleite*), advokat juga sebagai penegak hukum.

Didalam implementasi penanggulangan ***illegal funding*** di Indonesia peranan sistem peradilan pidana untuk menanggulangi *illegal funding* sangat penting terutama didalam hal penerapan sanksi pidananya. Adapun kebijakan sanksi pidana yang dapat diterapkan untuk menanggulangi illegal funding adalah sebagai berikut :

1. Penerapan ketentuan sanksi pidana dalam KUHP

Sebagaimana diurai di atas, kejahatan penghimpunan dana ilegal dapat dikategorikan dalam kejahatan atau tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP, terlebih sebelum diundangkannya ketentuan-ketentuan baru sebagaimana tertera dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Namun demikian, kedua pasal dalam KUHP tersebut dirasa masih terlalu luas cakupan wilayah tindak pidananya, sehingga tidak memiliki spesifikasi tertentu dalam melihat model dan bentuk tindak pidananya, di samping juga ketentuan ancaman pidananya yang terlalu ringan yakni maksimal 4 (empat) tahun penjara. Ringannya ancaman pidananya ini akan menjadi tidak berimbang manakala dihadapkan dengan suatu tindak pidana yang menimbulkan kerugian material yang besar dan masif. Bisa dibayangkan manakala seorang tersangka/terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan jumlah milyaran rupiah sementara ia hanya disangka/didakwa, dituntut bahkan divonis dengan pidana penjara maksimal yakni 4 (empat) tahun penjara, maka lamanya hukuman yang hanya empat tahun tersebut tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh si pelaku/terpidana yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah. Apabila kasus tersebut terjadi, maka akan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi korban tindak pidana tersebut.

Fenomena ini masih sering terjadi dalam praktiknya, berbagai kejahatan penipuan dengan keuntungan milyaran rupiah hanya dijerat dengan menggunakan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan, tanpa dibarengi atau di *junto* kan dengan undang-undang lain yang bisa memberikan ancaman pidana yang lebih besar, sehingga hasilnya tersangka/terdakwa yang telah memperoleh keuntungan milyaran rupiah hanya divonis 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun bahkan ada yang divonis hanya beberapa bulan saja. Sementara si terpidana masih leluasa

menggunakan aset hasil kejahatannya tanpa ada upaya penyitaan dari Negara, begitu si pelaku bebas dari penjara, ia masih bisa menikmati hasil kejahatannya, sementara masyarakat yang menjadi korban hanya bisa menggigit jari tanpa bisa berbuat apa-apa, terlebih dalam kontkes Negara hukum, apapun putusan pengadilan harus dihormati. Seandainyapun ada sebagian masyarakat yang faham hukum, mereka akan menempuh jalur hukum lain berupa pengajuan gugatan perdata, namun hal itu secara ekonomi justru akan menambah beban masyarakat karena peradilan perdata memerlukan energi keuangan yang besar, meskipun hasilnya juga belum tentu sebesar yang diharapkan. Penerapan sanksi pidana didalam KUHP pun sama dengan penerapan sanksi pidana yang dimuat didalam ketetuan sanksi pidana diluar KUHP.

2. Penerapan ketentuan sanksi pidana di luar KUHP

   Ketentuan sanksi pidana terkait dengan kejahatan *illegal funding* yang terdapat di luar KUHP adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi :

   1. *Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*
   2. *Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan--badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.*

   Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan tentang pentingnya sanksi pidana sebagai terapi kejut (*shock therapy)* tetapi juga sebagai upaya penting

dan menjadi sarana utama untuk menanggulangi berbagai kegiatan *illegal funding*. Oleh karenanya, maka menjadi wajar apabila penerapan sanksi pidana dalam konteks ini seolah mendudukkan hukum pidana sebagai cara terdepan (*premium remidium)* meskipun hal tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan-kedaan obyektif dari perbuatan, hal-hal subyektif dari diri si pelaku, kerugian yang ditimbulkan serta pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan perangkat pidana yang lain. Sebagai wujud pengedepanan hukum pidana (*premium remidium),* Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan terlihat dengan jenis sanksi yang diberikan yakni sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda secara akumulatif, tidak berhenti di situ saja, dalam pemberian sanksi juga dikenalkan model sanksi penjara dan sanksi denda berpola minimum khusus yakni penjara minimal 5 tahun dan sanksi denda miminal 10 milyar rupiah. Pola atau model sanksi inilah yang membedakan dengan KUHP yang hanya mengenal sanksi minimum umum dan maksimum umum. Penanganan terhadap kejahatan *illegal funding* dalam tingkat penyelidikan dilakukan oleh Polisi dengan cara menerima laporan yang ditandai dengan pembuatan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) atau Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) untuk kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) Polisi baik kepada Pelapor/Pengadu maupun terhadap saksi-saksi termasuk juga nantinya kepada Terlapor. Apabila dalam proses penyelidikan yang dilakukan telah menemukan alat bukti permulaan yang cukup, maka Polisi dapat meningkatkan pada tahap penyidikan dengan menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan untuk kemudian menetapkan tersangka. Pada tahap penyidikan untuk kemudian menuju pada tahap penuntutan, maka penerapan hukum pidana dalam konteks penanganan kejahatan penghimpunan dana illegal dapat dilihat dari: *pertama*, penerapan

ketentuan sanksi pidana yang di luar KUHP yakni sebagaimana Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan *kedua*, penerapan ketentuan sanksi pidana sebagaimana tertera dalam KUHP.

C. Dampak Implementasi saksi pidana dalam Kasus Bowo Jenggot di Pengadilan Negeri Manna Bengkulu dan Pengadilan Negeri Wonosobo

Sistem peradilan pidana Indonesia adalah jaringan peradilan yang bekerja secara tepadu diantara bagian-bagian untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dapat pula dikatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu komponen peradilan pidana yang saling terkait/tergantung satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat toleransi oleh masyarakat[119]. Indonesia, menganut asas individualisasi pidana dalam hukum pidananya, memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas pidana dalam menjatuhkan putusannya, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*). Berbagai peraturan perundang-undangan pidana selama ini tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Undang undang, oleh hakim, hanya dipakai sebagai pedoman pemberian pidana yaitu pedoman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undang undang, agar hakim dalam kebebasan menjatuhkan putusannya tidak sewenang wenang. Masalah pemberian pidana berkaitan dengan

[119119] Rusli Muhammad, Sistem .....opcit hal 33

masalah hak asasi manusia, oleh karenanya harus ada garansi bahwa pidana yang dijatuhkan itu sudah benar atau sesuai. Implemantasi kebijakan saksi pidana didalam suatu sistem peradilan pidana merupakkan penyebab timbulnya Disparitas didalam pemberian sanksi pidana kepada Terdakwa. Hal ini terjadi dikarenakkan adanya faktor-faktor yang saling mempengaruhi dan saling tergantung diantara sub sistem peradilan pidana, sehingga apabila tidak ada harmonisasi didalam proses penerapan sanksi pidana maka Disparitas akan selalu terjadi. Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari penerapan sanksi pidana yang di lakukan oleh Penuntut Umum dan hakim selaku bagian sub sistem peradilan pidana, untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat[120]. Disparitas dalam tindak pidana umum memang wajar terjadi, akan tetapi dalam tindak pidana khusus yang pelakunya sama, jenis perbuatan atau modus operandinya sama meskipun dengan korban dan lokasi berbeda tentu patut untuk dipertanyakan. Perkara Tindak Pidana atas nama terdakwa MUHAMMAD SULAEMAN WIBOWO dengan kapal bisnisnya PT. Win Win Link Bowo Jenggot yang digelar di Pengadilan Negeri Manna, Bengkulu dan Pengadilan Negeri Wonosobo, Jawa Tengah merupakan salah satu contoh menarik terjadinya disparitas penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penghimpunan dana ilegal di mana pelaku dan jenis perbuatannya sama, meskipun korbannya berbeda.

[120] M. Sholehuddin. 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 116

Kasus Posisi I

Terdakwa MUHAMMAD SULAEMAN WIBOWO Als BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO (selaku Direktur Utama PT. Win Win Link Bowo Jenggot berdasarkan Akte Pendirian tanggal 03 Juni 2009 sesuai Akta Notaris Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, SH di Wonosobo) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan Bulan Januari 2011 atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu tertentu yang masih dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jalan Pemangku Basri Rt. 12 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya , beberapa perbuatan meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan tidak diatur dalam undang- undang sendiri.

Berawal dari pendirian PT. Win Win Link Bowo Jenggot pada tanggal 3 Juni 2009, sesuai dengan akta Notaris Yenny Ika Putri Hardiyaniwati dalam akta notaris, maksud pendirian diantaranya: melakukan penjualan pulsa tronik multi operator dalam dan atau luar negeri, di masing – masing wi layah dibentuk semacam cabang – cabang, perwakilan – perwakilan, unit, sub unit dan agen pulsa di dalam dan luar negeri, Pelunasan Kredit kendaraan bermotor baik baru ataupun bekas, sepeda motor ataupun mobil, pelunasan kredit rumah, pelunasan kredit pin jaman bank/ lembaga keuangan dan pendanaan usaha mikro /pedagang kecil dan memberikan pinjaman modal dan dalam perusahaan tersebut terdakwa Muhammad Sulaiman Wibowo Alias Bowo Jenggot merupakan salah satu pendiri Perusahaan tersebut.

Setelah perusahaan tersebut berdiri maka terdakwa mulai menja lankan usahanya dengan mencari para pihak yang bersed ia untuk menyetorkan dana investasi bursa pulsa tronik dalam bentuk kerja sama dalam hal seolah-olah Bank, dalam kerja sama tersebut terdakwa bertindak sebagai orang yang melakukan penghimpunan terhadap dana investasi, sedangkan penyetor dana investasi akan memperoleh jasa berupa komisi/ keuntungan yang beragam antara delapan sampai dengan sepuluh persen, dan dalam jangka waktu tertentu modal yang diserahkan oleh investor akan dikembalikan secara utuh, perbuatan terdakwa tersebut berlangsung secara terus – menerus sejak perusahaan yang didirikan oleh terdakwa beroperasi sampai dengan terdakwa ditangkap oleh tim penyidik Polres Bengkulu Selatan.

Dalam melakukan kegiatannya terdakwa telah menghimpun dana dengan mencari para pihak yang akan melakukan investasi dengan berkunjung pada setiap daerah, setelah mendapatkan para calon investor maka terdakwa meminta para investor yang akan menanamkan investasi nya untuk melakukan transfer lewat rekening terdakwa pada Bank BRI cabang wonosobo dengan Nomer reken ing 011201015942501, selanjutnya di tanda tangani naskah kerja sama yang dimaksud, terdakwa telah menghimpun dana dari beberapa investor yang dalam perjalanannya diketahui bahwa kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manna, Sulaiman Wibowo alias Bowo Jenggot didakwa dengan dakwaan alternatif yakni dengan pidana penghimpunan dana ilegal sebagaimana tersebut Pasal 46 ayat (1) Undang- undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Setelah melalui persidangan, akhirnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manna, Bengkulu menuntut terdakwa Muhammad Sulaeman Wibowo Als Bowo Jenggot Bin Waras Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Sulaeman Wibowo Als Bowo Jenggot Bin Waras Wibowo berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam penjara.

Atas tuntutan tersebut pada tanggal 22 Agustus 2011 Pengadilan Negeri Manna, Bengkulu yang memeriksa perkara Nomor : 44/Pid .B /2011 /PN.MN memberikan putusan dengan amar:

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SULAEMAN WIBOWO Als BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersa lah melakukan tindak pidana "Penipuan"
- Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Terhadap putusan PN Manna tersebut, terdakwa Bowo Jenggot mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, namun PT Bengkulu melalui putusannya Nomor : 93/PID.2011/PT.BKL justru menguatkan putusan PN Manna.

Kasus Posisi II

MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, B.Sc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO, pada waktu waktu tertentu antara bulan September 2007 sampai dengan 31 Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan 2011, bertempat di Kantor PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT yang beralamat di Jalan Pagude Nomor 252 Talang Sidojoyo, Kabupaten Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,

sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, B.Sc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO mengajukan ijin usaha dalam bentuk CV dengan nama CV. WIN WIN (Win Win Solution) kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo, selanjutnya atas dasar permohonan tersebut maka Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo sesuai dengan dokumen SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Nomor. 503/320/PK/IX/2007 tanggal 27 September 2007 memberikan ijin kepada CV. WIN WIN (Win Win Solution) untuk usaha dalam bidang perdagangan Handphone (HP), Accesories Handphone, Pulsa, Sepeda Motor dan Mobil.

Setelah memperoleh ijin usaha tersebut lalu CV. WIN WIN (Win Win Solution) menjalankan kegiatannya sampai dengan tahun 2009, selanjutnya pada tanggal 05 September 2009, Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, Bsc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO mengajukan perubahan badan hukum yang sebelumnya berbentuk CV dengan nama CV WIN WIN (Win Win Solution) berubah menjadi badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bernama PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT dan sesuai dengan dokumen SIUP pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo Nomor 503/40/320/PM/IX/2009 tertanggal 05 September 2009 menyebutkan bahwa PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT bergerak dalam bidang perdagangan Handphone (HP), Accessories Handphone, Pulsa, Sepeda Motor dan Mobil. Dalam perjalanannya PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT menjalankan usaha yang dipimpin oleh Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, Bsc. ALIAS BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin yang

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo yakni selaku Direktur Utama PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT telah menawarkan kepada masyarakat program-program yang menurut Terdakwa adalah program Investasi pada intinya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat karena masyarakat menyetorkan uang kepada Terdakwa, program-program yang ditawarkan tersebut antara lain :

a) Investasi Pulsa Tronik Dalam program ini ditawarkan kepada masyarakat/nasabah dengan ketentuan masyarakat dapat menginvestasikan uangnya melalui PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT dimana setiap nasabah yang memberikan uangnya dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, B.Sc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO dengan keuntungan sebesar 8 % sampai dengan 10 % per bulan, dalam program ini setiap orang yang ikut investasi diwajibkan menjual pulsa minimal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan maksimal tidak terbatas, sedangkan keuntungan 8 % sampai dengan 10 % setiap bulannya di ambil di kantor PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT.
b) Tabungan Berencana atau Tabernas Dalam program ini berupa tabungan yang disetorkan oleh masyarakat kepada PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT, ketentuannya setiap nasabah yang akan menabung wajib menyetorkan uang pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebagai tabungan pertama sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya setiap bulan wajib menabung selama dua belas bulan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian tabungan tersebut diendapkan selama 4 (empat) bulan, dan untuk pencairan tabungan sesuai dengan rencana dan kebutuhan nasabah yang diatur sesuai dengan tabel pilihan masa pencairan yang dikeluarkan oleh PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT.

c) Tabungan Bulanan Syari'ah Dalam program ini berbentuk tabungan dengan ketentuan setiap nasabah wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan selama 24 (Dua Puluh Empat Bulan) dan dalam bulan ke 25 (dua puluh lima) dapat diambil dengan memperoleh dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

d) Tabungan Deposito Syari'ah Dalam program ini ditentukan bahwa nasabah wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sekali saja kemudan pada bulan ke-25 (Dua Puluh Lima) dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

e) Program Bursa Sepeda Motor dan Mobil Dalam program ini dengan format yang hampir sama yaitu akses pulsa dan perhitungan keuntungan.

Dari program-program yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut maka masyarakat yang menyetorkan uang/investasi/tabungan kepada Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN, B.Sc alias BOWO JENGGOT diberikan surat perjanjian yang disebut sebagai Sistem Kontrak yang bila sudah habis masa kontraknya bisa dilakukan perpanjangan dan setiap kali program selesai, maka modal awal yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya kepada nasabah / masyarakat yang ikut program berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT.

Program-program tersebut disebarluaskan melalui brosur-brosur yang diberikan kepada masyarakat, melalui radio serta melalui media televisi (Jogja TV), Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN, B.Sc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO berhasil menarik dana dari masyarakat yang menyetorkan uangnya kepada Terdakwa dalam jumlah yang bervariasi dan program yang bervariasi.

Dari jumlah uang yang telah disetorkan oleh masing-masing saksi kepada Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO

sesuai dengan masing-masing program yang diikutinya, beberapa saksi telah memperoleh komisi atau keuntungan 8% sampai dengan 10 % sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat selama beberapa kali, namun diantara nasabah ada yang sama sekali tidak memperoleh komisi keuntungan yang dijanjikan, dan beberapa saksi yang telah menyetorkan/menabung/ menginvestasikan uangnya pada PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT, dan ketika ditanyakan di kantor ternyata keuntungan/komisi tidak dapat diberikan sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan dan uang pokok setoran tidak dapat diambil dengan berbagai alasan sehingga para saksi merasa dirugikan sehingga melaporkan Terdakwa kepada kepolisian untuk diproses hukum.

Dari program yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT diperoleh fakta-fakta tentang karakteristik program investasi tersebut sama dengan karakteristik produk perbankan yaitu :

a) Adanya penyerahan dana dari Masyarakat
b) Penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
c) Adanya penyerahan buku tabungan atau bukti simpanan kepada penyimpan dana.
d) Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu

Oleh Jaksa Penuntut Umum mendakwa Bowo Jenggot dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 46 Undang Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Atas fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang amarnya:

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO terbukti bersalah melakukan tindak pidana

"Perbankan" sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun kurungan.

Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 45/Pid. Sus/2014/PN Wsb pada Pengadilan Negeri Wonosobo memutuskan dengan amar putusan:

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA " ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
- Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Merujuk 2 (dua) putusan pengadilan negeri atas kasus Bowo Jenggot, yakni Pengadilan Negeri Manna, Bengkulu dan Pengadilan Negeri Wonosobo, ditemukan disparitas dalam putusan pidana tersebut. Disparitas tersebut terlihat nyata dari amar putusan keduanya, yang mana Pengadilan Negeri Manna memutus dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan memberikan hukum penjara Bowo Jenggot selama 4 tahun penjara. Sementara dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Hakim memutus bersalah Bowo Jenggot dengan menggunakan Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun serta denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.

Perbedaan putusan pidana tersebut berawal pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada kasus Bowo Jenggot di Pengadilan Negeri Manna, Bengkulu, JPU menuntut dengan Pasal 378 KUHP sementara pada Pengadilan Negeri Wonosobo, JPU menuntut dengan Pasal 46 UU Perbankan, sebagai Majelis Hakim pidana tentu akan memberikan putusan sesuai yang dituntutkan kepadanya berdasarkan Surat Tuntutan JPU.

Problematika Disparitas didalam penerapan sanksi pidana tidak hanya terjadi di Indonesia saja akan tetapi juga terjadi dinergara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, hampir semua negara-negara mengalami disparitas didalam penegakan hukum pidananya. Banyak faktor-faktor penyebab terjadiya disparitas didalam penjatuhan pidana yang, sehingga hal ini banyak menimbulkan kecemburan dan pandangan negatif terhadap sistem peradilan pidana yang kemudian berujung terjadinya ketidak percayaan masyarakat pada sistem peradilan yang merupakan benteng terakhir untuk menuntut keadilan. Sistem peradilan peradilan pidana pun menjadi rusak/gagal

dan terjadi inkosistensi putusan-putusan hakim terhadap konsep-konsep penegakan hukum di Indonesia. Negara Indonesia yang bersistemkan hukum melalui lembaga yudikatifnya bertugas untuk menegakan hukum akan semakin tidak dipercaya manakala permasalahan disparitas tidak di minimalisir. Konsep asas persamaan dimuka hukum (equal before the law) yang merupakan ciri khas dari suatu negara hukum akan semakin tidak berarti dan perlu dipertanyakan lagi. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukan sebagai berikut :

"Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan Nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem unutk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding[121]." Disparitas merupakan permasalahan penjatuhan pidana, hal ini tercermin dalam musyawarah VII IKAHI di pandaan Jawa Timur tahun 1975 dan Musyawarah Nasional VIII IKAHI yang mengangkat permasalahan tentang Disparitas, sehingga hal ini menunjukan jika permaslahan Disparitas ini merupakan permasalahan yang sangat serius didalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undang undang, agar hakim dalam kebebasan menjatuhkan putusannya tidak sewenang

[121] Muladi-Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hal. 54

wenang. Hakristuti Harkrisnowo menanggapi permasalahan Dispartitas ini sebagai berikut :

> ”Dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal justice). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, sering kali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim “[122].

Dari tulisan tersebut diatas dapat disimpukan jika pemasalah disparitas ini mengakibatkan hukum di Indonesia pada keadaan yang tidak sesuai lagi dengan tujuan penegak hukum. Disparitas itu sendiri timbul dikarenakan penjatuhan pidana pidana terhadap tindak pidana yang sejenis, pemidanaan ini merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap para pelaku tindak pidana, sehingga seorang hakim merupakan penentu didalam proses sistem peradilan pidana.

Menurut Muladi Disparitas itu sendiri dimulai dari hukum sendiri. Di dalam Hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana. Muladi juga mengatakan jika disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, ada juga hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana yaitu faktor-faktor pada diri hakim itu sendiri baik yang berifat internal maupun ekternal yang tidak dapat dipisahkan karena sudah terpaku sebagai atribut seorang yang disebut

---

[122] Harkristuti Harkrsnowo, “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, (Jakarta:KHN,2003) hal.28. (dikutif dari https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia*)

sebagai Insan Peradilan. Sehubungan dengan adanya kebebasan hakim menurut Sudarto " kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (onbehagelijk) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali"[123]. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arif tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka undang undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana[124]. Harkristuti Harkrisnowo berpendapat jika disparitas itu sendiri dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama

[123] *Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, bandung: Alumni, 1977, hal. 61*

[124] *dikutif dari https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia*)

Oleh kerenanya jika kita meneliti pendapat-pendapat diatas juga apabila dihubungkan praktek sehari- hari Disparitas dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya cara pandang yang berbeda dari Jaksa Penuntut Umum terhadap kontruksi hukum yang diawali dari proses penyidik maupun penuntutan dan adanya sistem rencana penuntutan (Rentut) yang dianut didalam sistem penuntutan kejaksaan di Inodonesia.
2. Faktor Tidak adanya pedoman untuk penjatuhan pemidanaan

   Tidak adanya pedoman hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ini mempersulit hakim didalam menjatuhkan pidana sehingga hakim sering terpengaruh pada hal-hal diluar kekuasaannya (pengaruh lingkungan pengadilan). Menurut Sudarto bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim[125]. Adanya Pedoman untuk penjatuhan pidana ini bukanlah untuk menyamakan seluruh putusan hakim dan tidak untuk menghilangkan disparitas dikarenakan hakim terikat pada prinsip kebebasan hakim didalam menangani perkara yang diajukan padanya, sehingga pedoman ini digunakan untuk menserasikan pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan juga mempertimbangkan rasa

[125] EddyDjunaedy, Beberapa pedoman pemidanaan dan Pengamatan Narapidana: tanpa penerbit tanpa tahun hal 9 (dikutif dari *https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia*)

keadilan Terdakwa. Pedoman pemidanaan juga dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana;

3. Faktor tidak adanya Patokan Pidana

   Tidak adanya patokan penjatuhan pidana untuk hakim mengakibatkan keaneka ragaman pemindanaan akan selalu terjadi walaupun hakim-hakim sudah bekerja dengan penuh integritas. Maksud dari patokan pemidanaan menurut Edwar M Kennedy yang dikutif dari Eddy Junaedy adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah Pengadilan Tertentu[126]. Patokan itu sendiri tidak bersifat mutlak dan tidak mengikat dikarenakan setiap hakim mempunyai keyakinan dan bebas untuk mengambil keputusan didalam menjatuhkan pidana,

4. Faktor yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945

   Faktor ini sangat berpergaruh pada hakim didalam penjatuhan pidana. Di dalam sistem nasional Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menjatuhkan dan memilih jenis pidana dan berapa lama pidana itu dijatuhkan, sehingga hal ini menjadikan peluang untuk memperluas adanya disparitas. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Landasan hukum inilah yang memberikan hakim kebebasan untuk menjatuhkan pidana dan jenis pemidanaan dikarenakan hakim merupakan lembaga yang mandiri dalam menjalankan tugasnya.

5. Faktor yang ada dalam diri hakim

[126] Ibid,hal 19

Faktor ini terdiri dari dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal dalam diri hakim. Faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dpat dipisahkan. Faktor internal ini tidak dapat diilepaskan dari diri seorang hakim dikarenakan hal ini sudah terpatri didalam dirinya sehingga akan selalu berperan didalam menjalani kehidupan sehari-hari dan didalam menjalankan tugasnya sebagai hakim. Muladi mengatakan faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpaku sebagi atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang social, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku social. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.[127]

Secara normatif, disparitas pidana diperbolehkan asal demi kepentingan perbaikan individu pelaku tindak pidana. Disparitas akan selalu ada didalam penegakan hukum di Indonesia yang harus dilakukan adalah meminimkan terjadinya disparitas sehingga akan mengurangi dampak negatif terhadap dunia peradilan khususya hakim pidana. Barda Nawawi Arif mengutif pendapat Edward M Kennedi yang menyebutkan bahawa akibat disparitas ialah :

- Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidndan yang ada;
- Gagall mencegah terjadinya tindak pidana;

[127] *dikutif dari https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia*)

- Mendorong terjadinya tindak pidana;
- Merintangi tindak-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar;

Adanya disparitas apabila tidak dicarikan upaya untuk mengurangi akan membuat kekacauan dalam sistem penegakan hukum dan berdampak negatif terhadap rasa keadilan masyarakat. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya kegagalan penegakan hukum pidana, seakan hukum hanya dijadikan alat untuk mengurangi kejahatan. Oemar senoaji berpendapat jika disparitas dalam pemidanaan dapat dibenarkan dalam hal sebagai berikut :

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas
2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar. [128]

Pandangan Oemar Senoadji tentang pemidanaan dapat kita simpulkan jika disparitas itu sendiri bukan hal yang negatif dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, dispasritas tidak dapat diatasi dengan menyeragamkan pemidanaan. Dengan banyaknya pendapat-pendapat para ahli hukum terhadap permasalahan Disparitas, yang dihubungakan dengan falsafah dan tujuan pemidanaan maka Muladi yang menyatakan : "bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana".[129] Selain itu diperlukan adanya aturan Tujuan dan Pedoman Pemidanaan bagi hakim dalam memutus perkara-perkara yang dihadapinya sehingga hakim memiliki patokan dalam menentukan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan secara proporsional.

---

[128] Oemar Seno Adji, "Hukum-hukum pidana", (Jakarta-Erlangga, 1984), hal 28-29

[129] Muladi " Dampak Disparitas Pidana dan Usaha usaha mengatasinya", Bandung, Alumni, hal 8-9

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan implementasi sanksi hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan penghimpunan dana illegal dilakukan melalui Sistem peradilan pidana yang didukung oleh sub sistem-sub sistem yang terdapat didalamnya dan saling mendukung satu sama lain. Sistem peradilan pidana bekerja dimulai dengan adanya laporan masyarakat kepada kepolisian yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk melakukan pengungkapan fakta-fakta ataupun bukti-bukti dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Pada tahap penyidikan Penyidik sudah melakukukan kordinasi dengan Kejaksaan yang diwujudkan dengan mengirimkan SPDP. Apabila penyidik menemukan bukti-bukti yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka penyidikan akan melanjutkan penyidikannya dengan melimpahkan berkas kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum apabila sudah merasa lengkap dengan berkas yang dilimpahkan oleh Penyidik maka akan menyatakan berkas tersebut lengkap dan dengan segera melimpahkan ke Pengadilan yang disertai dengan surat agar segera disidangkan. Pengadilan akan segera menyidangkan tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum hingga penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana didalam illegal funding akan menerima vonis ataupun hukum sesuai dengan perbuatannya.
2. Kebijakan Implementatif didalam penerepan sanksi pidana didalam penanggulangan **Illegal Funding** berdampak pada munculnya disparitas, hal ini dimulai pada proses penyidikan dan penyusunan dakwaan yang diikuti oleh proses penuntutan oleh Jaksa

Penuntut Umum yang menjadi dasar pembuatan putusan. Tidak adanya harmonisasi diantara penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, sering terjadi diantara sub sistem peradilan pidana yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekternal sehingga menghasilkan putusan yang berbeda-beda untuk tindak pidana yang sama dengan pelaku yang sama. Adanya sistem Rentut (rencana tuntutan) yang merupakan sistem komando dalam lembaga kejaksaan yang tidak dapat dihilangkan, sehingga jaksa penutut umum tidak dapat bebas melakakukan penuntutan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi didalam persidangan. Disamping itu hakim sebagai bagian dari sub sistem Pengadilan yang bertugas untuk menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga adanya tuntutan Penuntut Umum, mempunyai andil yang besar didalam munculnya disparitas. Hakim Sebagaimana yang diatur didalam undang-undang dasar mempunyai kebebasan dan mandiri didalam menjalankan tugasnya. Sehingga dengan adanya pengaruh-pengaruh baik ekternal maupun internal pada diri hakim akibatnya akan selalu muncul disparitas didalam setiap putusan. Disparitas itu sendiri bukan merupakan sesuatu hal yang negatif didalam penerapan sanksi pidana sepanjang rasional dan dan tidak menimbulkan kekacauan didalam penegakan hukum.

2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu kiranya penulis memberikan saran atau rekomendasi bagi upaya menanggulangi kejahatan penghimpunan dana ilegal sebagai berikut:

1. Memperbaiki ataupun merubah peraturan perudang-undangan yang mengatur tentang penghimpunan dana baik yang diatur didalam undang-undang Perbankan, koperasi, assuransi maupun tentang pasar modal khususnya yang mengatur tentang pidana,

yang saat ini masih dirasa kurang berat dan juga didalam Undang-undang tersebut harus berorientasi kepada korban dan kerugiannya juga perlunya ada pedoman penjatuhan pidana bagi para hakim agar para pelaku kejahatan mendapatkan vonis yang sesuai dengan perbuatanya mengingat kerugian didalam kejahatan penghimpunan dana illegal sangat besar dan dapat berpengeruh pada stabilitas perekonomian negara. Perlu adanya aturan Tujuan dan Pedoman Pemidanaan bagi hakim dalam memutus perkara-perkara yang dihadapinya sehingga hakim memiliki patokan dalam menentukan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan secara proporsional.

2. Pemerintah harus memberikan informasi-informasi tentang kejahatan penghimpunan dana masyarakat baik melalui media masa, pendidikan, seminar maupun Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para penegak hukum terhadap berkembangnya kejahatan-kejatan yang berkedok penghimpunan dana masyarakat ataupun investasi sehingga kejahatan-kejahatan yang berbentuk penghimpunan dana dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat dan profesional juga harus adanya kesamaan persepsi para penegak hukum yang terlibat didalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Aryanto Sutadi, "Modus Operandi dan Pembahasan Kasus Pembobolan Bank" Makalah disampaika pada seminar *Mencegah Pembobolan Bank*, Jakarta, 28 Maret 1996

Amiruddin dan H. Zainal Asikin,2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arif Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Banyumedia, Malang

Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia,Bogor

Barda Nawawi Arief, 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Cetk. Ketiga, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bhakti, Bandung

Burhanuddin Abdullah, 2006. *Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan,* LPES, Jakarta.

Black, D, "*Behavior of Law*", (New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976)

F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum,* CV. Ganda, Yogyakarta.

Friedman, L , "*American Law*", (London: W.W. Norton & Company, 1984),

IS Heru Permana, 2007. *Politik Kriminal,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

M. Arief Amrullah, 2004. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan,* Cetk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang

M. Arif Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Banyumedia Publishing, Malang

Mardjono Reksodiputro,1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta

Marulak Pardede, 1995. *Hukum Pidana Bank,* Pustaka Sinar, Jakarta

Mestika Zed, 2004, *Metode penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Moh. Mahfud MD,2001. *Politik Hukum di Indonesia,* cetk. Kedua, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.

Moeljatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka cipta,Jakarta

Muhammad Djumhana, 2005. *Hukum Perbankan di Indonesia,* Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

Muladi, *Dampak Disparitas dan Usaha-usaha Mengatasinya,* Alumni Bandung

Muladi,1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang

Mukti Fajar dan Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

N.H.T. Siahaan, 2005, *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Oemar Seno Adji,1984, *Hukum-hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta

Pieter Abdulah, 2010, *Kejahatan Perbankan dan Effektifitas Perbankan : Menggabungkan Teori Permainan dan Pendekatan Analytical Network Process*, Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia Jakarta

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, tt, *Asas-asas Hukum Pidana*, Modul pendidikan Jaksa dan Pelatihan Jaksa, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Rusli Effendi, 1986, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan hukum Pidana, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta Bandung

Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana: Dilengkapi dengan 4 Undang-undang di Bidang Peradilan Pidana, UUI Press, Yogyakarta

Salman Luthan, 2009, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal hukum No.1/2009, FH UII, Yogyakarta

Satochid Kartanegara, tt, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Yogyakarta

Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHEAM, Jakarta

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, suatu tinjauan singkat, Raja Grafindo, Jakarta

Soenaryo, 1985. *Metode Riset I*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung

Sudarto, 1986 *Hukum dan Hukum Pidana*,Alumni, Bandung

Sudarto,1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Pieter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum Edisi Revisi,Prenada media Grup, Jakarta

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 20075 *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN ILLEGAL FUNDING

(STUDI KASUS BOWO JENGGOT GATE WAY)

PROPOSAL TESIS

Oleh:

SUSANTIO,SH

Nomor Mhs : 7912317

BKU : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2015

P U T U S A N

Nomor : 93/PID.2011/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap **MUHAMAD SULAEMAN WIBOWO ALS BOWO JENGGOT BIN WARAS WIBOWO ;**

Tempat lahir : Ciamis Jawa Barat ;

Umur/tgl.lahir : 44 Tahun / 17 Oktober 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal Perumahan Taman Mutiara Persada Blok B3 Nomor : 03 Tembeleng Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :- ----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2011 s/d tanggal 01 Maret 2011 ;- -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d tanggal 10 April

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2011 ;- ---

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 11 April 2011 s/d tanggal 10 Mei 2011 ;---

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2011 s/d tanggal 01 Mei 2011 ;- -

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2011 s/d tanggal 12 Mei 2011 ;- ---

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 13 Mei 2011 s/d tanggal 11 Juli 2011 ;- ---

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2011 s/d tanggal 10 Agustus 2011 ;- --

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d tanggal 09 September 2011 ;- ---

9. Hakim Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d tanggal 20 September 2011 ;- --

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2011 s/d tanggal 19 Nopember 2011 ;- ---------------------------------------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGADILAN TINGGI tersebut ;----------

----------Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 93/Pen.Pid/2011/PT.BKL, tanggal 30 September 2011, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding, perkara pidana Nomor : 44/Pid.B/2011/PN.MN, atas nama terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Manna, tanggal 22 Agustus 2011 ;----------

----------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas ;----------

----------Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor : Reg : PERK.PDM – 42/N.7.13/Ep.1.04/2011, dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 29 April 2011, yang mendakwa sebagai berikut :----------

KESATU :

-------- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SULAEMAN WIBOWO Als BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO** (selaku Direktur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utama PT. Win Win Link Bowo Jenggot berdasarkan Akte Pendirian tanggal 03 Juni 2009 sesuai Akta Notaris Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, SH di Wonosobo) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sampai dengan Bulan Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jalan Pemangku Basri Rt. 12 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan tidak diatur dalam undang-undang sendiri .*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :----------

- Berawal dari pendirian PT. Win Win Link Bowo Jenggot pada tanggal 3 Juni 2009, sesuai dengan akta Notaris Yenny Ika Putri Hardiyaniwati dalam akta notaris, maksud pendirian diantaranya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penjualan pulsa tronik multi operator dalam dan atau luar negeri, di masing – masing wilayah dibentuk semacam cabang – cabang, perwakilan – perwakilan, unit, sub unit dan agen pulsa didalam dan luar negeri, Pelunasan Kredit kendaraan bermotor baik baru ataupun bekas, sepeda motor ataupun mobil, pelunasan kredit rumah, pelunasan kredit pinjaman bank/lembaga keuangan dan pendanaan usaha mikro/pedagang kecil dan memberikan pinjaman modal dan dalam perusahaan tersebut terdakwa Muhammad Sulaiman Wibowo Alias Bowo Jenggot merupakan salah satu pendiri Perusahaan tersebut ;- - - - -

- Setelah perusahaan tersebut berdiri maka terdakwa mulai menjalankan usahanya dengan mencari para pihak yang bersedia untuk menyetorkan dana investasi bursa pulsa tronik dalam bentuk kerja sama dalam hal seolah- olah Bank, dalam kerja sama tersebut terdakwa bertindak sebagai orang yang melakukan penghimpunan terhadap dana investasi, sedangkan penyetor dana investasi akan memperoleh jasa berupa komisi/keuntungan yang beragam antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan sampai dengan sepuluh persen, dan dalam jangka waktu tertentu modal yang diserahkan oleh investor akan dikembalikan secara utuh, perbuatan terdakwa tersebut berlangsung secara terus – menerus sejak perusahaan yang didirikan oleh terdakwa beroperasi sampai dengan terdakwa ditangkap oleh tim penyidik Polres Bengkulu Selatan ;- - - - - -

- Bahwa dalam melakukan kegiatannya terdakwa telah menghimpun dana dengan mencari para pihak yang akan melakukan investasi dengan berkunjung pada setiap daerah, setelah mendapatkan para calon investor maka terdakwa meminta para investor yang akan menanamkan investasinya untuk melakukan transfer lewat rekening terdakwa pada Bank BRI cabang wonosobo dengan Nomer rekening 011201015942501, selanjutnya ditandatangani naskah kerja sama yang dimaksud, terdakwa telah menghimpun dana dari beberapa investor antara lain Wahyudi dengan beberapa kali pengiriman Tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp.200.000.424,- (Dua Ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp.100.000.424,- (Seratus Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), Tanggal 23 April 2010 sebesar Rp.455.000.424,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), Tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp.55.000.424,- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupia), Tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp.154.000.424,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp.175.000.424,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah),tanggal 20 September 2010 sebesar 118.750.424,- (Seratus delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), 24 Nopember 2010 sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta), tanggal 25 Nopember 2010 sebesar 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah),Tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan saudara Helmi Setiawan pengiriman tanggal 5 September 2010 sebesar 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga terdakwa berhasil menghimpun dana sebesar Rp.1.700.452.544,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), Bahwa Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari Pimpinan Bank Indonesia ;- ----------

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;- ----------

------ **ATAU**

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SULAEMAN WIBOWO Als BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO** (selaku Direktur Utama PT. Win Win Link Bowo Jenggot berdasarkan Akte Pendirian tanggal 03 Juni 2009 Notaris Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, SH di Wonosobo) pada hari kamis tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Januari atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jalan Pemangku Basri Rt. 12 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kedatangan Terdakwa Muhamamad Sulaiman Wibowo Alias Bowo Jenggot selaku salah satu pendiri PT. Win Win Link Bowo Jenggot ke Manna berdasarkan undangan saudara Supandi, saat di Manna terdakwa bertemu dengan saksi korban wahyudi dalam acara seminar yang diadakan oleh terdakwa di Gedung Pemuda Manna dan terdakwa menawarkan untuk bergabung dalam investasi bursa pulsa elektronik pada PT. Win Win Link Bowo Jenggot, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa dalam kegiatan investasi pulsa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

elektronik tersebut dapat merubah pulsa menjadi berjuta – juta rupiah, setelah pertemuan di Gedung Pemuda Manna terdakwa beserta dengan istrinya kemudian mendatangi saksi korban Wahyudi ke rumahnya, sesampainya dirumah korban wahyudi, terdakwa beserta isteri bertemu dengan korban Wahyudi beserta istrinya, dalam pertemuan tersebut kembali terdakwa meyakinkan korban Wahyudi untuk melakukan investasi di PT. Win win Link Bowo Jenggot dengan mengatakan bahwa keikutsertaan korban Wahyudi dalam investasi tersebut tidak akan rugi sebab keuntungan investasi penjualan pulsa tersebut akan didapat oleh saksi korban wahyudi sebanyak sepuluh kali lipat dari gaji yang diperoleh korban Wahyudi saat ini dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa akan menuangkan kerja sama tersebut dalam bentuk tertulis, melalui penjelasan terdakwa tersebut akhirnya korban yakin dan melakukan investasi kepada terdakwa sebesar Rp.285.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), investasi tersebut dituangkan oleh terdakwa dalam bentuk tertulis dengan nomer surat 2037/INV.1/BI/WSB/2010, namun dalam kerja sama tertulis tersebut terdakwa kembali bermaksud meyakinkan korban wahyudi dengan menuangkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bentuk tertulis, sedangkan dalam bentuk tertulis itu sendiri terdakwa menyatakan akan memberikan keuntungan 10% kepada korban Wahyudi setiap bulannya dan hal tersebut tidak dipenuhi selain itu dalam kerja sama tertulis tersebut hanya sebagai sebagai media terdakwa meyakinkan saksi korban sebab kerja sama tertulis tersebut diawal terdakwa menyatakan investasi akan tetapi diakhir kerja sama tertulis disebutkan mengenai penjualan pulsa elektronik sehingga kerja sama tertulis tersebut hanya dipergunakan terdakwa untuk meyakinkan korban agar menyerahkan uangnya, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban dirugikan sebesar Rp.285.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);- ----------

---------- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;- ----------

---------- **ATAU**

KETIGA :

-------- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SULAEMAN WIBOWO Als BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO** (selaku Direktur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utama PT. Win Win Link Bowo Jenggot berdasarkan Akte Pendirian tanggal 03 Juni 2009 Notaris Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, SH di Wonosobo) pada hari kamis tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dalam Bulan Januari atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jalan Pemangku Basri Rt. 12 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kedatangan Terdakwa Muhamamad Sulaiman Wibowo Alias Bowo Jenggot selaku salah satu pendiri PT. Win Win Link Bowo Jenggot ke Manna berdasarkan undangan saudara Supandi, saat di Manna terdakwa bertemu dengan saksi korban wahyudi dalam acara seminar yang diadakan oleh terdakwa di Gedung Pemuda Manna dan terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menawarkan untuk bergabung dalam bisnis pulsa elektronik pada PT. Win Win Link Bowo Jenggot, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa dalam kegiatan bisnis pulsa elektronik tersebut dapat merubah pulsa menjadi berjuta – juta rupiah, setelah pertemuan di Gedung Pemuda Manna terdakwa beserta dengan istrinya kemudian mendatangi saksi korban Wahyudi ke rumahnya, sesampainya dirumah korban wahyudi, terdakwa beserta isteri bertemu dengan korban Wahyudi beserta istrinya, dalam pertemuan tersebut kembali terdakwa meminta korban Wahyudi untuk menyerahkan uang di PT. Win win Link Bowo Jenggot dengan mengatakan bahwa keikutsertaan korban Wahyudi dalam menyerahkan uang tersebut tidak akan rugi sebab keuntungan menyerahkan uang penjualan pulsa tersebut akan didapat oleh saksi korban sebanyak sepuluh kali lipat dari gaji yang diperoleh korban Wahyudi saat ini agar penjelasannya lebih terperinci terdakwa menuangkan kerja sama tersebut dalam bentuk tertulis, melalui penjelasan terdakwa tersebut akhirnya korban menyerahkan uang kepada terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada terdakwa sebesar Rp.285.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), baik itu diserahkan awal sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke BRI No. Rekening. 01120101594250 An. terdakwa tersebut dituangkan oleh terdakwa dalam bentuk tertulis dengan nomor surat 2037/INV.1/BI/WSB/2010, namun dalam menyerahkan uang dibuat bukti tertulis tersebut terdakwa bermaksud meyakinkan korban wahyudi dengan menuangkan dalam bentuk tertulis, setelah menerima uang sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta tersebut, terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga terdakwa dapat melakukan pengembalian tepat pada waktunya dan seolah-olah uang tersebut sebagai milik pribadinya.

---- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;- ----------

---------Telah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum agar Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :
----

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Sulaeman Wibowo Als Bowo Jenggot Bin Waras Wibowo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;----------
   ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Sulaeman Wibowo Als Bowo Jenggot Bin Waras Wibowo** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam penjara;

   ----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

   - 9 (sembilan) berkas Surat Perjanjian Kerjasama PT. WIN WIN BOWO JENGOT An. MUHAMMAD SULAEMAN WIBOWO terlampir dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkas perkara ;- ----------

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1112 dengan nomor IMEI 356956/01/218636/0 warna hitam putih dikembalikan kepada pemiliknya;- ----------
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1112 dengan nomor IMEI 356281/01/873332/5 warna hitam putih dikembalikan kepada pemiliknya;- ----------
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT nomor : 503/40-320/PM/IX/2009, tanggal 05 September 2009 terlampir dalam berkas perkara ;- ----------
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(TDP) PT. WIN WIN BOWO JENGGOT, Nomor: 1129000318 tanggal 05 September 2009 terlampir dalam berkas perkara ;---

- 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha PT. WIN WIN BOWO JENGGOT, nomor: 530/306/HO/2009 tanggal 05 September 2009 terlampir dalam berkas perkara ;--
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor: AHU-39924.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009 terlampir dalam berkas perkara ;--------------------------------
- 3 (tiga) Berkas Laporan Transaksi dan Keuangan server BJ Holding Bulanan Milik PT.WIN WIN LINK BOWO JENGGOT terlampir dalam berkas perkara ;---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA type: RM-305 dengan nomor IMEI 353513/02/249555/5 warna putih dikembalikan kepada pemiliknya ;- ----
- 1 (satu) berkas rekening koran An. Helmi Setyawan dari Bank Mandiri Wonosobo (asli) dikembalikan kepada saksi helmi setyawan ;- ----------

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;- ----------

--------Telah membaca Pembelaan/Pledoi terdakwa yang diajukan dipersidangan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan putusan sebagai berikut :- ----------

1. Dibebaskan murni dari tuntutan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;- ----------
2. Dinyatakan tidak terbukti telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana yang dituduhkan ;-

3. Bila memang dipandang terbukti maka mohon Mejalis Hakim menjatuhkan hukuman pidana yang paling ringan, berdasarkan bukti dan keterangan saksi ;- ----------

---------- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna, Nomor : 44/Pid.B/2011/PN.MN, tanggal 22 Agustus 2011, yang amarnya sebagai berikut :- ----------

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SULAEMAN WIBOWO Als BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**; ----------
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; ----------
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijatuhkan; ----------

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; ----------
5. Menetapkan barang bukti berupa : ----------

- 9 (sembilan) berkas Surat Perjanjian Kerjasama PT. WIN WIN BOWO JENGOT An. MUHAMMAD SULAEMAN WIBOWO terlampir dalam berkas perkara ; ----------
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1112 dengan nomor IMEI 356956/01/218636/0 warna hitam putih dikembalikan kepada pemiliknya.
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1112 dengan nomor IMEI 356281/01/873332/5 warna hitam putih dikembalikan kepada pemiliknya.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT nomor : 503/40-320/PM/IX/2009, tanggal 05 September 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terlampir dalam berkas perkara ;- ------------------------------

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. WIN WIN BOWO JENGGOT, Nomor: 1129000318 tanggal 05 September 2009 terlampir dalam berkas perkara ;- ---------------------------------- -------------------------------

- 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha PT. WIN WIN BOWO JENGGOT, nomor: 530/306/HO/2009 tanggal 05 September 2009 terlampir dalam berkas perkara ;- ---------------------------------- --

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor: AHU-39924.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009 terlampir dalam berkas perkara ;- ---------------------------------

- 3 (tiga) Berkas Laporan Transaksi dan Keuangan server BJ Holding Bulanan Milik PT.WIN WIN LINK BOWO JENGGOT terlampir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA type: RM-305 dengan nomor IMEI 353513/02/249555/5 warna putih dikembalikan kepada pemiliknya ;-------
- 1 (satu) berkas rekening koran An. Helmi Setyawan dari Bank Mandiri Wonosobo (asli) dikembalikan kepada saksi helmi setyawan ;------------------

6. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);--
----

----------Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2011/PN.MN, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna tesebut dan permintaan banding terdakwa telah diberitahukan Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011, sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor : 11/Akta.Pid/2011/PN.MN ;-------------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--------Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 24 Agustus 2011, Nomor : W8.U3/496/HN.01.10/VIII/2011 dan surat keterangan bahwa terdakwa tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara tanggal 8 September 2011 ;----------

---------Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima ; ----------

----------Menimbang, bahwa dari isi memori banding yang diajukan oleh terdakwa tidak ada hal-hal yang baru yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut memori banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut ;----------

----------Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah maksimal dari Pasal yang dinyatakan terbukti karena terdakwa dijatuhi pidana maksimal maka hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa seharusnya ditiadakan cukup hal-hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang memberatkan bagi diri terdakwa yang perlu untuk dicantumkan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sudah seharusnya kejahatan yang dilakukan menggunakan akal cerdik dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat pantas untuk dijatuhi hukuman maksimal kepada pelakunya ;----------

------- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 44/Pid.B/2011/PN.MN, tanggal 22 Agustus 2011, sudah tepat, benar dan adil serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan apabila Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadili perkara ini ;----------
---

---------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manna yang dimintakan banding itu haruslah dikuatkan dan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah Tahanan Negara ;

--------- Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;----------

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut dapat diterima ;----------
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manna, Nomor : 44/Pid.B/2011/PN MN, tanggal 22 Agustus 2011, yang dimintakan banding tersebut ;----------
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;----------
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.000.- (lima ribu rupiah) ;----------

---------- Demikian perkara ini diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **SELASA, tanggal 18 Oktober 2011,** oleh Kami : **H. BUDI SETIYONO, SH.MH,** Hakim Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **S U S M A N T O, SH.MH**, dan **H. ANTONO RUSTONO, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga oleh Majelis Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **D A R N O, SH** sebagai Panitera Pengganti PengadilanTinggi Pengkulu tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua Majelis tsb.

D. T. O. **D. T. O.**

S U S M A N T O, SH.MH **H. BUDI SETIYONO, SH.MH**

D. T. O.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H. ANTONO RUSTONO, SH.MH

Panitera Pengganti

tsb.

D. T. O.

D A R N O,

SH

Disalin untuk kepentingan dinas
Wakil Panitera,

Pengadilan Tinggi

Bengkulu,

D J A R W O K O, SH

NIP : 040033175

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P U T U S A N

Nomor 45/Pid. Sus/2014/PN Wsb

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

	Nama Lengkap	:	**MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO** ;
	Lahir di	:	Ciamis ;
	Umur/Tgl. Lahir	:	48 Tahun / 17 Oktober 1966 ;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Tempat tinggal	:	Dusun Kuripan, Desa Kuripan Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo ;
	Agama	:	Islam ;
	Pekerjaan Pendidikan	: :	Wiraswasta ; Sarjana (S1) ;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Maret 2014 ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah/ Penetapan oleh :

1 Penyidik, tanggal 10 Maret 2014 No. Pol. Sp. Han/26/III/2014/Reskrim, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;

2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 26 Maret 2014 No. B- 35/0.3.38/ Euh.1/03/2014, sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Penuntut Umum, tanggal 15 April 2014 No. PRIN-16/0.3.38/Euh.2/04/2014 sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 30 April 2014 Nomor 54/ Pen.Pid/2014/PN.Wsb, sejak 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 20 Mei 2014 Nomor 54/Pen.Pid/2014/PN Wsb. sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;

6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tahap pertama, tanggal 15 Juli 2014 Nomor 463/Pen.Pid/2014/PT. Smg sejak tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;

7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tahap kedua, tanggal 14 Agustus 2014 No. 509/Pen.Pid/2014/PT. Smg sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **DIDI YUDHA PRANATA WINARYO, S.H., FAJAR SUSANTO, S.H., ULIS ANDRIYANI, S.H.,** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Sidomulyo Timur No. 102, Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 39/S.K.Pid.V/14 tertanggal 07 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 14 Mei 2014 dengan nomor register : 38/SK/2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca keseluruhan berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar dan memperhatikan segala alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - 17/WONOS/ Epp.2/04/2014 tanggal 04 September 2014, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi pidana yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Perbankan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

Yang disita dari saksi Sdr RIYADI.

a 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama pada tanggal 3 Juni 2010 atas nama RIYADI dengan kerugian Rp. 220.800.000,00 ;

b 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian tanggal 19 Januari 2010 atas nama RIYADI dengan total kerugian Rp 31.420.000,00 ;

c 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Maret 2010 atas nama FITRI WIDYANINGRUM dengan jumlah dana investasi sebesar Rp 1.857.600,00 ;

d 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 14 Mei 2010 atas nama RIYADI dengan dana Investasi bursa pulsa Tronik sebesar Rp 100.000.000,00 ;

e 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Juli 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 70.000.000,00 ;

f 1 (satu) buah map surat perjanjian kerjasama tanggal 17 Pebruari 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 20.000.000,00 ;

g 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 80.000.000,00 ;

h 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Juli 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 150.000.000,00 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama atas nama RIYADI dengan dana investasi sebesar Rp 18.599.640,00 ;

j 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 28 maret 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 50.000.000,00 ;

k 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 1 Oktober 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 50.000.000,00 ;

l 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian tanggal 22 Oktober 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 50.000.000,00 ;

m 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian tanggal 16 Agustus 2010 atas nama RIYADI dengan membayar biaya keikut sertaan program Rp 4.500.000,00 ;

Yang disita dari saksi Sdr NURHADI IRAWAN Bin SUMRONI.

a 10 (sepuluh) buah buku tabungan berencana atas nama peserta NURHADI ;

b 1 (satu) buah buku tabungan bulanan syariah atas nama NURHADI alamat Dsn Kemiri Rt 03 Rw 02 Kel Wringinanom kec Kertek kab Wonosobo ;

c 3 (tiga) buah buku yang dikeluarkan oleh MUHAMMAD SULAEMAN WIBOWO (BOWO JENGGOT) penerbit PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT ;

d 1 (satu) buah Poster iklan bowo jenggot Gateway Pulsa Tronik ;

e 4 (empat) buah buku iklan BOWO JENGGOT GATEWAY ;

f 3 (tiga) buah surat perjanjian kerjasama atas nama NURHADI IRAWAN ;

Yang disita dari saksi Sdr SUDARTO Bin S.DARMOSISWOTO.

a 2 (dua) buah lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 19 Maret 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 5.000.000,00 ;

b 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 4 Juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 5.600.000,00 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 19 juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 5.000.000,00 ;

d 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 21 Juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 7.000.000,00 ;

e 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 10.000.000 ;

f 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 7 Agustus 2010 atas nama SUDARTO dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 12.000.000,00 ;

g Lembar surat perjanjian kerjasama Nomor surat : 3359/INV.1/BJ/ WSB/2010 tanggal 7 Desember 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana Investasi sebesar Rp 6.000.000.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut baik Penasihat Hukumnya Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 11 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima ;

2 Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Solaeman Wibowo Alias Bowo Jenggot, B.Sc Bin Waras Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga ;

3 Membebaskan ia oleh karena itu dari segala tuduhan / dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) ;

4 Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula ;

5 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa Muhammad Solaeman Wibowo Alias Bowo Jenggot, B.Sc Bin Waras Wibowo, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 11 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Jaksa asal mendakwakan tanpa mengerti permasalahannya. Bowo Jenggot didakwa melanggar UU Perbankan karena tidak izin menteri keuangan (Jaksa tidak paham prosedur yang mana seharusnya izin perbankan) ;

2 Alasan Jaksa karena salah ketik/khilaf, Jaksa itu pembohong besar dan tidak masuk akal, karena didalam surat dakwaan, Jaksa menulis lebih dari satu kali hal tersebut. Kalau dia ketik yang seharusnya "tidak izin perbankan" terus Jaksa tulis "tidak izin perbakin" ini masuk akal, salah ketik huruf itu wajar. Jauh sekali meleset salah ketik : seharusnya "tidak izin perbankan" ditulis "tidak izin Menteri Keuangan" ;

3 Setelah sidang berjalan lebih dari 5 (lima) kali sidang, saat sidang kesaksian Saksi Ahli dari Bank Indonesia dilaksanakan, Jaksa diberitahu oleh Saksi, bahwa pelanggaran Undang-Undang Perbankan itu izinnya ke Perbankan bukan tidak izin dari Menteri Keuangan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik (tanggapan atas pembelaan Terdakwa) secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 September 2014 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 April 2014, No. Reg Perkara : PDM-17/WONOS/04/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, B.Sc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO,** pada waktu waktu tertentu antara bulan September 2007 sampai dengan 31 Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan 2011, bertempat di Kantor PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT yang beralamat di Jalan Pagude Nomor 252 Talang Sidojoyo, Kabupaten Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, B.Sc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO mengajukan ijin usaha dalam bentuk CV dengan nama CV. WIN WIN (Win Win Solution) kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo, selanjutnya atas dasar permohonan tersebut maka Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo sesuai dengan dokumen SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Nomor. 503/320/PK/IX/2007 tanggal 27 September 2007 memberikan ijin kepada CV. WIN WIN (Win Win Solution) untuk usaha dalam bidang perdagangan Handphone (HP), Accesories Handphone, Pulsa, Sepeda Motor dan Mobil.

- Setelah memperoleh ijin usaha tersebut lalu CV. WIN WIN (Win Win Solution) menjalankan kegiatannya sampai dengan tahun 2009, selanjutnya pada tanggal 05 September 2009, Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, Bsc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO mengajukan perubahan badan hukum yang sebelumnya berbentuk CV dengan nama CV WIN WIN (Win Win Solution) berubah menjadi badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bernama PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT dan sesuai dengan dokumen SIUP pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo Nomor 503/40/320/PM/IX/2009 tertanggal 05 September 2009 menyebutkan bahwa PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT bergerak dalam bidang perdagangan Handphone (HP), Accessories Handphone, Pulsa, Sepeda Motor dan Mobil.
- Dalam perjalanannya PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT menjalankan usaha yang dipimpin oleh Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, Bsc. ALIAS BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo yakni selaku Direktur Utama PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT telah menawarkan kepada masyarakat program-program yang menurut Terdakwa adalah program Investasi pada intinya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat karena masyarakat menyetorkan uang kepada Terdakwa, program-program yang ditawarkan tersebut antara lain :

a Investasi Pulsa Tronik

Dalam program ini ditawarkan kepada masyarakat/nasabah dengan ketentuan masyarakat dapat menginvestasikan uangnya melalui PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT dimana setiap nasabah yang memberikan uangnya dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, B.Sc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO dengan keuntungan sebesar 8 % sampai dengan 10 % per bulan, dalam program ini setiap orang yang ikut investasi diwajibkan menjual pulsa minimal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan maksimal tidak terbatas, sedangkan keuntungan 8 %

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan 10 % setiap bulannya di ambil di kantor PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT.

b **Tabungan Berencana atau Tabernas**

Dalam program ini berupa tabungan yang disetorkan oleh masyarakat kepada PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT, ketentuannya setiap nasabah yang akan menabung wajib menyetorkan uang pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebagai tabungan pertama sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya setiap bulan wajib menabung selama dua belas bulan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian tabungan tersebut diendapkan selama 4 (empat) bulan, dan untuk pencairan tabungan sesuai dengan rencana dan kebutuhan nasabah yang diatur sesuai dengan tabel pilihan masa pencairan yang dikeluarkan oleh PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT.

c **Tabungan Bulanan Syari'ah**

Dalam program ini berbentuk tabungan dengan ketentuan setiap nasabah wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan selama 24 (Dua Puluh Empat Bulan) dan dalam bulan ke 25 (dua puluh lima) dapat diambil dengan memperoleh dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

d **Tabungan Deposito Syari'ah**

Dalam program ini ditentukan bahwa nasabah wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sekali saja kemudan pada bulan ke-25 (Dua Puluh Lima) dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

e **Program Bursa Sepeda Motor dan Mobil**

Dalam program ini dengan format yang hampir sama yaitu akses pulsa dan perhitungan keuntungan.

- Dari program-program yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut maka masyarakat yang menyetorkan uang/investasi/tabungan kepada Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN, B.Sc alias BOWO JENGGOT diberikan surat perjanjian yang disebut sebagai Sistem Kontrak yang bila sudah habis masa kontraknya bisa dilakukan perpanjangan dan setiap kali program selesai, maka modal awal yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya kepada nasabah / masyarakat yang ikut program berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT.
- Bahwa program-program tersebut disebarluaskan melalui brosur-brosur yang diberikan kepada masyarakat, melalui radio serta melalui media televisi (Jogja TV), Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN, B.Sc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO berhasil menarik dana dari masyarakat yang menyetorkan uangnya kepada Terdakwa dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jumlah yang bervariasi dan program yang bervariasi diantaranya saksi SRIYANTI Binti IMAM ABAS, Saksi RIYADI Bin RIYANTO, Saksi SETIATI MEINARSIH Binti EDY SLAMET, Saksi RAMELAN RIYANTO Bin SUJADI, Saksi SUDARTO Bin S DARMO SISWOTO, Saksi KHADRONDI Bin AHMAD AHYAK, Saksi KUSMANTO Bin MERTOPRAWIRO, Saksi FITA CHAMIDAH Binti M.DUMADI dan saksi NURHADI IRAWAN Bin SUMRONI, masing-masing telah menyetorkan uangnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Program	Setoran			Ket
			Tgl Setor	Jumlah Setoran (Rp)	Jml Total	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	Sriyanti Binti Imam Abas	Pulsa Tronik	29/12/2010	50.000.000,-		
				Jumlah	**50.000.000,-**	
2.	Riyadi Bin Riyanto	Pulsa Tronik	17/02/2010 23/02/2010 23/02/2010 28/02/2010 14/05/2010 20/07/2010 27/07/2010 10/08/2010 01/10/2010	20.000.000,- 20.000.000,- 80.000.000,- 50.000.000,- 100.000.000,- 150.000.000,- 70.000.000,- 50.000.000,- 50.000.000,-		
				Jumlah	**590.000.000,-**	
3.	Setiati Meinarsih Binti Edy Slamet	Pulsa Tronik	12/08/2010 27/07/2010 09/09/2010	17.000.000,- 40.000.000,- 65.000.000,-		
				Jumlah	**122.000.000,-**	
4.	Ramelan Riyanto Bin Sujadi	Pulsa Tronik	14/01/2010 20/02/2010 02/04/2010 26/05/2010 01/08/2010 19/10/2010 20/10/2010	15.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 20.000.000,- 10.500.000,- 8.000.000,- 8.000.000,-		
Jumlah					**81.500.000,-**	
5.	Sudarto Bin S.Darmosiswoto	Pulsa Tronik	19/03/2010 04/06/2010	5.000.000,- 5.600.000,-		

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari jumlah uang yang telah disetorkan oleh masing-masing saksi kepada Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO sesuai dengan masing-masing program yang diikutinya, beberapa saksi telah memperoleh komisi atau keuntungan 8% sampai dengan 10 % sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat selama beberapa kali, namun diantara nasabah ada yang sama sekali tidak memperoleh komisi keuntungan yang dijanjikan, dan beberapa saksi yang telah menyetorkan/menabung/ menginvestasikan uangnya pada PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT, dan ketika ditanyakan di kantor ternyata keuntungan/komisi tidak dapat diberikan sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan dan uang pokok setoran tidak dapat diambil dengan berbagai alasan sehingga para saksi merasa dirugikan sehingga melaporkan Terdakwa kepada kepolisian untuk diproses hukum ;

- Dari program yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT diperoleh fakta-fakta tentang karakteristik program investasi tersebut sama dengan karakteristik produk perbankan yaitu :

  a *Adanya penyerahan dana dari Masyarakat*

  b *Penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.*

  c *Adanya penyerahan buku tabungan atau bukti simpanan kepada penyimpan dana.*

  d *Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu*

- Bahwa mengingat karakteristik produk yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah sama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Win Solution) kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo, selanjutnya atas dasar permohonan tersebut maka Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo sesuai dengan dokumen SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Nomor. 503/320/PK/IX/2007 tanggal 27 September 2007 memberikan ijin kepada CV. WIN WIN (Win Win Solution) untuk usaha dalam bidang perdagangan Handphone (HP), Accesories Handphone, Pulsa, Sepeda Motor dan Mobil.

- Setelah memperoleh ijin usaha tersebut lalu CV. WIN WIN (Win Win Solution) menjalankan kegiatannya sampai dengan tahun 2009, selanjutnya pada tanggal 05 September 2009, Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, Bsc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO mengajukan perubahan badan hukum yang sebelumnya berbentuk CV dengan nama CV WIN WIN (Win Win Solution) berubah menjadi badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bernama PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT dan sesuai dengan dokumen SIUP pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo Nomor 503/40/320/PM/IX/2009 tertanggal 05 September 2009 menyebutkan bahwa PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT bergerak dalam bidang perdagangan Handphone (HP), Accessories Handphone, Pulsa, Sepeda Motor dan Mobil.
- Dalam perjalanannya PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT menjalankan usaha yang dipimpin oleh Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, Bsc. ALIAS BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo yakni selaku Direktur Utama PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT telah menawarkan kepada masyarakat program-program yang menurut Terdakwa adalah program Investasi pada intinya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat karena masyarakat menyetorkan uang kepada Terdakwa, program-program yang ditawarkan tersebut antara lain :

a **Investasi Pulsa Tronik**

Dalam program ini ditawarkan kepada masyarakat/nasabah dengan ketentuan masyarakat dapat menginvestasikan uangnya melalui PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT dimana setiap nasabah yang memberikan uangnya dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, B.Sc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO dengan keuntungan sebesar 8 % sampai dengan 10 % per bulan, dalam program ini setiap orang yang ikut investasi diwajibkan menjual pulsa minimal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan maksimal tidak terbatas, sedangkan keuntungan 8 % sampai dengan 10 % setiap bulannya di ambil di kantor PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b **Tabungan Berencana atau Tabernas**

Dalam program ini berupa tabungan yang disetorkan oleh masyarakat kepada PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT, ketentuannya setiap nasabah yang akan menabung wajib menyetorkan uang pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebagai tabungan pertama sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya setiap bulan wajib menabung selama dua belas bulan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian tabungan tersebut diendapkan selama 4 (empat) bulan, dan untuk pencairan tabungan sesuai dengan rencana dan kebutuhan nasabah yang diatur sesuai dengan tabel pilihan masa pencairan yang dikeluarkan oleh PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT.

c **Tabungan Bulanan Syari'ah**

Dalam program ini berbentuk tabungan dengan ketentuan setiap nasabah wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan selama 24 (Dua Puluh Empat Bulan) dan dalam bulan ke 25 (dua puluh lima) dapat diambil dengan memperoleh dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

d **Tabungan Deposito Syari'ah**

Dalam program ini ditentukan bahwa nasabah wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sekali saja kemudan pada bulan ke-25 (Dua Puluh Lima) dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

e **Program Bursa Sepeda Motor dan Mobil**

Dalam program ini dengan format yang hampir sama yaitu akses pulsa dan perhitungan keuntungan.

- Dari program-program yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut maka masyarakat yang menyetorkan uang/investasi/tabungan kepada Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN, B.Sc alias BOWO JENGGOT diberikan surat perjanjian yang disebut sebagai Sistem Kontrak yang bila sudah habis masa kontraknya bisa dilakukan perpanjangan dan setiap kali program selesai, maka modal awal yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya kepada nasabah / masyarakat yang ikut program berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT.
- Bahwa program-program tersebut disebarluaskan melalui brosur-brosur yang diberikan kepada masyarakat, melalui radio serta melalui media televisi (Jogja TV), Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN, B.Sc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO berhasil menarik hati masyarakat menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dalam jumlah yang bervariasi dan program yang bervariasi diantaranya saksi SRIYANTI Binti IMAM ABAS, Saksi RIYADI Bin RIYANTO, Saksi SETIATI MEINARSIH Binti EDY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SLAMET, Saksi RAMELAN RIYANTO Bin SUJADI, Saksi SUDARTO Bin S DARMO SISWOTO, Saksi KHADRONDI Bin AHMAD AHYAK, Saksi KUSMANTO Bin MERTOPRAWIRO, Saksi FITA CHAMIDAH Binti M.DUMADI dan saksi NURHADI IRAWAN Bin SUMRONI, masing-masing telah menyetahkan uangnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Program	Setoran Tgl Setor	Jumlah Setoran (Rp)	Jml Total	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Sriyanti Binti Imam Abas	Pulsa Tronik	29/12/2010	50.000.000,-		
				Jumlah	**50.000.000,-**	
2.	Riyadi Bin Riyanto	Pulsa Tronik	17/02/2010	20.000.000,-		
			23/02/2010	20.000.000,-		
			23/02/2010	80.000.000,-		
			28/02/2010	50.000.000,-		
			14/05/2010	100.000.000,-		
			20/07/2010	150.000.000,-		
			27/07/2010	70.000.000,-		
			10/08/2010	50.000.000,-		
			01/10/2010	50.000.000,-		
				Jumlah	**590.000.000,-**	
3.	Setiati Meinarsih Binti Edy Slamet	Pulsa Tronik	12/08/2010	17.000.000,-		
			27/07/2010	40.000.000,-		
			09/09/2010	65.000.000,-		
				Jumlah	**122.000.000,-**	
4.	Ramelan Riyanto Bin Sujadi	Pulsa Tronik	14/01/2010	15.000.000,-		
			20/02/2010	10.000.000,-		
			02/04/2010	10.000.000,-		
			26/05/2010	20.000.000,-		
			01/08/2010	10.500.000,-		
			19/10/2010	8.000.000,-		
			20/10/2010	8.000.000,-		
Jumlah					**81.500.000,-**	
5.	Sudarto Bin S.Darmosiswoto	Pulsa Tronik	19/03/2010	5.000.000,-		
			04/06/2010	5.600.000,-		

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dari jumlah uang yang telah disetorkan oleh masing-masing saksi kepada Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO sesuai dengan masing-masing program yang diikutinya, beberapa saksi telah memperoleh komisi atau keuntungan 8% sampai dengan 10 % sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat selama beberapa kali, namun diantara nasabah ada yang sama sekali tidak memperoleh komisi keuntungan yang dijanjikan, dan beberapa saksi yang telah menyetorkan/menabung/menginvestasikan uangnya pada PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT, dan ketika ditanyakan di kantor ternyata keuntungan/komisi tidak dapat diberikan sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan dan uang pokok setoran tidak dapat diambil dengan berbagai alasan sehingga para saksi merasa dirugikan sehingga melaporkan Terdakwa kepada kepolisian untuk diproses hukum ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka para saksi korban yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa mengalami kerugian dengan jumlah total kurang lebih Rp. 1.869.100.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) atau setidak-tidak nya sekitar jumlah itu ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bernama PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT dan sesuai dengan dokumen SIUP pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo Nomor 503/40/320/PM/IX/2009 tertanggal 05 September 2009 menyebutkan bahwa PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT bergerak dalam bidang perdagangan Handphone (HP), Accessories Handphone, Pulsa, Sepeda Motor dan Mobil.

- Dalam perjalanannya PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT menjalankan usaha yang dipimpin oleh Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, Bsc. ALIAS BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonosobo yakni selaku Direktur Utama PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT telah menawarkan kepada masyarakat program-program yang menurut Terdakwa adalah program Investasi pada intinya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat karena masyarakat menyetorkan uang kepada Terdakwa, program-program yang ditawarkan tersebut antara lain :

a **Investasi Pulsa Tronik**

Dalam program ini ditawarkan kepada masyarakat/nasabah dengan ketentuan masyarakat dapat menginvestasikan uangnya melalui PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT dimana setiap nasabah yang memberikan uangnya dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, B.Sc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO dengan keuntungan sebesar 8 % sampai dengan 10 % per bulan, dalam program ini setiap orang yang ikut investasi diwajibkan menjual pulsa minimal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan maksimal tidak terbatas, sedangkan keuntungan 8 % sampai dengan 10 % setiap bulannya di ambil di kantor PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT.

b **Tabungan Berencana atau Tabernas**

Dalam program ini berupa tabungan yang disetorkan oleh masyarakat kepada PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT, ketentuannya setiap nasabah yang akan menabung wajib menyetorkan uang pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebagai tabungan pertama sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya setiap bulan wajib menabung selama dua belas bulan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian tabungan tersebut diendapkan selama 4 (empat) bulan, dan untuk pencairan tabungan sesuai dengan rencana dan kebutuhan nasabah yang diatur sesuai dengan tabel pilihan masa pencairan yang dikeluarkan oleh PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT.

c **Tabungan Bulanan Syari'ah**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam program ini berbentuk tabungan dengan ketentuan setiap nasabah wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan selama 24 (Dua Puluh Empat Bulan) dan dalam bulan ke 25 (dua puluh lima) dapat diambil dengan memperoleh dana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

d **Tabungan Deposito Syari'ah**

Dalam program ini ditentukan bahwa nasabah wajib menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sekali saja kemudan pada bulan ke-25 (Dua Puluh Lima) dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

e **Program Bursa Sepeda Motor dan Mobil**

Dalam program ini dengan format yang hampir sama yaitu akses pulsa dan perhitungan keuntungan.

- Dari program-program yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut maka masyarakat yang menyetorkan uang/investasi/tabungan kepada Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN, B.Sc alias BOWO JENGGOT diberikan surat perjanjian yang disebut sebagai Sistem Kontrak yang bila sudah habis masa kontraknya bisa dilakukan perpanjangan dan setiap kali program selesai, maka modal awal yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya kepada nasabah / masyarakat yang ikut program berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT.
- Bahwa program-program tersebut disebarluaskan melalui brosur-brosur yang diberikan kepada masyarakat, melalui radio serta melalui media televisi (Jogja TV), Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN, B.Sc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO berhasil menarik masyarakat untuk datang ke kantor PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT, dan sesampainya di Kantor PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT saksi SRIYANTI Binti IMAM ABAS, Saksi RIYADI Bin RIYANTO, Saksi SETIATI MEINARSIH Binti EDY SLAMET, Saksi RAMELAN RIYANTO Bin SUJADI, Saksi SUDARTO Bin S DARMO SISWOTO, Saksi KHADRONDI Bin AHMAD AHYAK, Saksi KUSMANTO Bin MERTOPRAWIRO, Saksi FITA CHAMIDAH Binti M.DUMADI dan saksi NURHADI IRAWAN Bin SUMRONI dibujuk untuk ikut program yang ditawarkan dengan memberi janji-janji keuntungan berupa komisi sebesar 8 % sampai dengan 10 % dari uang yang diberikan serta pokok uang yang akan dikembalikan bila masa kontrak berakhir, mendengar janji-janji yang disampaikan tersebut maka para saksi masing-masing telah menyerahkan uangnya dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Nama	Program	Setoran	Jumlah Setoran Lain (Rp)	Total	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Sriyanti Binti Imam Abas	Pulsa Tronik	29/12/2010	50.000.000,-		
				Jumlah	**50.000.000,-**	
2.	Riyadi Bin Riyanto	Pulsa Tronik	17/02/2010	20.000.000,-		
			23/02/2010	20.000.000,-		
			23/02/2010	80.000.000,-		
			28/02/2010	50.000.000,-		
			14/05/2010	100.000.000,-		
			20/07/2010	150.000.000,-		
			27/07/2010	70.000.000,-		
			10/08/2010	50.000.000,-		
			01/10/2010	50.000.000,-		
				Jumlah	**590.000.000,-**	
3.	Setiati Meinarsih Binti Edy Slamet	Pulsa Tronik	12/08/2010	17.000.000,-		
			27/07/2010	40.000.000,-		
			09/09/2010	65.000.000,-		
				Jumlah	**122.000.000,-**	
4.	Ramelan Riyanto Bin Sujadi	Pulsa Tronik	14/01/2010	15.000.000,-		
			20/02/2010	10.000.000,-		
			02/04/2010	10.000.000,-		
			26/05/2010	20.000.000,-		
			01/08/2010	10.500.000,-		
			19/10/2010	8.000.000,-		
			20/10/2010	8.000.000,-		
Jumlah					**81.500.000,-**	
5.	Sudarto Bin S.Darmosiswoto	Pulsa Tronik	19/03/2010	5.000.000,-		
			04/06/2010	5.600.000,-		
			21/06/2010	7.000.000,-		
			28/06/2010	10.000.000,-		
			07/08/2010	12.000.000,-		
			07/12/2010	6.000.000,-		
Jumlah					**45.600.000,-**	
6.	Khadrondi Bin Ahmad Ayak	Pulsa Tronik	2007	900.000.000,-		
Jumlah					**900.000.000,-**	
7.	Kusmanto Bin Mertoprawiro	Pulsa Tronik	Agustus 2009	20.000.000,-		
Jumlah					**20.000.000,-**	
8.	Fita Chamidah		Pebruari 2011	20.000.000,-		

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dari jumlah uang yang telah disetorkan oleh masing-masing saksi kepada Terdakwa MUHAMMAD SOLAEMAN, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO sesuai dengan masing-masing program yang diikutinya, beberapa saksi telah memperoleh komisi atau keuntungan 8% sampai dengan 10 % sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat selama beberapa kali, namun diantara nasabah ada yang sama sekali tidak memperoleh komisi keuntungan yang dijanjikan, dan beberapa saksi yang telah menyetorkan/menabung/menginvestasikan uangnya pada PT. WIN WIN LINK BOWO JENGGOT yang akan menarik kembali pokok uang yang diserahkan dan ketika ditanyakan di kantor ternyata keuntungan/komisi tidak dapat diberikan sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan dan uang pokok setoran tidak dapat diambil dengan berbagai alasan dan hanya membuat janji-janji sehingga para saksi merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa kepada kepolisian untuk diproses hukum.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi **SETIATI MEINARSIH Binti EDY SLAMET**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi telah mengikuti investasi di PT. WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT yang beralamat di Kampung Sidojoyo, Kelurahan Pagerkukuh, Wonosobo dan direkturnya adalah Terdakwa BOWO JENGGOT ;
- Bahwa Saksi menjadi investor di PT. WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT sejak bulan Agustus 2010 dan pertama kali setor kepada seorang agen yang bernama SUWARTINAH ;
- Bahwa dalam investasi di PT. WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT tersebut keuntungan yang Saksi terima sebesar 0,8 % sampai 10% pertahun ;
- Bahwa Saksi menginvestasikan uang secara bertahap yaitu pada bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), bulan Juli 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada bulan Nopember 2010 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) , sehingga uang milik Saksi yang diinvestasikan di PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT keseluruhan berjumlah Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun pertama Saksi mendapat komisi tapi setelah akhir tahun yaitu pada bulan Desember 2010 komisi sudah tidak dibayar (macet) karena Terdakwa tertangkap di Jawa Timur di diproses di Bengkulu ;
- Bahwa setahu Saksi, PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT bergerak dalam bursa pulsa elektronik ;
- Bahwa jumlah minimum investasi adalah 2 (dua) juta rupiah ;
- Bahwa setelah menginvestasikan uang di PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT maka Saksi akan mendapatkan surat perjanjian ;
- Bahwa Suwartinah merupakan bekerja sebagai karyawan PDAM Wonosobo ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa merasa keberatan dan membantah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keterangan Saksi tersebut tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik dari PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT tetapi merupakan Direktur Utama PT tersebut ;

2 Saksi **RAMELAN RIYANTO Bin SUJADI**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi telah mengikuti investasi di PT. WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT yang beralamat di Mutiara Persada, Tembelang, Rojoimo, Wonosobo dan waktu itu yang menerima adalah karyawan dari PT. WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT ;
- Bahwa Saksi menginvestasikan uang secara bertahap yaitu pada tanggal 14 Januari 2010 telah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 20 Februari 2010 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 02 April 2010 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 26 Mei 2010 sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 01 Agustus 2010 sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 19 Oktober 2010 sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)dan pada tanggal 20 Oktober 2010 sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga uang milik Saksi yang diinvestasikan sebanyak Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam investasi tersebut ada surat perjanjiannya dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberi komisi 10 % ;
- Bahwa Saksi pernah menerima komisi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi Saksi meminta komisi tersebut sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) berupa uang sedangkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dalam bentuk pulsa tronik ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang investasi langsung di Kantor PT. WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT di Mutiara Persada Tembelang Rojoimo diterima karyawannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mulai tidak terima komisi dari PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT pada bulan Desember 2010 ;
- Bahwa setelah Saksi tidak terima komisi, lalu Saksi mendatangi kantor PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT tetapi kantornya sudah kosong dan Terdakwa ditangkap Polisi di Bengkulu ;
- Bahwa setahu Saksi banyak sekali orang yang investasi di PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya karena Saksi tidak pernah lihat datanya ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa merasa keberatan dan membantah sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi tersebut tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik dari PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT tetapi merupakan Direktur Utama PT tersebut ;
- Bahwa Saksi tersebut merupakan agen dari PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT ;

3 Saksi **RIYADI Bin RIYANTO**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi telah mengikuti investasi di PT. WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT yang beralamat di Mutiara Persada, Tembelang, Rojoimo, Wonosobo ;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditawari oleh teman Saksi yang menawarkan ada bisnis HP murah ditempat Terdakwa, lalu Saksi dikenalkan dengan Terdakwa dan oleh Terdakwa, Saksi ditawari untuk menginvestasikan sejumlah uang untuk mendapat HP dengan harga murah. Investasi tersebut berjalan lancar, kemudian Saksi ditawari oleh Terdakwa agar menginvestasikan uang di PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT untuk program pulsa tronik yang komisinya 10% ;
- Bahwa Saksi menginvestasikan uang secara bertahap yaitu pada tanggal 17 Pebruari 2010 Saksi menyetorkan uang investasi sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 23 Februari 2010 sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), pada tanggal 28 Maret 2010 sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 14 Mei 2010 sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 20 Juli 2010 sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 27 Juli 2010 sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2010 sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2010 sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tangal 22 Oktober 2010 sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total yang Saksi setorkan semuanya berjumlah Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selain investasi uang, Saksi juga ikut investasi program mobil murah yaitu Saksi membeli mobil Toyota FORTUNER dengan harga Rp. 235.000.000 selebihnya Terdakwa yang membayar ;
- Bahwa cara investasi program mobil murah adalah Saksi menginvestasikan uang sebanyak Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dimasukkan leasing / kredit dengan uang muka yang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan selebihnya yang membayar angsuran adalah Terdakwa, baru lima bulan macet dan mobil Saksi ditarik leasing ;
- Bahwa dalam investasi tersebut ada surat perjanjiannya (MoU) yang ditandatangani oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberi komisi 8% sampai dengan 10 % ;
- Bahwa Saksi menerima keseluruhan komisi sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang investasi langsung ke Terdakwa atau isteri Terdakwa yang bernama Meri atau juga karyawan Terdakwa yang bernama Yuwono dan Yekti ;
- Bahwa Saksi mulai tidak terima komisi dari PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT pada bulan Desember 2010 ;
- Bahwa di PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut banyak program investasi antara lain ada program pulsa tronik, pembayaran pajak kendaraan bermotor, beli mobil dengan harga yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

murah, ada arisan mobil dan sepeda motor, ada perpendekan hutang dan program yang lain;

- Bahwa Saksi belum mendapat pengembalian uang pokok dari PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT;
- Bahwa setahu Saksi pemilik dan pemimpin dari PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat susunan kepengurusan PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT. Karyawan PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT cukup banyak diantaranya Bu Titin, Helmi, Heri Yusuf tapi Saksi tidak tahu kedudukan dari karyawan tersebut. Setahu Saksi yang berperan penting di PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT adalah Terdakwa dan Istrinya ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa merasa keberatan dan membantah sebagai berikut :

- Bahwa untuk program pembelian HP murah yang benar adalah HP datang baru Saksi membayar;
- Bahwa setiap investor wajib ikut mengakses menjual pulsa tronik sebesar investasi yang ditanamkan lalu mendapat komisi;

4 Saksi **SUDARTO Bin S. DARMOSISWOTO**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi ikut investasi di PT. WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT setelah diberitahu oleh seorang teman ;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Kantor PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT dan bertemu dengan karyawannya dan dijelaskan apabila ikut investasi akan mendapat komisi sebesar 10% dari uang yang disetorkan dalam tempo 1 (satu) tahun kemudian Saksi tertarik dan setor uang investasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menginvestasikan uang di PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT sebesar Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah.) secara bertahap;
- Bahwa Saksi menginvestasikan uang secara bertahap yaitu pada tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal lupa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 7 Agustus 2010 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua bela juta rupiah) dan pada tanggal 7 Desember 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa dalam investasi tersebut ada surat perjanjiannya dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberi komisi 10 % ;
- Bahwa Saksi pernah mendapat komisi karena pada awalnya pemberian komisi kepada investor berjalan lancar ;
- Bahwa setiap Saksi menyerahkan uang investasi di PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT ada surat perjanjiannya (MOU) yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah menerima komisi sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mulai tidak terima komisi dari PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT pada bulan Nopember 2010 karena PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT bangkrut ;
- Bahwa sampai dengan saat ini, PT WIN-WIN LINK BOWO JENGGOT belum mengembalikan uang pokok kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

5 Saksi **Ir. TRI RACHMAWATI WAHYUNINGSIH Binti RACHMAT HADI SUDARMO**

- Bahwa ahli pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan ahli tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT). Saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan Perijinan perdagangan sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang 2014 jadi sudah menjabat menjadi kasi selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa sebelum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Saksi bertugas di kantor Lingkungan Hidup Pemda Wonosobo ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika awal Saksi menjabat di kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian untuk mencari informasi dan dokumen / arsip perijinan PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT, ternyata dokumen / arsip perijinan PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT tersebut ada ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri dokumen atau arsip perijinan dari PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT ;
- Bahwa dalam Dokumen tersebut seingat Saksi nama Pemohonnya ialah MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO als BOWO JENGGOT bin WARAS WIBOWO ;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang Saksi lihat perusahaan milik Terdakwa tersebut berbentuk Perseroan Terbatas ;
- Bahwa surat perijinan yang diberikan kepada PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT berbentuk SIUP ;
- Bahwa Usaha yang dilakukan oleh PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT bergerak dalam perdagangan HP dan Pulsa Tronik ;
- Bahwa SIUP yang diberikan kepada PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT untuk ijin perdagangan ;
- Bahwa PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT hanya mempunyai perijinan perdagangan sehingga tidak diperbolehkan untuk menarik investasi dana dari masyarakat karena kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) tidak memberikan ijin untuk investasi dana hanya melayani SIUP untuk perdagangan saja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengajukan SIUP karena waktu perijinan dikeluarkan Saksi belum bekerja di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Saksi baru masuk di kantor Pelayanan perijinan pada tahun 2010 ;
- Bahwa setelah memberikan SIUP, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tidak ikut mengawasi jalannya atau operasional suatu perusahaan dan yang berwenang mengawasi operasional suatu perusahaan adalah Kantor Perindag ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

6 Saksi **PROBO SUKESI, SE.Akt BINTI ARY SAFARI**

- Bahwa ahli pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan ahli tersebut adalah benar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia (BI) untuk wilayah V (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) sejak tahun 1993 dengan jabatan sebagai Asisten Direktur ;
- Bahwa sebagai Asisten Direktur Saksi bertugas mengawasi Bank, Pembinaan Bank dan Penutupan Bank ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, didapat pengertian-pengertian sebagai berikut:
- Yang dimaksud dengan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Yang dimaksud dengan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Yang dimaksud dengan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Yang dimaksud dengan Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- Bahwa yang berhak melakukan kegiatan usaha perbankan adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk memperoleh izin usaha Bank, persyaratan yang wajib dipenuhi menurut UU No. 10 tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah :

1 Susunan Organisasi dan Kepengurusan ;
2 Permodalan ;
3 Kepemilikan ;
4 Keahlian di Bidang perbankan ;
5 Kelayakan rencana kerja ;

- Bahwa bentuk badan hukum Bank Umum dapat berupa : Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perseroan Daerah (PD) sedangkan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan UU nomor 7 tahun 1992 dapat berupa : Perusahaan Daerah (PD), Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) atau bentuk lainnya yang ditetapkan pemerintah ;
- Bahwa pada pasal 6 UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan secara rinci mengenai usaha bank dan setelah dilakukan perubahan sesuai dengan UU No 10 tahun 1998, maka usaha Bank Umum meliputi :

1 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,sertifikat deposito,tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
2 Memberikan kredit ;
3 Menerbitkan surat pengakuan hutang ;
4 membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya ;
5 Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
6 Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang mas berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
7 Kertas Perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah ;
8 Sertifikat bank Indonesia (SBI) ;
9 Obligasi ;
10 Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
11 Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
12 Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13 Menempatkan dana bank ,meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;

14 menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga ;

15 Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;

16 Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;

17 Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat ;

18 Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;

19 Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

- Bahwa sesuai pasal 13 usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

a Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan /atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b Memberikan kredit;

c Menyediakan pembiayaan dan penempatan dan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;

d Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain;

- Bahwa dilihat unsur-unsur dan karakteristik dari simpanan dalam bentuk tabungan berdasarkan UU. No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU.No.10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

  1. Adanya penyerahan dana;
  2. Dana berasal dari masyarakat;
  3. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  4. Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu;

- Bahwa unsur-unsur dan karakteristik dari simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1 Adanya penyerahan dana ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Dana berasal dari masyarakat ;

3 Penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank ;

4 Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu ;

- Bahwa pengertian dari "menghimpun dana dari masyarakat" dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah kegiatan menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- Bahwa unsur pelanggaran yang dapat dikenakan ancaman sanksi pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 46 adalah "kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan". Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan diartikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian, unsur-unsur simpanan terdiri dari:

1 Adanya kepercayaan masyarakat penyimpan dana pada bank.

2 Berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan dana.

3 Bentuknya giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- Bahwa Karakteristik dari simpanan dalam bentuk giro yaitu:

1 adanya penyerahan dana;

2 dana berasal dari masyarakat;

3 penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

4 terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu.

- Bahwa karakteristik dari simpanan dalam bentuk sertifikat deposito yaitu:

1 Adanya penyerahan dana ;

2 Dana berasal dari masyarakat ;

3 Penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank ;

4 Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu ;

5 Sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Program Investasi yang ditawarkan oleh PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT Wonosobo sama dengan karakteristik produk Perbankan yaitu :

1 Adanya penyerahan dana dari masyarakat;

2 Penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;

3 Terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu;

sehingga hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran Undang-Undang Perbankan ;

- Bahwa setahu Saksi Bank Indonesia tidak pernah memberikan izin operasional bank kepada PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang ditunjukan oleh Penyidik dan meneliti persyaratan ketentuan dalam bukti buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT maka kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT dari masyarakat telah melanggar Pasal 46 UU RI No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 tahun 1998 dan memenuhi unsur salah satu karakteristik dari salah satu simpanan ;
- Bahwa menggunakan nama atau istilah saja dari produk – produk perbankan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam melakukan kegiatan usahanya sudah dikategorikan sebagai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ;
- Bahwa secara filosofis dan yuridis, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak penghimpun dana tersebut yang umumnya jumlah dana maupun penyimpanannya relatif besar. dan pemberian izin dari pihak yang berwenang merupakan salah satu bentuk kontrol dari otoritas untuk meminimalisir resiko yang akan ditanggung oleh pemerintah apa bila dikemudian hari dana tersebut tidak dapat dikembalikan oleh pihak yang melakukan penghimpunan dana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar ;

- Bahwa CV WIN WIN SOLUTION berdiri sejak tahun 2003 kemudian tahun 2009 berubah menjadi PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT ;

- Bahwa Struktur Organisasi PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT adalah sebagai berikut : Terdakwa selaku direktur utama, wakil direktur sdr. YUSUF, direksi marketing sdri. TITIN SUWARTINI, direksi SDM sdr. HERI

  PURWANTO, direksi bagian server pulsa sdr. HELMI, manager sdr. IBNU MALIK, direksi keuangan sdri. SITI PRATIWI dan ada staf ;

- Bahwa PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT sudah Terdakwa daftarkan dan sudah mendapatkan ijin. Perusahaan yang Terdakwa pimpin bergerak dibidang jual beli pulsa tronik ;

- Bahwa program penjualan pulsa tronik awalnya adalah setiap orang yang akan bergabung harus menjadi agen atau member dahulu lalu perusahaan meminjami atau menyuplai pulsa sebesar Rp. 100. 000. (seratus ribu rupiah) kepada member, jika saldo pulsa tersebut dijual maka member akan mendapatkan keuntungan retail / eceran, apabila member ikut dalam program promo maka member akan mendapatkan komisi 5% sampai dengan 10 % setiap bulannya dari total jumlah saldo yang diakses kemudian lama – lama berkembang banyak investor menginvestasikan uangnya di perusahaan Terdakwa ;

- Bahwa setelah menjadi PT perusahaan yang Terdakwa pimpin mengembangakan program - program usaha diantaranya program promo bursa pulsa tronik, bursa emas, bursa tabungan berencana, bursa tabungan bulanan syariah, bursa sepeda motor, bursa mobil ;

- Bahwa untuk program promo bursa pulsa tronik member minimal menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk jangka waktu 1 tahun dan member wajib mengakses pulsa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya jika hal tersebut berjalan maka member akan mendapatkan komisi 10% setiap bulannya dan ketika member menyetorkan uang tersebut maka dibuatkan perjanjian kerja sama antara PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT dengan member, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam MOU tersebut, untuk bursa emas jika member menyetorkan uang minimal Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) maka member akan mendapatkan saldo pulsa sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) untuk diakses setiap bulannya dan pada jadwal yang ditentukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka member akan mendapatkan emas untuk berapa gramnya Terdakwa lupa, Bursa tabungan berencana member harus membayar pendaftaran sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) setelah itu member wajib membuka tabungan pertama sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menabung Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) maka member akan mendapatkan saldo pulsa sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) dan setiap bulannya member wajib menabung sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan setelah diendapkan selama 4 (empat) bulan maka member tinggal memilih bulan kapan komisi penjualan pulsa dari uang yang disetorkan tersebut akan diambil dan pengambilan uang ditentukan minimal pada bulan ke- 18 s/d bulan ke- 60 dengan jumlah komisi sesuai ditabel yang ada dibuku tabungan tersebut, untuk program Bursa tabungan syariah member wajib menabung uang minimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mengakses pulsa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pada bulan ke 25 (dua puluh lima) member akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang komisi dari penjualan pulsa yang diakses selama 24 (dua puluh empat) bulan tersebut, untuk program bursa sepeda motor dan bursa mobil konsepnya Terdakwa sudah lupa akan tetapi formatnya sama setiap semua program muaranya adalah mengakses pulsa dan keuntungannya berasal dari keuntungan menjual pulsa dan setiap program promo jika sudah habis masa kontraknya bisa dilakukan perpanjangan kembali serta setiap kali program selesai maka modal awal akan diberikan seluruhnya ;

- Bahwa meskipun diperusahaan Terdakwa ada program bursa tabungan berencana, bursa tabungan bulanan syariah bukan berarti Terdakwa telah melakukan program yang karakteristiknya sama yang ada diperbankan karena program bursa tabungan berencana dan bursa tabungan bulanan syariah komisinya diberikan dari hasil penjualan pulsa dan itu ada black blox nya ;
- Bahwa perusahaan milik Terdakwa memiliki agen yang tersebar diseluruh Indonesia dengan jumlah ribuan ;
- Bahwa PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT mempublikasikan program dengan cara membuat brosur - brosur lalu disebarkan keseluruh masyarakat dan melalui Radio dan media elektronik di TV ;
- Bahwa setiap program yang satu dengan program yang lain sistemnya sama karena muaranya sama yaitu menjual pulsa dan komisinya diambil dari keuntungan menjual pulsa tronik tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keuntungan atau komisi investor didapat dari keuntungan menjual pulsa tetapi ada beberapa investor tidak menerima pulsa dan komisinya berupa uang tunai, hal ini berarti dijokikan karena ada joki yang bermain bahkan ada agen merangkap jadi joki. Perusahaan mengetahui ada joki yang bermain tetapi perusahaan tidak mau tahu yang penting ada investasi masuk. Joki – joki tersebut direkrut oleh kepala cabang ;
- Bahwa PT WIN WIN LINK BOWO JENGOT berkantor pusat di Jl.Pagode kelurahan Sidojoyo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dan mempunyai agen/cabang dibeberapa Kab/daerah diantaranya di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten/Propinsi Bengkulu dan diseluruh Indonesia ;
- Bahwa para investor bisa menyetor uangnya langsung di Kantor Pusat atau Koordinator dan atau bisa dikirim ke rekening PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT ;
- Bahwa setelah investor menyetorkan uangnya kemudian dibuatkan surat perjanjian kerja sama yang dikeluarkan oleh PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT ;
- Bahwa sekarang PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT sudah macet karena sejak bulan januari 2011 Terdakwa ditangkap polisi dan dibawa ke Bengkulu untuk diproses hukum dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa setelah Terdakwa dipenjara yang menjalankan kegiatan perusahaan adalah Wakil direktur sdr. YUSUF, direksi marketing sdri TITIN SUWARTINI, Direksi SDM sdr HERI PURWANTO, Direksi bagian server pulsa sdr HELMI, manager sdr. IBNU MALIK, Direksi keuangan sdri. SITI PRATIWI ;
- Bahwa sekarang uang investasi belum dikembalikan kepada semua investor karena aset perusahaan yang berada di Wonosobo habis dijarah selama Terdakwa berada didalam penjara ;
- Bahwa setiap investor wajib mengakses pulsatronik sebesar uang yang diinvestasikan dan untuk mengetahui telah mendapat pulsa adalah melihat saldo pulsa di HP nya dan saldo pulsa bisa dicairkan. Hal tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian MOU dan tidak ditulis ;
- Bahwa uang dari Investor yang masuk ke Perusahaan dikelola oleh Direktur keuangan yaitu SITI PRATIWI (orang Boyolali) ;
- Bahwa perusahaan mendapat keuntungan dari bursa pulsa tronik sebesar 30% dan yang diberikan kepada Investor sebesar 10% ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa modal awal perusahaan PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu miliyard rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

Yang disita dari saksi Sdr RIYADI.

a 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama pada tanggal 3 Juni 2010 atas nama RIYADI dengan kerugian Rp. 220.800.000,00 ;

b 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian tanggal 19 Januari 2010 atas nama RIYADI dengan total kerugian Rp 31.420.000,00 ;

c 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Maret 2010 atas nama FITRI WIDYANINGRUM dengan jumlah dana investasi sebesar Rp 1.857.600,00 ;

d 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 14 Mei 2010 atas nama RIYADI dengan dana Investasi bursa pulsa Tronik sebesar Rp 100.000.000,00 ;

e 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Juli 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 70.000.000,00 ;

f 1 (satu) buah map surat perjanjian kerjasama tanggal 17 Pebruari 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 20.000.000,00 ;

g 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 80.000.000,00 ;

h 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Juli 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 150.000.000,00 ;

i 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama atas nama RIYADI dengan dana investasi sebesar Rp 18.599.640,00 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 28 maret 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 50.000.000,00 ;

k 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 1 Oktober 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 50.000.000,00 ;

l 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian tanggal 22 Oktober 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 50.000.000,00 ;

m 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian tanggal 16 Agustus 2010 atas nama RIYADI dengan membayar biaya keikut sertaan program Rp 4.500.000,00 ;

Yang disita dari saksi Sdr NURHADI IRAWAN Bin SUMRONI.

a 10 (sepuluh) buah buku tabungan berencana atas nama peserta NURHADI ;

b 1 (satu) buah buku tabungan bulanan syariah atas nama NURHADI alamat Dsn Kemiri Rt 03 Rw 02 Kel Wringinanom kec Kertek kab Wonosobo ;

c 3 (tiga) buah buku yang dikeluarkan oleh MUHAMMAD SULAEMAN WIBOWO (BOWO JENGGOT) penerbit PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT ;

d 1 (satu) buah Poster iklan bowo jenggot Gateway Pulsa Tronik ;

e 4 (empat) buah buku iklan BOWO JENGGOT GATEWAY ;

f 3 (tiga) buah surat perjanjian kerjasama atas nama NURHADI IRAWAN ;

Yang disita dari saksi Sdr SUDARTO Bin S.DARMOSISWOTO.

a 2 (dua) buah lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 19 Maret 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 5.000.000,00 ;

b 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 4 Juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 5.600.000,00 ;

c 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 19 juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 5.000.000,00 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 21 Juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 7.000.000,00 ;

e 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 10.000.000 ;

f 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 7 Agustus 2010 atas nama SUDARTO dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 12.000.000,00 ;

g Lembar surat perjanjian kerjasama Nomor surat : 3359/INV.1/BJ/ WSB/2010 tanggal 7 Desember 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana Investasi sebesar Rp 6.000.000.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1 Fotocopy kwitansi untuk pembayaran komisi bursa pulsa tronik dari Terdakwa yang ditandatangani oleh Tri Silawati (Bukti T-1) ;

2 Fotocopy Akta Pendirian PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT Nomor 10 tertanggal 03 Juni 2009 (Bukti T-2) ;

3 Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Bukti T-3) ;

4 Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Surat :1001/INV.1/BJ/WSB/2010 antara PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT dengan Tri Silawati (Bukti T-4) ;

5 Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal perjanjian 15 Juni 2010 antara PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT dengan Tri Silawati (Bukti T-5) ;

6 Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal perjanjian 30 Desember 2009 antara PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT dengan Tri Silawati (Bukti T-6) ;

7 Fotocopy Perubahan Sebagian Anggaran Dasar PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT Nomor 17 (Bukti T-7) ;

8 Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor Polis 34464756 dari perusahaan asuransi Prudential (Bukti T-8);

9 Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-39924.AH.01.01.tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 18 Agustus 2009 (Bukti T-9);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 Fotocopy Akta Pendirian KOPERASI KSU BOWO JENGGOT GATEWAY Nomor 152 tertanggal 28 Januari 2009 (Bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum yang sudah tidak diragukan kebenarannya sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada tanggal 07 Mei 2003 Terdakwa telah mendirikan CV Win-Win (Win Win Solution) berdasarkan akta pendirian Nomor 16 yang dibuat oleh Notaris Budi Adi Gunawan, SH dan pada tanggal 3 Juli 2009 Terdakwa telah meningkatkan kedudukan dengan mendirikan PT. Win Win Link Bowo Jenggot sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, SH dengan susunan pengurus antara lain Terdakwa sebagai Direktur Utama ;

2 Bahwa benar selanjutnya dilakukan pendaftaran ke kantor perijinan terpadu Kabupaten Wonosobo sehingga terbit SIUP untuk PT. Win Win Link Bowo Jenggot yaitu untuk perdagangan pulsatronik ;

3 Bahwa benar Terdakwa bersama agen-agennya telah mencari orang-orang yang mau menjadi investor PT. Win Win Link Bowo Jenggot dengan menjanjikan adanya keuntungan sebesar 8% sampai dengan 10 % perbulan;

4 Bahwa benar kemudian PT. Win Win Link Bowo Jenggot melalui promosi dari Terdakwa berhasil menghimpun dana dari masyarakat dimana masyarakat yang tertarik dengan adanya keuntungan yang tinggi untuk menjadi investor PT. Win Win Link Bowo Jenggot dengan menginvestasikan dana/uangnya minimal senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tenggang waktu selama 1 tahun ;

5 Bahwa benar PT. Win Win Link Bowo Jenggot telah menerima dana investasi dari masyarakat dengan menawarkan keuntungan 8% sampai dengan 10 % perbulan;

6 Bahwa benar PT. Win Win Link Bowo Jenggot tersebut menawarkan keuntungan 8% sampai dengan 10 % perbulan atas Investasi yang disetorkan. Selanjutnya dana tersebut ditampung ke rekening atas nama Terdakwa dan atas nama PT. Win Win Link Bowo Jenggot. Selanjutnya dana yang ditampung tersebut dipergunakan untuk pembelian pulsatronik ;

7 Bahwa benar yang menandatangani MoU / perjanjian adalah Terdakwa sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8 Bahwa benar Investasi yang digunakan oleh PT. Win Win Link Bowo Jenggot tersebut adalah investor yang menyimpan/menitipkan uangnya kepada ERA dengan jangka waktu tertentu (1 tahun) dan dapat diambil secara utuh setelah jatuh tempo dan dalam jangka waktu Investasi tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 8% sampai dengan 10 % perbulan;

9 Bahwa benar investor yang telah menyimpan dananya di PT. Win Win Link Bowo Jenggot akan mendapatkan tanda bukti berupa MoU yang berisikan jumlah uang yang disimpan dan jangka waktu penyimpanan / lnvestasi ;

10 Bahwa benar terhadap investor yang telah menyimpan uangnya tersebut diberikan kartu / slip daftar pengambilan keuntungan dan kepada investor yang sudah jatuh tempo maka dana yang disetorkan tersebut dikembalikan penuh sesuai nilai modal ;

11 Bahwa benar proses perekrutan investor adalah dengan membagikan selebaran / brosur yang menjanjikan keuntungan kepada para investor yang berinvestasi di PT. Win Win Link Bowo Jenggot akan mendapatkan keuntungan 8% sampai dengan 10 % perbulan ;

12 Bahwa benar PT. Win Win Link Bowo Jenggot tidak memiliki Ijin Usaha dari Bank Indonesia ;

13 Bahwa benar Terdakwa pada bulan januari 2011 ditangkap polisi dan dibawa ke Bengkulu untuk diproses hukum dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

14 Bahwa berdasarkan keterangan ahli **PROBO SUKESI,SE.Akt BINTI ARY SAFARI** dari Bank Indonesia dapat diketahui bahwa unsur pelanggaran yang dapat dikenakan ancaman sanksi pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 46 adalah "kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan". Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan diartikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian, unsur-unsur simpanan terdiri dari:

1 Adanya kepercayaan masyarakat penyimpan dana pada bank.

2 Berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan dana.

3 Bentuknya giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15 Bahwa berdasarkan keterangan ahli **PROBO SUKESI,SE.Akt BINTI ARY SAFARI** dijelaskan penggunaan nama atau istilah saja dari produk – produk perbankan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam melakukan kegiatan usahanya sudah dikategorikan sebagai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

ATAU

KEDUA :

Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif yaitu dengan adanya kata penghubung **"Atau".** Bahwa KUHAP tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. Van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1 Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;

2 Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah "dakwaan pilihan" (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang merupakan ketentuan yang bersifat "*lex specialist*" maka Majelis Hakim akan lebih memilih mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1 Barang siapa ;
2 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan ;
3 Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia ;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah menunjuk kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertanggungjawaban atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dan terhadapnya tidak terdapat pengecualian sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO** yang mana setelah ditanyakan kepadanya tentang Identitasnya dan dicocokkan dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum ternyata adalah benar dan sesuai ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa **MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO** mengikutinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya pada setiap pemeriksaan di persidangan, oleh karenanya pada diri Terdakwa tidak terdapat pengecualian sebagaimana di atur dalam pasal 44 KUHP maka kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim , Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa yuridis tersebut, maka unsur ke-1 Pasal tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan”

Menimbang, bahwa pengertian dari "menghimpun dana dari masyarakat" dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah kegiatan menghimpun atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu . Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pengertian Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti yaitu berupa keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa maupun dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah terungkap fakta bahwa pada tanggal 07 Mei 2003 Terdakwa telah mendirikan CV Win-Win (Win Win Solution) berdasarkan akta pendirian Nomor 16 yang dibuat oleh Notaris Budi Adi Gunawan, SH dan pada tanggal 3 Juli 2009 Terdakwa telah meningkatkan kedudukan dengan mendirikan PT. Win Win Link Bowo Jenggot sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, SH dengan susunan pengurus antara lain Terdakwa sebagai Direktur Utama . Bahwa selanjutnya dilakukan pendaftaran ke kantor perijinan terpadu Kabupaten Wonosobo sehingga terbit SIUP untuk PT. Win Win Link Bowo Jenggot ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama agen-agennya telah mencari orang-orang yang mau menjadi investor di PT. Win Win Link Bowo Jenggot dengan menginvestasikan uangnya serta menjanjikan adanya keuntungan sebesar 8% sampai dengan 10 % perbulan ;

Menimbang, bahwa PT. Win Win Link Bowo Jenggot melalui para agennya serta promosi dari Terdakwa berhasil menghimpun dana dari masyarakat dimana masyarakat yang tertarik dengan adanya keuntungan yang tinggi mendaftar menjadi investor di PT. Win Win Link Bowo Jenggot dengan menginvestasikan dana/uangnya minimal senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tenggang waktu selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa PT. Win Win Link Bowo Jenggot menawarkan keuntungan 8 % sampai dengan 10 % perbulan atas Investasi yang disetorkan, proses penerimaan Investasi dan Pemberian keuntungan kepada investor PT. Win Win Link Bowo Jenggot adalah investor menyetorkan dana ke PT. Win Win Link Bowo Jenggot. Selanjutnya ditampung ke rekening atas nama Terdakwa dan atas nama PT. Win Win Link Bowo Jenggot. Selanjutnya dana yang ditampung tersebut dipergunakan pembelian pulsa tronik ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa yang menandatangani MOU / Perjanjian Kontrak Investasi adalah Terdakwa sendiri. Bahwa investasi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakan PT. Win Win Link Bowo Jenggot tersebut adalah investor menyimpan/ menitipkan uangnya kepada PT. Win Win Link Bowo Jenggot dengan jangka waktu tertentu (1 tahun) dan dapat diambil secara utuh setelah jatuh tempo dan dalam jangka waktu investasi tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 8% sampai 10% perbulan ;

Menimbang, bahwa investor tersebut telah menyimpan dananya di PT. Win Win Link Bowo Jenggot akan mendapatkan bukti berupa MoU yang berisikan Jumlah uang yang di serahkan/disimpan/di-lnvestasikan ke PT. Win Win Link Bowo Jenggot, jangka waktu penyimpanan/lnvestasi. Bahwa terhadap investor yang telah menyimpan uangnya di PT. Win Win Link Bowo Jenggot diberikan Kartu/Slip daftar pengambilan keuntungan dan kepada investor yang sudah jatuh tempo maka dana yang disetorkan tersebut dikembalikan penuh sesuai nilai modal;

Menimbang, bahwa proses perekrutan investor adalah dengan membagikan selebaran/brosur yang menjanjikan keuntungan kepada para investor yang berinvestasi di PT. Win Win Link Bowo Jenggot akan mendapatkan keuntungan 8 % sampai dengan 10 % perbulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menawarkan program pulsa tronik juga menawarkan program lain yaitu program bursa tabungan berencana, bursa tabungan bulanan syariah, bursa tabungan deposito syari'ah dan bursa sepeda motor dan mobil, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **PROBO SUKESI, SE.Akt BINTI ARY SAFARI** dari Bank Indonesia diperoleh fakta bahwa :

⇒ Unsur-unsur simpanan terdiri dari:

1 Adanya kepercayaan masyarakat penyimpan dana pada bank.

2 Berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan dana.

3 Bentuknya giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

⇒ Karakteristik dari simpanan dalam bentuk giro adalah :

1 adanya penyerahan dana;

2 dana berasal dari masyarakat;

3 penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

4 terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu.

⇒ Karakteristik dari simpanan dalam bentuk tabungan yaitu:

1 adanya penyerahan dana;

2 dana berasal dari masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

4 terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu.

⇒ Bahwa karakteristik dari simpanan dalam bentuk deposito yaitu:

1 adanya penyerahan dana;

2 dana berasal dari masyarakat;

3 penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

4 terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu.

⇒ Bahwa karakteristik dari simpanan dalam bentuk sertifikat deposito yaitu:

1 adanya penyerahan dana;

2 dana berasal dari masyarakat;

3 penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;

4 terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu;

5 sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan keterangan Ahli **PROBO SUKESI, SE.Akt BINTI ARY SAFARI** menerangkan bahwa menggunakan nama atau istilah saja dari produk – produk perbankan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam melakukan kegiatan usahanya sudah dikategorikan sebagai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT. Win Win Link Bowo Jenggot dari masyarakat di daerah Wonosobo dan sekitarnya tersebut apabila didasarkan pada perjanjian penyimpanan dana telah memenuhi karakteristik dari salah satu jenis simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut yaitu telah memenuhi karakteristik dari simpanan dalam bentuk deposito yaitu adanya penyerahan dana , dana berasal dari masyarakat, penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, terdapat imbalan berupa uang dengan prosentase tertentu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan bahwa investasi yang digunakan oleh PT. Win Win Link Bowo Jenggot tersebut adalah investor menyimpan/menitipkan uangnya kepada PT. Win Win Link Bowo Jenggot dengan jangka waktu tertentu (1 tahun) dan dapat diambil secara utuh setelah jatuh tempo dan dalam jangka waktu investasi tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 8% sampai dengan 10% perbulan, antara lain :

No	Nama	Program	Setoran			Ket
			Tgl Setor	Jumlah Setoran (Rp)	Jml Total	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Sriyanti Binti Imam Abas	Pulsa Tronik	29/12/2010	50.000.000,-		
				Jumlah	**50.000.000,-**	
2.	Riyadi Bin Riyanto	Pulsa Tronik	17/02/2010 23/02/2010 23/02/2010 28/02/2010 14/05/2010 20/07/2010 27/07/2010 10/08/2010 01/10/2010	20.000.000,- 20.000.000,- 80.000.000,- 50.000.000,- 100.000.000,- 150.000.000,- 70.000.000,- 50.000.000,- 50.000.000,-		
				Jumlah	**590.000.000,-**	
3.	Setiati Meinarsih Binti Edy Slamet	Pulsa Tronik	12/08/2010 27/07/2010 09/09/2010	17.000.000,- 40.000.000,- 65.000.000,-		
				Jumlah	**122.000.000,-**	
4.	Ramelan Riyanto Bin Sujadi	Pulsa Tronik	14/01/2010 20/02/2010 02/04/2010 26/05/2010 01/08/2010 19/10/2010 20/10/2010	15.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 20.000.000,- 10.500.000,- 8.000.000,- 8.000.000,-		
Jumlah					**81.500.000,-**	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.	Sudarto Bin S.Darmosiswoto	Pulsa Tronik	19/03/2010 04/06/2010 21/06/2010 28/06/2010 07/08/2010 07/12/2010	5.000.000,- 5.600.000,- 7.000.000,- 10.000.000,- 12.000.000,- 6.000.000,-		
Jumlah					**45.600.000,-**	
6.	Khadrondi Bin Ahmad Ayak	Pulsa Tronik	2007	900.000.000,-		
Jumlah					**900.000.000,-**	
7.	Kusmanto Bin Mertoprawiro	Pulsa Tronik	Agustus 2009	20.000.000,-		
Jumlah					**20.000.000,-**	
8.	Fita Chamidah Binti M. Dumadi	Arisan Motor, Tabungan Berencana, Pulsa Tronik	Pebruari 2011	20.000.000,-		
Jumlah					**20.000.000,-**	
9.	Nurhadi Bin Sumroni	Tabernas	Maret 2009	40.000.000,-		
Jumlah					**40.000.000,-**	
Jumlah Total					**Rp. 1.869.100.000,-**	

Menimbang, bahwa terhadap investor yang telah menyimpan dananya di PT. Win Win Link Bowo Jenggot diberikan bukti berupa MoU yang berisikan Jumlah uang yang di serahkan PT. Win Win Link Bowo Jenggot, jangka waktu penyimpanan/lnvestasi . Bahwa terhadap investor yang telah menyimpan uangnya di PT. Win Win Link Bowo Jenggot diberikan Kartu/Slip daftar pengambilan keuntungan. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur "Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia "

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Bank Indonesia di depan persidangan yang menerangkan bahwa pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat adalah badan hukum yang berbentuk PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah yang telah mempunyai ijin sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disamping itu ada juga badan hukum lain yang dapat menghimpun dana masyarakat yang diatur oleh undang-undang tersendiri antara lain Koperasi, Asuransi dan PT. Pos, ahli dari Bank Indonesia juga menerangkan bahwa PT. Win Win Link Bowo Jenggot dimana yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha sebagai Bank dari Pimpinan Bank Indonesia dan hal ini dibenarkan pula oleh Terdakwa , dengan demikian Terdakwa **MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO** dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui PT. Win Win Link Bowo Jenggot tanpa dilengkapi izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia . Bahwa Terdakwa sendiri di persidangan mengakui bahwa perusahaannya hanya memiliki SIUP dengan usaha perdagangan pulsatronik bukan untuk menghimpun investasi sebagaimana sebuah bank, koperasi, atau BPR. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *pledooi* atau nota pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tentang analisis Yuridis terhadap surat dakwaan dan perubahan surat dakwaan (dalam surat tuntutan), yang menyatakan bahwa dalam surat dakwaan Jaksa telah memasukkan unsur-unsur sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut **: ".....telah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia**, ...", kemudian dalam surat tuntutan Penuntut Umum bunyi unsur "atas seijin Menteri Keuangan" telah dirubah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya (Requisitoir) sebagaimana berbunyi **..... , namun sebelum penuntut umum membuktikan dakwaan penuntut umum terlebih dahulu membetulkan adanya kesalahan ketik/Clerical Error terhadap kalimat dalam dakwaan kesatu yaitu terkait frasa " tanpa ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia" yang benar adalah "tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia" hal tersebut semata-mata kekhilafan dari penuntut umum dalam mengetik dakwaan tanpa mengurangi maksud dalam dakwaan kesatu....,** Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan yang demikian itu, penyebutan unsur "**tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia yang ditulis oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi "tanpa ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia"** dipandang sebagai "clerical error", yang dapat "ditolerir". Lebih dari itu, kekurangan syarat formal sebagaimana dikategorikan sebagai "clerical error" tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau tidak dengan sendirinya batal menurut hukum (van rechtswege nietig atau null and void). Dengan pertimbangan diatas, dalil Penasihat Hukum diatas dapat dikesampingkan ;
- bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaan pertama dan oleh karena itu membawa implikasi Muhammad Solaeman Wibowo tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 **sebagaimana telah diubah dengan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Majelis berpendapat telah cukup dinilai melalui pertimbangan putusan yang Majelis kemukakan di dalam pertimbangan mengenai unsur – unsur pasal dakwaan, yang pada prinsipnya Majelis berpandangan seluruh unsur dakwaan kesatu pada diri Terdakwa telah terbukti;

- bahwa selanjutnya terhadap hal - hal lain yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa namun belum dipertimbangkan tersendiri, Majelis berargumen telah cukup dinilai sekaligus melalui pertimbangan mengenai unsur – unsur pasal dakwaan, yang pada pokoknya Majelis menilai seluruh unsur dakwaan kesatu pada diri Terdakwa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa, sepanjang menyangkut sikap Terdakwa dalam membantah tindak pidana yang telah dilakukan , Majelis Hakim berpendapat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditekankan kepada klausul “Menghimpun Dana Dari Masyarakat ” yang dalam hal ini telah terdapat cukup alat bukti yang sah sesuai Prinsip Pembuktian minimum yang dianut oleh KUHAP dan menunjukkan Terdakwa memang telah Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan dari Terdakwa sendiri adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam **Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan** adalah bersifat kumulatif maka selain Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa , terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 273 KUHAP jo pasal 30 KUHP maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa hukuman kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

Yang disita dari saksi Sdr RIYADI

g 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama pada tanggal 3 Juni 2010 atas nama RIYADI dengan kerugian Rp. 220.800.000,00 ;

h 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian tanggal 19 Januari 2010 atas nama RIYADI dengan total kerugian Rp 31.420.000,00 ;

i 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Maret 2010 atas nama FITRI WIDYANINGRUM dengan jumlah dana investasi sebesar Rp 1.857.600,00 ;

j 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 14 Mei 2010 atas nama RIYADI dengan dana Investasi bursa pulsa Tronik sebesar Rp 100.000.000,00 ;

k 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Juli 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 70.000.000,00 ;

l 1 (satu) buah map surat perjanjian kerjasama tanggal 17 Pebruari 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 20.000.000,00 ;

m 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 80.000.000,00 ;

n 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Juli 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 150.000.000,00 ;

o 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama atas nama RIYADI dengan dana investasi sebesar Rp 18.599.640,00 ;

p 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 28 maret 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 50.000.000,00 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

q 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 1 Oktober 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 50.000.000,00 ;

r 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian tanggal 22 Oktober 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 50.000.000,00 ;

s 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian tanggal 16 Agustus 2010 atas nama RIYADI dengan membayar biaya keikut sertaan program Rp 4.500.000,00 ;

Yang disita dari saksi Sdr NURHADI IRAWAN Bin SUMRONI.

a 10 (sepuluh) buah buku tabungan berencana atas nama peserta NURHADI ;

b 1 (satu) buah buku tabungan bulanan syariah atas nama NURHADI alamat Dsn Kemiri Rt 03 Rw 02 Kel Wringinanom kec Kertek kab Wonosobo ;

c 3 (tiga) buah buku yang dikeluarkan oleh MUHAMMAD SULAEMAN WIBOWO (BOWO JENGGOT) penerbit PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT ;

d 1 (satu) buah Poster iklan bowo jenggot Gateway Pulsa Tronik ;

e 4 (empat) buah buku iklan BOWO JENGGOT GATEWAY ;

f 3 (tiga) buah surat perjanjian kerjasama atas nama NURHADI IRAWAN ;

Yang disita dari saksi Sdr SUDARTO Bin S.DARMOSISWOTO.

h 2 (dua) buah lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 19 Maret 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 5.000.000,00 ;

i 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 4 Juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 5.600.000,00 ;

j 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 19 juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 5.000.000,00 ;

k 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 21 Juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 7.000.000,00 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

l 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 10.000.000 ;

m 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 7 Agustus 2010 atas nama SUDARTO dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 12.000.000,00 ;

n Lembar surat perjanjian kerjasama Nomor surat : 3359/INV.1/BJ/ WSB/2010 tanggal 7 Desember 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana Investasi sebesar Rp 6.000.000.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan penderitaan yang mendalam bagi korban/masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdapat peran serta dari masyarakat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan **Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :**

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOLAEMAN WIBOWO, BSc Alias BOWO JENGGOT Bin WARAS WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA "** ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun ;**

3 Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan** ;

4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6 Menetapkan barang bukti berupa:

Yang disita dari saksi Sdr RIYADI.

a 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama pada tanggal 3 Juni 2010 atas nama RIYADI dengan kerugian Rp. 220.800.000,00 ;

b 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian tanggal 19 Januari 2010 atas nama RIYADI dengan total kerugian Rp 31.420.000,00 ;

c 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Maret 2010 atas nama FITRI WIDYANINGRUM dengan jumlah dana investasi sebesar Rp 1.857.600,00 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 14 Mei 2010 atas nama RIYADI dengan dana Investasi bursa pulsa Tronik sebesar Rp 100.000.000,00 ;

e 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 27 Juli 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 70.000.000,00 ;

f 1 (satu) buah map surat perjanjian kerjasama tanggal 17 Pebruari 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 20.000.000,00 ;

g 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 80.000.000,00 ;

h 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Juli 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 150.000.000,00 ;

i 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama atas nama RIYADI dengan dana investasi sebesar Rp 18.599.640,00 ;

j 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 28 maret 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 50.000.000,00 ;

k 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian kerjasama tanggal 1 Oktober 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 50.000.000,00 ;

l 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian tanggal 22 Oktober 2010 atas nama RIYADI dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 50.000.000,00 ;

m 1 (satu) buah map berisikan surat perjanjian tanggal 16 Agustus 2010 atas nama RIYADI dengan membayar biaya keikut sertaan program Rp 4.500.000,00 ;

Yang disita dari saksi Sdr NURHADI IRAWAN Bin SUMRONI.

a 10 (sepuluh) buah buku tabungan berencana atas nama peserta NURHADI ;

b 1 (satu) buah buku tabungan bulanan syariah atas nama NURHADI alamat Dsn Kemiri Rt 03 Rw 02 Kel Wringinanom kec Kertek kab Wonosobo ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c 3 (tiga) buah buku yang dikeluarkan oleh MUHAMMAD SULAEMAN WIBOWO (BOWO JENGGOT) penerbit PT WIN WIN LINK BOWO JENGGOT ;

d 1 (satu) buah Poster iklan bowo jenggot Gateway Pulsa Tronik ;

e 4 (empat) buah buku iklan BOWO JENGGOT GATEWAY ;

f 3 (tiga) buah surat perjanjian kerjasama atas nama NURHADI IRAWAN ;

Yang disita dari saksi Sdr SUDARTO Bin S.DARMOSISWOTO.

a 2 (dua) buah lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 19 Maret 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 5.000.000,00 ;

b 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 4 Juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 5.600.000,00 ;

c 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 19 juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 5.000.000,00 ;

d 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 21 Juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 7.000.000,00 ;

e 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 28 Juni 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 10.000.000 ;

f 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tanggal 7 Agustus 2010 atas nama SUDARTO dengan dana investasi bursa pulsa tronik sebesar Rp 12.000.000,00 ;

g Lembar surat perjanjian kerjasama Nomor surat : 3359/INV.1/BJ/ WSB/2010 tanggal 7 Desember 2010 atas nama SUDARTO dan menyetor dana Investasi sebesar Rp 6.000.000.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.00 (seribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin tanggal 15 September 2014 oleh kami **FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY ADI SAPUTRA, SH.M.Hum** dan **WAHYU BINTORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SRI WALUYO,** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **K.N. KUSUMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Terdakwa tanpa kehadiran Penasihat Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA	**HAKIM KETUA,**
ttd	**ttd**
DEDY ADI SAPUTRA, SH.M.Hum	**FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH.**
ttd	
WAHYU BINTORO,S.H.	

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SRI WALUYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)